

ANTOLOGI KRISIS MULTI DIMENSI:

Ancaman Nyata Runtuhnya Reputasi
dan Masa Depan Pariwisata Bali

UU No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta

Fungsi dan Sifat Hak Cipta Pasal 4

Hak Cipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a merupakan hak eksklusif yang terdiri atas hak moral dan hak ekonomi.

Pembatasan Pelindungan Pasal 26

Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, Pasal 24, dan Pasal 25 tidak berlaku terhadap:

- i. Penggunaan kutipan singkat Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait untuk pelaporan peristiwa aktual yang ditujukan hanya untuk keperluan penyediaan informasi aktual;
- ii. Penggandaan Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait hanya untuk kepentingan penelitian ilmu pengetahuan;
- iii. Penggandaan Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait hanya untuk keperluan pengajaran, kecuali pertunjukan dan Fonogram yang telah dilakukan Pengumuman sebagai bahan ajar; dan
- iv. Penggunaan untuk kepentingan pendidikan dan pengembangan ilmu pengetahuan yang memungkinkan suatu Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait dapat digunakan tanpa izin Pelaku Pertunjukan, Produser Fonogram, atau Lembaga Penyiaran.

Sanksi Pelanggaran Pasal 113

1. Setiap Orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf i untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp100.000.000 (seratus juta rupiah).
2. Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan/atau huruf h untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

ANTOLOGI KRISIS MULTI DIMENSI:

Ancaman Nyata Runtuhnya Reputasi
dan Masa Depan Pariwisata Bali

I Gusti Bagus Rai Utama

Antologi Krisis Multi Dimensi:

Ancaman Nyata Runtuhnya Reputasi dan Masa Depan Pariwisata Bali

Penulis : I Gusti Bagus Rai Utama
Desain Cover : Nama
Sumber : Link
Tata Letak : Titis Y.
Proofreader : Aditya T.

Ukuran:

viii, 129 hlm., Uk.: 15.5x23 cm

ISBN:

No. ISBN

Cetakan Pertama:

Bulan 2025

Hak Cipta 2025 pada Penulis

Copyright © 2025 by Deepublish Publisher

All Right Reserved

PENERBIT DEEPUBLISH

(Grup Penerbitan CV BUDI UTAMA)

Anggota IKAPI (076/DIY/2012)

Jl. Rajawali, Gg. Elang 6, No. 3, Drono, Sardonoharjo, Ngaglik, Sleman

Jl. Kaliurang Km. 9,3 – Yogyakarta 55581

Telp./Faks : (0274) 4533427

Website : www.penerbitdeepublish.com

www.deepublishstore.com

E-mail : cs@deepublish.co.id

Hak cipta dilindungi undang-undang.

Dilarang keras menerjemahkan, memfotokopi, atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini tanpa izin tertulis dari penerbit.

Isi di luar tanggung jawab percetakan.

KATA PENGANTAR PENERBIT

Puji syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat rahmat dan karunia-Nya, buku ***Antologi Krisis Multi Dimensi: Ancaman Nyata Runtuhnya Reputasi dan Masa Depan Pariwisata Bali*** dapat terwujud dan hadir di tengah-tengah masyarakat. Sebagai penerbit yang berkomitmen untuk mencerdaskan, membahagiakan, dan memuliakan umat manusia, kami merasa terhormat dapat berkontribusi dalam penyebaran ilmu pengetahuan dan pendidikan melalui penerbitan karya ini.

Buku ini merupakan antologi opini-esai kritis-tematik yang menghadirkan ulasan mendalam atas krisis multidimensi yang mengancam reputasi dan masa depan pariwisata Bali, menjadikannya referensi penting bagi pemerhati, pelaku, serta pemangku kebijakan di bidang pariwisata dan pembangunan daerah. Disusun dengan urgensi tinggi, buku ini menyoroti fenomena marginalisasi masyarakat lokal, degradasi lingkungan, ketimpangan sosial, hingga erosi spiritualitas yang timbul sebagai dampak pembangunan berorientasi profit dan globalisasi, dengan pariwisata massal menjadi pusat permasalahan.

Terima kasih dan penghargaan terbesar kami sampaikan kepada penulis yang telah memberikan kepercayaan, perhatian, dan kontribusi penuh demi kesempurnaan buku ini. Kami berharap karya ini dapat memberikan kontribusi yang signifikan dalam perkembangan keilmuan di Indonesia. Semoga buku ini tidak hanya menjadi sumber informasi yang berharga, tetapi juga menginspirasi pembacanya untuk terus berkembang dan berkontribusi dalam membangun bangsa yang lebih baik.

Hormat Kami,
Penerbit Deepublish

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR PENERBIT	v
DAFTAR ISI	vi
PEMBANGUNAN BALI ATAU PEMBANGUNAN DI BALI?	1
KEPEMIMPINAN LOKAL DI BALI: ANTARA JABATAN DAN PENGABDIAN	6
CITRA POSITIF DAN PARADOKS TATA KELOLA PARIWISATA BALI	11
BALI, BENCANA PEMBANGUNAN, DAN JALAN PULANG KE TRI HITA KARANA	16
PELANGGARAN TATA RUANG DI INDONESIA: ANTARA KOMPROMI, EKSPLOITASI, DAN KRISIS WARISAN.....	21
KRISIS SAMPAH BALI 2025: ANTARA ANCAMAN CITRA PARIWISATA DAN MOMENTUM REFORMASI LINGKUNGAN	26
MASA DEPAN BALI PERTANYAKAN: REFORMASI SURGA PARIWISATA MENJADI PUSAT INOVASI EKONOMI BERKELANJUTAN	31
KORUPSI DAN ANCAMAN DISINTEGRASI BANGSA: TINJAUAN KRITIS ATAS KRISIS TATA KELOLA DI INDONESIA	36
SEJARAH MILIK PEMENANG ATAU MILIK SEMUA? REFLEKSI KRITIS ATAS NARASI, KUASA, DAN KEBENARAN	41
PEMBANGUNAN TERMINAL LNG SIDAKARYA: ANTARA KETAHANAN ENERGI DAN KEBERLANJUTAN SOSIAL LINGKUNGAN BALI.....	46
PASAR TRADISIONAL BALI DALAM PUSARAN MODERNISASI: ANTARA TITIK KRITIS DAN HARAPAN REVITALISASI.....	51

FRAGMENTASI PARIWISATA BALI PASCA PANDEMI: ANTARA <i>OVERTOURISM</i> , KESAKRALAN, DAN JALAN MENUJU KEBERLANJUTAN	56
PARIWISATA BALI DI PERSIMPANGAN: ANTARA <i>OVERTOURISM</i> , TRANSFORMASI, DAN KEBERLANJUTAN.....	61
TAGAR #KABURAJADULU: EKSPRESI KEKECEWAAN, TANTANGAN PENDIDIKAN, DAN ARAH MASA DEPAN GENERASI MUDA INDONESIA.....	66
BALI 67 TAHUN, INDONESIA 80 TAHUN: ANTARA PERAYAAN DAN EVALUASI DIRI DI TENGAH KRISIS MULTIDIMENSI	71
PARADOKS PARIWISATA BALI: KUNJUNGAN MENINGKAT, HUNIAN HOTEL MENURUN, DAN TANTANGAN TATA KELOLA BERKELANJUTAN.....	76
BANDARA INTERNASIONAL NGURAH RAI: ANTARA TANTANGAN KAPASITAS DAN SIMBOL KEMAJUAN PARIWISATA BALI	81
BANTUAN SOSIAL RP 2 JUTA PER KK DI BADUNG: ANTARA JANJI POLITIK, REGULASI, DAN EMPATI SOSIAL.....	86
MENJARING WISATAWAN DOMESTIK: MASA DEPAN PARIWISATA INDONESIA DALAM BAYANGAN GLOBALISASI	91
PARIWISATA BALI DALAM BAYANG-BAYANG KONFLIK GEOPOLITIK: ANCAMAN PHK DAN STRATEGI KETAHANAN	96
SURAT EDARAN: ANTARA INSTRUMEN ADMINISTRASI, MACAM OMPONG, DAN SIMBOL KEPEMIMPINAN.....	102
MENJAGA BUMI LESTARI, MANUSIA HIDUP DAMAI: REFLEKSI DARI TAGAR #SAVERAJAAMPAT	108
BALI DAN JALAN MENUJU PUSAT <i>WELLNESS</i> DUNIA	113
MENJAGA JATILUWIH, MENYELAMATKAN JIWA PERTANIAN BALI.....	118

DAFTAR PUSTAKA	123
BIODATA PENULIS.....	129

PEMBANGUNAN BALI ATAU PEMBANGUNAN DI BALI?



Perdebatan mengenai dikotomi antara “pembangunan Bali” dan “pembangunan di Bali” hingga kini tetap mengemuka sebagai isu fundamental yang menyangkut arah masa depan pulau ini. Perbedaan terminologi keduanya memiliki makna filosofis sekaligus politis yang jauh melampaui sekadar permainan kata. “Pembangunan Bali” dimaknai sebagai pembangunan yang lahir dari rahim Bali itu sendiri, berakar dari nilai budaya, tradisi, dan visi masyarakat Bali tentang kesejahteraan dan kelestarian hidup. Artinya, pembangunan Bali berorientasi pada harmoni antara manusia, alam, dan spiritualitas sebagaimana dipesankan dalam Tri Hita Karana, dengan masyarakat Bali ditempatkan sebagai subjek utama yang menentukan arah. Sebaliknya, istilah “pembangunan di Bali” lebih bernuansa eksternal, berorientasi pada kepentingan kapital dan logika pasar global yang seringkali datang dari luar. Dalam rumusan ini, Bali hanya menjadi lokasi pembangunan, bukan pelaku, sehingga masyarakat adat

Bali lebih banyak dijadikan objek kebijakan yang dikerangkai untuk memenuhi agenda ekonomi nasional maupun internasional [1].

Dikotomi tersebut semakin terasa ketika kita melihat realitas sosial ekonomi Bali kontemporer. Di satu sisi, Bali memang berhasil mencapai pertumbuhan ekonomi yang relatif tinggi berkat pariwisata. Namun di sisi lain, marginalisasi sosial terjadi dalam skala luas, di mana hanya sebagian kecil masyarakat Bali yang benar-benar mampu bersaing dalam sektor bisnis modern global. Mayoritas masyarakat Bali tertinggal dalam pusaran kompetisi kapitalisasi pariwisata, berperan hanya sebagai pekerja di hotel, restoran, atau hiburan dengan upah lokal, sementara investor besar baik nasional maupun transnasional meraup keuntungan utama. Fenomena ini menjadi indikator jelas bahwa “pembangunan di Bali” lebih dominan ketimbang “pembangunan Bali”.

Salah satu tanda paling jelas adalah menyusutnya lahan hijau dan area pertanian produktif. Pergeseran fungsi lahan dari agraris ke pariwisata memperlihatkan bagaimana tata kelola sumber daya alam di Bali tidak lagi berpijak pada prinsip keberlanjutan dan kontrol ketat. Hilangnya ruang produktif khususnya sawah berarti tergesernya basis agraris yang justru menjadi pondasi kebudayaan Bali. Padahal, sistem agraris tradisional Bali, dengan filosofi subak sebagai basisnya, telah teruji selama berabad-abad sebagai mekanisme sosial, ekonomi, dan spiritual. Akan tetapi, realitas pembangunan saat ini justru menghasilkan distorsi: nilai ekonomi akumulatif dari pariwisata lebih diutamakan dibanding potensi kearifan lokal pertanian yang menjadi identitas kultural.

Kelemahan regulasi dan lemahnya penerapan prinsip pemerataan pembangunan semakin menegaskan pola pembangunan yang timpang. Fenomena ketidakterkendalian pembangunan akomodasi pariwisata, terutama di Bali Selatan, sudah lama menjadi bukti konkret. Pembangunan hotel, vila, dan restoran membanjiri Kuta, Seminyak, Legian, Nusa Dua, dan kawasan Badung sekitarnya, sementara Bali Utara relatif tertinggal, tidak mendapat distribusi pembangunan yang memadai. Kesenjangan spasial ini berimplikasi pada ketimpangan kesejahteraan masyarakat, sekaligus menggerus solidaritas pembangunan antarwilayah. Bali Utara yang memiliki potensi laut, budaya, dan sumber daya ekologis justru kehilangan

kesempatan untuk berkembang karena seluruh energi pembangunan diserap pariwisata massal Bali Selatan [2].

Secara teoritik, kondisi ini dapat dianalisis dengan konsep *capacity management*, yakni pengelolaan kapasitas daya dukung lingkungan, sosial, maupun ekonomi agar tidak melampaui batas. Namun dalam praktiknya, konsep teknokratis ini belum menjadi acuan dalam tata kelola pembangunan pariwisata Bali. Pengelolaan destinasi masih cenderung mengejar kuantitas wisatawan, tanpa integrasi penuh dengan kapasitas daya dukung lingkungan, sosial, dan budaya. Akibatnya, siklus hidup pariwisata (*tourism life cycle*) berpotensi menurun lebih cepat karena kawasan yang *over exploited* berpeluang mengalami degradasi daya tarik dan krisis keberlanjutan. Dalam konteks ini, kapasitas manajemen semestinya tidak hanya dipahami sebagai instrumen teknis, tetapi sebagai upaya filosofis untuk memperpanjang keseimbangan antara konservasi, preservasi, dan komodifikasi ekonomi [3] [4].

Gagasan pariwisata berkelanjutan mestinya didudukkan sebagai filsafat pembangunan Bali, bukan sekadar jargon normatif. Konsep keberlanjutan akan kosong makna bila keberadaannya hanya terbatas pada dokumen kebijakan atau retorika pidato pejabat. Pertanyaan kritis yang harus diajukan adalah: apakah saat ini manajemen kapasitas sudah benar-benar dilaksanakan dalam praktik di lapangan? Bagaimana pula posisi masyarakat Bali sebagai subjek dalam merumuskan visi pembangunan mereka sendiri? Jawaban jujur kemungkinan besar akan menunjukkan bahwa masyarakat Bali lebih sering dijadikan objek pembangunan ketimbang pemilik visinya. Partisipasi masyarakat adat dalam perumusan kebijakan pembangunan relatif terbatas. Representasi politik formal terbatas pada parlemen yang didominasi elite politik nasional, sehingga aspirasi komunitas kultural cenderung reduktif.

Ketergantungan terhadap pariwisata sebagai lokomotif pembangunan telah menciptakan distorsi struktural. Sektor pertanian sebagai basis tradisi budaya Bali semakin terpinggirkan. Generasi muda Bali lebih memilih masuk dalam orbit industri jasa pariwisata yang menjanjikan pendapatan cepat, dibanding menjadi petani yang dianggap kurang layak secara ekonomi. Paradoks jelas terlihat: slogan “Bali Aje”

yang seharusnya memperkuat identitas budaya Bali justru bertentangan dengan logika pembangunan yang memberi dominasi absolut pada industri pariwisata. Pola pikir pembangunan yang sektoral dan monodimensi semacam ini berisiko tinggi merusak keberlanjutan ekonomi, mengikis budaya agraris, sekaligus mempercepat degradasi lingkungan.

Tidak berhenti sampai di situ, kapitalisme global yang menembus sektor pariwisata Bali memunculkan krisis idealisme pembangunan. Seni yang pada mulanya lahir dari spiritualitas, ritual, dan kreativitas kini tereduksi menjadi komoditas turistik. Tari-tarian sakral lebih sering dipentaskan sebagai paket hiburan, bukan lagi menjadi ekspresi asli spiritualitas masyarakat Bali. Para pengrajin, pematung, pelukis, bahkan musisi Bali kehilangan posisi sebagai seniman yang berdaulat terhadap karyanya, direduksi menjadi “buruh seni” yang memproduksi komoditas sesuai kebutuhan pasar. Di hotel-hotel internasional, pekerja Bali harus puas dengan standar upah lokal, sementara investor asing menikmati laba devisa dalam skala besar. Ketimpangan distribusi manfaat ekonomi semakin memperjelas gejala bahwa pembangunan Bali cenderung dikendalikan kapital transnasional, bukan nilai-nilai lokal.

Situasi ini menghadirkan pertanyaan kritis: apakah pembangunan Bali hari ini masih mencerminkan aspirasi masyarakat Bali, ataukah pulau ini hanya dijadikan panggung untuk akumulasi modal global? Ketika sawah-sawah subur tergerus vila, ketika pura dan ritual sakral direduksi menjadi tontonan tanpa makna, maka jelas bahwa pembangunan yang terjadi adalah “pembangunan di Bali”, bukan “pembangunan Bali”. Dalam kondisi seperti ini, Bali berjalan di atas rel yang ditentukan pasar dan kapitalisme global, bukan di atas rel idealisme kulturalnya sendiri.

Akhirnya, dikotomi pembangunan Bali versus pembangunan di Bali bukanlah perdebatan linguistik, melainkan soal identitas, keadilan, dan keberlanjutan. Bali saat ini menghadapi krisis idealisme pembangunan karena orientasi ekonomi pariwisata massal terlalu dominan dan memberi ruang besar bagi kapital global untuk menentukan arah. Untuk mengembalikan pembangunan Bali ke relnya, perlu ada konsensus kolektif yang menekankan tiga hal: pertama, penguatan posisi masyarakat Bali sebagai subjek pembangunan dengan memperluas partisipasi komunitas

adat dalam merumuskan kebijakan; kedua, implementasi serius konsep *capacity management* untuk menjaga daya dukung lingkungan, sosial, dan budaya; serta ketiga, diversifikasi sektor ekonomi dengan menghidupkan kembali pertanian, kerajinan, dan UMKM berbasis budaya agar Bali tidak semata bertumpu pada industri jasa. Dengan langkah-langkah itu, Bali dapat kembali mengarahkan pembangunan bukan hanya “di Bali”, tetapi benar-benar “untuk Bali” dan “oleh Bali” [5].

KEPEMIMPINAN LOKAL DI BALI: ANTARA JABATAN DAN PENGABDIAN



Kepemimpinan lokal di Bali selalu menjadi sorotan penting, bukan saja karena perannya sebagai lokomotif pembangunan daerah, tetapi juga karena kepemimpinan Bali sering dijadikan cermin bagaimana nilai budaya, spiritual, dan politik bertemu dalam praktik modern. Fenomena kepemimpinan dapat dipotret melalui dikotomi fundamental antara pejabat terpilih dan pemimpin sejati. Perbedaan ini bukan sesuatu yang remeh, melainkan refleksi atas kualitas tata kelola pembangunan yang ditentukan oleh niat dan integritas. Seorang pejabat pada umumnya terjebak dalam simbol kebanggaan: jabatan, kekuasaan, dan atribut protokoler. Orientasinya sering kali cenderung represif terhadap kritik dan defensif

terhadap suara rakyat. Sebaliknya, seorang pemimpin sejati, dalam pengertian substantif, adalah sosok yang menempatkan dirinya pada garis depan penderitaan rakyat, merasakannya secara nyata, sekaligus berusaha menghadirkan solusi kolektif yang transformatif. Pemimpin sejati memahami bahwa kekuasaan bukan tujuan, melainkan amanah yang harus dijalani dengan kerendahan hati dan orientasi pengabdian [6].

Sayangnya, fakta di lapangan memperlihatkan bahwa intensitas gerakan politik calon pemimpin lebih menonjol menjelang kontestasi Pilkada. Saat itu baliho, alat peraga kampanye, dan strategi politik uang menyeruak di ruang publik. Hal ini menegaskan kuatnya budaya politik transaksional dan kecenderungan kepemimpinan pragmatis. Alih-alih membangun basis ketulusan jangka panjang, proses kandidasi politik justru dipenuhi ambisi kekuasaan. Tidak jarang, untuk mendapatkan simpati, elit politik menggunakan adat dan struktur sosial tradisional sebagai modalitas mobilisasi massa. Dengan jaringan banjar dan desa adat, politik praktis didorong, tetapi substansi kesejahteraan seringkali tertinggal. Praktik manipulatif seperti pemasangan alat peraga kampanye (APK) yang melanggar aturan hingga politik uang dalam pemilihan yang berbasis solidaritas adat menampilkan defisit etika politik lokal. Pertanyaan kritis lalu muncul: bagaimana mungkin publik berharap lahir pemimpin berintegritas, jika sejak proses rekrutmen kepemimpinan sudah tercemar oleh praktik manipulatif?

Kecenderungan pejabat untuk bermental “makelar” atau broker juga menjadi masalah klasik. Fenomena ini menandakan pendekatan teknokratis yang reduksionis, yang hanya menghitung keuntungan matematis tanpa menyentuh akar persoalan masyarakat. Mereka menempatkan posisi sebagai manajer administratif, bukan pengemban visi solutif. Pejabat dengan mental semacam ini cenderung mengelola wilayah layaknya perusahaan, memanipulasi regulasi untuk akumulasi proyek, alih-alih menjadikan kekuasaan sebagai sarana pelayanan. Padahal, kondisi Bali hari ini jauh dari sederhana. Masalah kemiskinan tidak bisa dilihat semata-mata dari aspek statistik ekonomi, melainkan harus dipahami sebagai persoalan multidimensional: rendahnya akses kerja layak, fluktuasi harga hasil pertanian, upah buruh yang tidak mencukupi kebutuhan hidup

layak, serta kualitas pendidikan yang timpang. Persoalan kesehatan publik tidak selesai hanya dengan membangun rumah sakit atau puskesmas, tetapi juga terkait buruknya sanitasi lingkungan, tekanan pariwisata massal yang melebihi daya dukung, dan kerentanan masyarakat terhadap penyakit global akibat interaksi dengan wisatawan internasional. Kompleksitas ini tidak akan terbaca oleh pejabat yang berpikir teknis belaka. Dibutuhkan pemimpin yang reflektif dan solutif, yang melihat pembangunan secara holistik, tidak hanya sekadar pembangunan infrastruktur kasat mata.

Agenda kepemimpinan pasca Pilkada juga sering kali berhenti pada euforia kemenangan. Pemimpin daerah lebih sibuk merayakan keunggulan politik ketimbang segera merumuskan tata kelola yang konsisten. Hal ini menghadirkan defisit akuntabilitas dalam pelayanan publik. Masalah lambannya pelayanan kesehatan di puskesmas, ketidaksesuaian upah buruh dengan kebutuhan minimum, hingga kompleksitas birokrasi perpajakan yang kontradiktif dengan slogan “pelayanan prima” adalah bukti nyata lemahnya akuntabilitas pasca-Pilkada. Padahal, tugas kepemimpinan bukan berhenti di legitimasi pemilu, melainkan diteruskan dalam wujud regulasi dan kebijakan yang berkesinambungan. Tanpa regulasi yang konsisten, pembangunan Bali kerap terjebak pada siklus lima tahunan, di mana visi kepemimpinan berhenti bersama masa jabatan.

Dalam konteks Bali, ada tiga agenda besar yang seharusnya menjadi fokus kepemimpinan setelah Pilkada, karena ketiganya berkaitan langsung dengan efektivitas pembangunan dan kualitas masyarakat sebagai destinasi global: ketahanan pangan, kesehatan publik, dan pendidikan. Pertama, ketahanan pangan merupakan syarat kemandirian ekonomi Bali. Tanpa inovasi pertanian yang menjaga keberlangsungan subak, Bali akan semakin tergantung pada impor pangan, sementara lahannya terus dikonversi untuk pariwisata dan properti. Kedua, kesehatan publik tidak dapat disepelekan, karena Bali berinteraksi langsung dengan wisatawan global yang membawa standar kebersihan dan kesehatan yang tinggi. Lingkungan yang bersih dan sehat tidak hanya menguntungkan wisatawan, tetapi juga masyarakat lokal yang menjadi pelayan di sektor pariwisata. Ketiga, pendidikan sebagai instrumen mengubah nasib generasi berikutnya. Meski banyak sekolah sudah berdiri, distribusi kualitas guru

yang timpang, akses terbatas bagi kelompok miskin, serta problem integritas dalam evaluasi pendidikan masih menjadi hambatan besar. Ketiga sektor ini memerlukan kepemimpinan visioner yang mampu mengintegrasikan skala lokal dengan standar global.

Krisis kepemimpinan di Bali juga tidak bisa dilepaskan dari persoalan budaya politik bangsa. Sebagaimana dikemukakan oleh S. Lubis (1977), etos kerja bangsa Indonesia cenderung feodal, pragmatis, suka mencari kambing hitam, dan bermental kompromistis, meskipun memiliki kelebihan pada sisi artistik dan kedekatan dengan alam. Watak ini tercermin pula dalam kepemimpinan daerah, termasuk Bali. Masih banyak pejabat yang lebih menekankan seremoni adat sebagai panggung politik daripada substansi pengabdian. Karakter feodalisme dalam kepemimpinan lokal melahirkan jarak antara pemimpin dan rakyat, menempatkan pemimpin di atas, dan rakyat semata sebagai pengikut. Padahal, dalam tradisi filosofis Bali sesungguhnya terdapat warisan kepemimpinan holistik: pemimpin yang bukan saja menjadi pengayom, tetapi juga teladan moral [7].

Jadi, yang dibutuhkan Bali sesungguhnya adalah kepemimpinan dengan karakter dan etos baru. Kepemimpinan motivator yang mampu bertindak bukan sekadar sebagai pengatur, tetapi juga sebagai inspirasi perubahan nilai. Generasi baru pemimpin Bali harus menanamkan etos kejujuran, kesederhanaan, disiplin, sportivitas, serta rasa malu dalam arti positif yakni tidak tega mempermalukan diri sendiri maupun masyarakat dengan kebijakan koruptif. Lebih utama lagi, kepemimpinan harus menempatkan kekuasaan sebagai amanah spiritual, bukan komoditas transaksi. Dalam skema ini, pemimpin tidak lagi sekadar jabatan politik, melainkan pemangku moralitas publik yang mengarahkan tata kelola Bali agar bersandar pada kesejahteraan kolektif masyarakatnya, bukan pada kepentingan kapital maupun elit politik.

Akhirnya, dikotomi antara pejabat dan pemimpin sejati di Bali menjadi refleksi tajam tentang arah pembangunan pulau ini. Jika Bali terus dipimpin oleh pejabat yang sekadar berorientasi pada jabatan, maka Bali akan semakin terjebak dalam pusaran politik transaksional, krisis etika, dan distorsi ekonomi yang manfaatnya lebih banyak dinikmati investor

eksternal. Akan tetapi, jika pemimpin Bali mampu keluar dari mentalitas feodal-pragmatis menuju kepemimpinan yang visioner, solutif, dan inspiratif, maka Bali berpeluang menghadirkan pembangunan yang holistik: menjaga ketahanan pangan, menjaga kesehatan publik, dan menyemai pendidikan masa depan. Lebih jauh lagi, kepemimpinan sejati akan meneguhkan posisi Bali bukan hanya sebagai destinasi wisata, tetapi sebagai pusat harmoni spiritual, sosial, dan ekologis yang memberi teladan bagi dunia [8].

CITRA POSITIF DAN PARADOKS TATA KELOLA PARIWISATA BALI



Selama beberapa dekade terakhir, Bali telah menjadi lokomotif utama pembangunan daerah dan wajah pariwisata Indonesia di mata dunia. Pulau kecil ini kerap dijadikan ikon keberhasilan dalam menggaet wisatawan internasional. Citra positif Bali dibangun melalui keindahan alam tropis yang memikat, kekayaan budaya yang unik, keramahan masyarakat lokal, serta aura spiritual yang khas. Keempat elemen ini menjadi pilar utama yang menciptakan kesan mendalam bagi wisatawan, terutama kelompok *repeater* atau wisatawan setia yang berulang kali kembali berkunjung. Bagi dunia, Bali lebih dari sekadar destinasi; ia adalah citra pengalaman hidup yang menggabungkan keindahan alam, spiritualitas, dan kehangatan sosial.

Akan tetapi, di balik citra positif itu, paradoks krisis tata kelola terus membayangi. Polusi, masalah sampah, kemacetan, degradasi budaya, serta disharmoni tata kelola antara pemerintah provinsi dan kabupaten menimbulkan kerentanan yang serius. Citra yang semula menjadi aset kini berpotensi menjadi liabilitas bila tidak diimbangi dengan strategi pengelolaan jangka panjang berbasis keberlanjutan [9].

Citra Bali sebagai destinasi pariwisata dunia bertumpu pada empat pilar utama. Pertama, keunikan budaya Bali tidak hanya hadir dalam bentuk ritual keagamaan Hindu, melainkan juga dalam kesenian tradisional, arsitektur khas, serta filosofi hidup Tri Hita Karana yang menekankan harmoni manusia dengan Tuhan, alam, dan sesama. Kedua, keramah-tamahan penduduk Bali telah lama menjadi *brand value* yang memberi daya tarik emosional kuat bagi wisatawan. Ketiga, infrastruktur pariwisata Bali relatif lengkap dibandingkan destinasi Asia Tenggara lainnya. Bali memiliki jaringan hotel, restoran, transportasi, hingga fasilitas hiburan modern yang siap melayani pasar wisata global. Keempat, suasana kenyamanan berlibur yang ditawarkan Bali menghadirkan pengalaman tenang, spiritual, dan berkesan, yang kerap membuat wisatawan merasa “pulang” ketika berkunjung ke Bali. Akan tetapi, di tengah dominasi citra positif ini, masalah besar justru muncul: *image performance gap*, yaitu kesenjangan antara citra yang dijanjikan dalam pemasaran dengan kondisi riil di lapangan. Wisatawan menemukan masalah klasik yang seolah tidak pernah selesai sampah yang menumpuk, kemacetan yang menguras waktu, dan birokrasi pelayanan publik yang lamban [10].

Isu lingkungan menjadi tantangan paling serius. Ekspektasi wisatawan mancanegara terhadap Bali sebagai destinasi hijau dan spiritual sering berbenturan dengan realitas polusi udara, pencemaran air, dan kerusakan ekosistem laut akibat pembangunan pesisir yang tak terkendali. Pencemaran sungai yang bermuara ke laut mengancam terumbu karang dan habitat laut. Limbah hotel serta penggunaan plastik sekali pakai memperparah beban ekologis. Problem ini menodai citra Bali yang berusaha dipasarkan sebagai *eco-friendly destination*. Selain lingkungan, degradasi budaya juga menjadi sorotan. Arsitektur akomodasi modern dengan gaya seragam global mulai mengalahkan keaslian bangunan

berornamen Bali. Identitas lokal yang dulu menjadi pembeda strategis dikhawatirkan tereduksi menjadi latar visual homogen yang kehilangan jiwa.

Kemacetan lalu lintas dan masalah sampah hampir selalu menjadi keluhan utama wisatawan. Kotornya jalan, pantai, dan areal publik akibat sampah plastik menggeser persepsi kenyamanan. Kemacetan di kawasan Kuta, Canggu, maupun Ubud, membuat perjalanan singkat menjadi melelahkan. Belum lagi birokrasi imigrasi yang bertele-tele, pungutan liar, serta praktik ketidaktransparanan yang menodai pengalaman wisatawan. Semua ini melemahkan indikator *quality of experience*, yang justru menjadi kunci dalam mempertahankan *repeater*. Singkat kata, yang dipasarkan sebagai “*paradise island*” tidak selalu ditemukan utuh dalam realitas lapangan.

Disharmoni tata kelola antara provinsi dan kabupaten memperparah paradoks ini. Bali adalah pulau kecil namun tata kelolanya terbagi ke dalam beberapa kabupaten dengan orientasi pembangunan yang sering kontradiktif. Provinsi misalnya mengeluarkan moratorium pembangunan hotel baru untuk menjaga keseimbangan pembangunan dan mengurangi *oversupply* kamar. Tetapi kabupaten tertentu justru gencar membuka investasi hotel baru demi meningkatkan pendapatan daerah. Perbedaan arah kebijakan ini menciptakan benturan antara orientasi konservasi dan eksploitasi, sehingga tidak ada regulasi kolektif yang mengikat. Alhasil, pembangunan akomodasi tak terkendali di Bali Selatan, sementara Bali Utara dan Barat terbengkalai. Ruang spasial Bali semakin timpang, memperlebar jurang sosial ekonomi masyarakat antarwilayah.

Kontradiksi ini semakin mencolok dalam relasi antara pariwisata dan pertanian. Secara normatif, meningkatnya kebutuhan hotel dan restoran seharusnya memberi backward linkage positif pada sektor pertanian lokal. Namun kenyataan berbeda. Banyak kebutuhan logistik pariwisata, dari sayuran hingga daging, justru dipasok dari luar Bali. Artinya, devisa pariwisata tidak otomatis berkontribusi pada ketahanan pangan Bali. Sebaliknya, lahan pertanian produktif semakin menyusut karena tergoda dijual untuk pembangunan vila dan hotel. Generasi muda pun enggan turun ke sawah karena lebih memilih bekerja di sektor jasa modern.

Paradoksnya, Bali menjual keindahan lanskap sawah dan subak kepada wisatawan, sementara praktik pertanian sebagai basis budaya justru terpinggirkan.

Distribusi akomodasi yang timpang antara koridor selatan dan utara Bali juga menunjukkan distorsi pembangunan. Kabupaten Badung, Denpasar, dan Gianyar menjadi episentrum pariwisata kelas premium dengan hotel berbintang, sementara Jembrana, Karangasem, dan Bangli relatif tertinggal dalam jaringan pariwisata global. Indikator keberhasilan pariwisata justru semu bila hanya dihitung dari jumlah hotel berbintang. Pertanyaan kritisnya: apakah keberadaan hotel mewah benar-benar meningkatkan kualitas hidup masyarakat lokal di sekitarnya? Apakah masyarakat banjar memperoleh manfaat setara dari aktivitas pariwisata di kawasannya? Data empiris menunjukkan kesenjangan. Warga lokal sering hanya menjadi tenaga kerja entry-level, sementara profit strategis lari ke investor nasional dan asing. Ketimpangan distribusi ekonomi memperlihatkan bahwa *quality of profit* tidak berimbang antara modal besar dan masyarakat adat.

Dalam menghadapi paradoks ini, strategi global yang relevan adalah *green tourism* atau pariwisata hijau. Konsep ini menekankan pariwisata rendah karbon, ramah lingkungan, serta berpihak pada pemberdayaan komunitas. Untuk Bali, pendekatan ini bisa menjadi jalan tengah menjaga citra internasional sambil memperbaiki performa destinasi. Pengembangan pariwisata berbasis komunitas bisa memperkuat hubungan wisatawan dengan masyarakat lokal, menjaga keaslian budaya, dan memastikan distribusi keuntungan ekonomi lebih merata. Penerapan zonasi pembangunan destinasi memungkinkan diferensiasi antara kawasan massal dan kawasan *niche market*, sehingga tidak semua wilayah mengalami tekanan pariwisata berlebih. Diversifikasi produk—ekowisata, agrowisata, yoga dan spiritual *retreat*—dapat memperluas segmentasi pasar sekaligus mengurangi ketergantungan pada wisata massal pantai.

Tiga indikator pariwisata sehat sepatutnya menjadi fondasi: *quality of life* masyarakat lokal, *quality of experience* wisatawan, dan *quality of profit* pelaku usaha. Hingga kini, ketiga indikator tersebut belum berjalan seimbang. Masyarakat lokal masih sering kehilangan lahan produktif,

wisatawan masih mengeluhkan masalah klasik, dan profit inheren masih timpang. Implementasi *green tourism* harus dibingkai dengan kebijakan tata kelola trans-kabupaten yang dipayungi otoritas provinsi agar pengaturan ruang Bali bisa konsisten. Kebijakan arsitektur Bali yang mengikat juga perlu ditegakkan agar penetrasi model bangunan global tidak melenyapkan identitas visual Bali.

Bali tidak boleh dipahami sebatas destinasi wisata bagi dunia. Ia adalah ruang hidup masyarakatnya sendiri. Jika Bali terus dibangun hanya untuk memenuhi ekspektasi pasar global, maka citra positifnya akan segera runtuh di mata wisatawan yang semakin kritis terhadap isu sosial dan lingkungan. Branding internasional tanpa kualitas hidup masyarakat hanyalah fatamorgana. Yang diperlukan Bali bukan branding baru, melainkan praktik nyata tata kelola destinasi secara berkelanjutan. Dengan mengintegrasikan pariwisata dan pertanian, memaksimalkan *green tourism*, serta memperkuat tiga indikator utama, Bali dapat mempertahankan citra globalnya tanpa mengorbankan identitas lokal.

Akhirnya, paradoks Bali hari ini adalah ketidakseimbangan antara citra ideal sebagai destinasi dunia dengan realitas tata kelola yang rapuh. Citra Bali masih dihargai wisatawan mancanegara, tetapi keluhan terhadap sampah, macet, degradasi budaya, dan lemahnya koordinasi pemerintah menjadi alarm bahwa daya saing global Bali akan terkikis bila tidak ada koreksi serius. Bali membutuhkan tata kelola lintas wilayah yang terintegrasi, zonasi pembangunan yang konsisten, revitalisasi pertanian sebagai identitas budaya, dan fokus pada *green tourism* untuk menjawab tantangan global. Hanya dengan itu Bali bisa tetap menjadi destinasi unggulan yang tidak sekadar menjual keindahan alam dan budaya, tetapi benar-benar menjaga martabat masyarakatnya sebagai tuan rumah dari surga dunia [11].

BALI, BENCANA PEMBANGUNAN, DAN JALAN PULANG KE TRI HITA KARANA



Bali sejak lama dijadikan ikon pariwisata dunia, dikenal bukan hanya karena panorama tropisnya yang memesona, tetapi juga karena kekayaan budayanya yang unik dan filosofi hidup masyarakatnya yang berakar pada Tri Hita Karana. Filosofi ini menekankan keseimbangan antara Parahyangan (hubungan manusia dengan Tuhan), Pawongan (hubungan antar manusia), dan Palemahan (hubungan manusia dengan alam). Nilai ini sejajar dengan paradigma pembangunan berkelanjutan modern yang dirumuskan dalam konsep *people, profit, planet*. Akan tetapi, dalam praktik pembangunan kontemporer, harmoni yang diwariskan oleh filosofi Bali justru semakin menyempit. Bali menghadapi fenomena yang dapat disebut “bencana

pembangunan” bencana yang lahir bukan dari alam, melainkan dari orientasi pembangunan yang bias, pragmatis, dan eksploitatif. Bencana ini tampak pada tiga aspek utama: krisis transportasi berupa kemacetan dan polusi, krisis ekologis berupa sampah dan kerusakan lingkungan, serta krisis sosial budaya yang telah menggerus keaslian tatanan hidup masyarakat Bali [12] [13].

Fenomena “bencana kemacetan dan polusi” adalah wajah nyata paradoks Bali kontemporer. Layaknya kota-kota besar dunia, kepadatan kendaraan bermotor jauh melampaui daya dukung jalan. Jalan-jalan utama Bali kini penuh sesak oleh kendaraan pribadi, baik milik warga maupun wisatawan. Akibatnya, polusi udara meningkat, kualitas lingkungan menurun, dan kenyamanan wisatawan tereduksi. Keluhan wisatawan tentang macet di Kuta, Seminyak, ataupun Ubud telah menjadi isu klasik yang sulit diselesaikan. Para ahli transportasi berkali-kali merekomendasikan solusi: pengembangan angkutan umum massal yang layak, regulasi kendaraan wisata, hingga penerapan manajemen lalu lintas berbasis teknologi. Akan tetapi, rekomendasi itu berhenti pada dokumen rencana tanpa komitmen implementasi. Di titik ini terlihat problem struktural kepemimpinan Bali: pembangunan yang lebih ditentukan oleh preferensi politik jangka pendek ketimbang perencanaan jangka panjang demi kepentingan masyarakat luas. Jika ditautkan dengan Tri Hita Karana, kemacetan dan polusi jelas merusak prinsip Palemahan, mengganggu keharmonisan manusia dengan alam, menciptakan stres bagi masyarakat, dan mengancam profitabilitas industri pariwisata itu sendiri.

Bencana kedua ialah krisis sampah dan kerusakan lingkungan. Bali selama bertahun-tahun menghadapi persoalan manajemen sampah yang kronis. Pariwisata massal mendatangkan lebih banyak limbah plastik, padat, maupun cair. Regulasi sudah berulang kali dikeluarkan, mulai dari Perda, Pergub, hingga pelarangan plastik sekali pakai. Tapi tanpa kelembagaan yang kuat dan partisipasi masyarakat, kebijakan itu hanya menjadi macan kertas. TPA menumpuk, pantai tercemar, sungai menjadi saluran limbah, sementara kampanye ramah lingkungan tetap sebatas slogan. Di beberapa wilayah, konversi lahan hijau menjadi akomodasi wisata terjadi masif, menggerus ruang hidup agraris Bali. Sistem pertanian

produktif yang menjadi fondasi identitas budaya Bali semakin terpinggirkan. Alih fungsi lahan subak menjadi vila atau hotel mengorbankan keseimbangan ekologis sekaligus nilai budaya. Padahal, konservasi seharusnya tak sebatas “dikanunkan”, tetapi diinternalisasikan sebagai budaya masyarakat, selaras dengan Palemahan dalam falsafah Tri Hita Karana. Konteks pembangunan Bali mestinya mengemban tugas ganda: memelihara lingkungan sekaligus memberdayakan masyarakat lokal, bukan justru menyingkirkan mereka.

Bencana ketiga yang paling subtil tetapi juga paling berbahaya adalah kerusakan tatanan sosial budaya. Fenomena jual beli lahan subur untuk keperluan wisata atau kebutuhan konsumtif menunjukkan adanya krisis nilai. Masyarakat Bali banyak yang menjual tanah sebagai jalan pintas memenuhi keperluan sesaat, sementara tanah itu kemudian dikelola investor luar untuk proyek jangka panjang yang mengakumulasi keuntungan besar. Modernisasi yang tak terkendali lewat pariwisata turut memengaruhi orientasi generasi muda Bali. Nilai budaya agraris memudar, digantikan budaya konsumtif yang erat dengan gaya hidup industri turistik. Keikutsertaan generasi muda dalam kriminalitas, peningkatan marginalisasi, serta melemahnya otoritas komunitas adat menunjukkan bencana sosial budaya yang serius. Aspek Pawongan terganggu, karena solidaritas sosial dan spiritual masyarakat semakin rentan. Bahkan aspek Parahyangan pun terciderai ketika nilai-nilai adat dan ritual sakral direduksi hanya menjadi tontonan turis untuk meraup devisa. Simbol kultural Bali semakin diarahkan untuk konsumsi turistik ketimbang refleksi spiritual.

Dalam perspektif Tri Hita Karana, tiga bencana di atas berarti degradasi keseimbangan antara manusia dengan alam, manusia dengan sesamanya, dan manusia dengan Tuhan. Jika pembangunan Bali terus melaju di jalan eksploitatif, maka filosofi hidup yang seharusnya menjadi *soul* dari pulau ini akan terkikis, digantikan oleh logika kapital pragmatis. Tantangan inilah yang menuntut refleksi ulang. Bali seharusnya tidak terjebak semata dalam kerangka pembangunan di Bali yakni pembangunan yang datang dari luar, diatur oleh investor, dan didorong oleh logika pasar global tetapi justru menegakkan pembangunan Bali, yaitu pembangunan

yang endogen, berorientasi pada filosofi lokal, dan berpihak pada masyarakat Bali.

Untuk mengatasi bencana tersebut, prinsip pembangunan Bali berbasis Tri Hita Karana wajib dijadikan kerangka implementasi kebijakan publik. Falsafah ini perlu dikonkretkan dalam prinsip keadilan, efektivitas, efisiensi, kredibilitas, dan integrasi. Prinsip keadilan berarti hasil pembangunan pariwisata mesti dinikmati semua lapisan masyarakat, bukan hanya segelintir elit atau investor asing. Prinsip efektivitas menuntut pembangunan untuk menekan dampak negatif lingkungan dan sosial sambil memperbesar manfaat ekonomi dan budaya. Prinsip efisiensi menekankan perhatian kepada masyarakat miskin, agar kesenjangan kesejahteraan dapat dipersempit. Prinsip kredibilitas memastikan pembangunan sah secara hukum dan legitimitas sosial, bukan produk lobi investor. Prinsip integrasi memastikan pembangunan tidak hanya bertumpu pada sektor pariwisata, tetapi juga diselaraskan dengan pertanian, perikanan, pendidikan, dan sektor produktif lain.

Diversifikasi ekonomi, terutama revitalisasi sektor pertanian, menjadi kunci untuk mengurangi ketergantungan Bali pada pariwisata. Tragedi bom Bali 2002 dan krisis pandemi 2020 memberikan bukti nyata rapuhnya ekonomi Bali yang nyaris kolaps ketika pariwisata terhenti. Ketergantungan struktural ini menempatkan Bali dalam posisi rentan. Pertanian, yang secara historis melekat pada budaya Bali, harus kembali diprioritaskan. Indikator Nilai Tukar Petani (NTP) seharusnya jadi barometer keberhasilan pembangunan, bukan hanya persentase kontribusi PDRB dari pariwisata. Pengakuan UNESCO terhadap Subak sebagai warisan dunia mestinya dijadikan basis integrasi pertanian dan pariwisata. Melalui agrowisata berbasis subak, Bali dapat mengembangkan model pembangunan yang menjaga identitas kultural, sekaligus menciptakan nilai ekonomi baru.

Akan tetapi, revitalisasi pertanian menghadapi tantangan besar, terutama ketertarikan generasi muda. Budaya konsumtif dan gaya hidup turistik membuat pertanian dianggap pekerjaan kurang prestisius. Sementara pasar domestikibanjiri produk impor dari Vietnam, Tiongkok, hingga Amerika, yang ironisnya lebih digemari wisatawan dan warga lokal

sendiri. Karena itu, kebijakan konkret diperlukan: memberi insentif, memberdayakan desa wisata, menjamin hotel dan restoran menggunakan produk pangan lokal, serta mengintegrasikan pertanian dengan rantai nilai pariwisata. Proteksi dari serbuan impor diperlukan agar petani Bali tetap berdaya.

Jadi, solusi atas bencana pembangunan Bali membutuhkan dua arah strategi: membatasi pembangunan pariwisata masif, sekaligus meningkatkan kualitas destinasi dan memberdayakan sektor alternatif. Bali harus bergerak ke arah *quality tourism*, bukan *mass tourism*. Hotel dan destinasi harus disertifikasi ramah lingkungan, wisatawan harus disaring agar yang masuk adalah *market* yang menghormati budaya dan siap membayar lebih untuk keberlanjutan. Desa wisata, agrowisata, hingga pariwisata spiritual berbasis Tri Hita Karana dapat menjadi diferensiasi Bali agar tidak terjebak homogenitas kompetisi destinasi global.

Jika pembangunan Bali terus berpijak pada logika pariwisata kapitalistik tanpa koreksi struktural, maka tiga bencana—kemacetan dan polusi, krisis sampah dan lingkungan, serta kerusakan sosial budaya—akan makin mengikis daya tarik Bali sebagai destinasi dunia. Bali bisa jadi indah dalam citra foto brosur, tetapi rapuh dalam kenyataan. Sebaliknya, jika Bali berani kembali ke akar filosofinya, menjadikan Tri Hita Karana bukan hanya jargon, tetapi kerangka implementasi yang adil, efisien, kredibel, dan integratif, maka harmoni sejati dapat dipulihkan. Diversifikasi ekonomi melalui revitalisasi pertanian, penguatan desa adat, dan pengembangan UMKM berbasis kearifan lokal adalah jalan menuju keberlanjutan.

Dengan cara itu, Bali dapat melepaskan diri dari jebakan pembangunan instan dan menegaskan dirinya bukan sekadar destinasi wisata global, melainkan rumah bersama bagi masyarakatnya yang berdaulat atas tanah, budaya, dan masa depannya. Mengutip filosofi Bali, membangun Bali sejatinya adalah menjaga keseimbangan: bukan eksploitasi satu sektor, tetapi harmoni antara Parahyangan, Pawongan, dan Palemahan. Maka, pembangunan Bali harus berarti pembangunan oleh dan untuk Bali bukan hanya pembangunan di Bali yang eksploitatif dan rapuh [14].

PELANGGARAN TATA RUANG DI INDONESIA: ANTARA KOMPROMI, EKSPLOITASI, DAN KRISIS WARISAN



Pelanggaran tata ruang di Indonesia merupakan persoalan yang jauh melampaui sekadar masalah administratif. Ia adalah problem struktural yang mencerminkan ketegangan fundamental antara kepentingan ekonomi, keberlangsungan ekologi, dan eksistensi sosial budaya masyarakat lokal. Di atas kertas, Indonesia memiliki regulasi tata ruang yang jelas, mulai dari undang-undang hingga Perda yang mengatur peruntukan lahan, zonasi, serta perlindungan kawasan strategis. Akan tetapi, dalam kenyataan, regulasi itu lebih sering menjadi perangkat normatif yang mandul, karena

pemerintah cenderung permisif terhadap pelanggaran ketika bertemu kepentingan modal besar atau biasa terjebak kompromi politik jangka pendek. Fakta bahwa pembangunan ilegal kerap dibiarkan menumpuk hingga kemudian memerlukan penertiban besar-besaran adalah indikasi bahwa problem bukan berasal dari kurangnya aturan, melainkan lemahnya pengawasan sejak awal, keberanian penegakan hukum yang setengah hati, serta pertimbangan politik yang membuat aparat enggan bertindak tegas [15].

Dalam konteks Bali, dilema tata ruang tampak begitu mencolok. Sebagai pulau kecil dengan daya tarik global, Bali menjadi magnet bagi pembangunan vila, resort, hingga fasilitas pariwisata berskala internasional. Banyak dari fasilitas tersebut lahir di area terlarang, termasuk sempadan pantai, tebing, bahkan zona hijau pertanian yang semestinya dilindungi. Sayangnya, penertiban baru dilakukan ketika tekanan publik meningkat atau kerusakan lingkungan sudah tidak dapat lagi ditoleransi. Fenomena ini memperlihatkan bahwa tata ruang di Indonesia lebih sering dipraktikkan sebagai arena kompromi dibanding landasan normatif pembangunan. Untuk memahami kompleksitas ini, kita perlu menelaah tiga studi kasus: Pantai Bingin (Bali), Desa Jatiluwih (Bali), dan Kampung Warna-Warni Jodipan (Malang). Ketiganya menunjukkan wajah berbeda dari masalah yang sama: tata ruang sebagai arena tarik-menarik kuasa antara hukum, modal, dan komunitas social [16].

Kasus Pantai Bingin memperlihatkan tipikal eksploitasi ekonomi dengan pelanggaran masif. Kawasan ini, menurut catatan DPRD Bali, dipenuhi vila mewah dan resort yang nyaris seluruhnya berdiri tanpa kepemilikan tanah legal, mulai dari SHM hingga HGB. Lebih parah lagi, sebagian bangunan berdiri di sempadan pantai dan tebing yang secara normatif harus dilindungi sebagai zona ekologis. Secara hukum, keberadaan bangunan itu adalah pelanggaran serius. Secara budaya, arsitektur vila yang mengabaikan prinsip arsitektur Bali juga melanggar Perda No. 5 Tahun 2005 tentang Bangunan Gedung. Fenomena ini bukan sekadar penyimpangan administratif, tapi bentuk eksploitasi simbolik: menjadikan lanskap Bali semata ruang produksi uang yang dipasarkan ke wisatawan global, tanpa peduli pada nilai budaya dan keseimbangan ekologis. Dalam perspektif kritis, ini bisa dibaca sebagai varian

kolonialisme baru: ruang publik Bali diprivatisasi oleh modal global, dan masyarakat lokal tersingkir dari akses ruang hidup mereka. Respon pemerintah pun lemah penindakan baru muncul setelah pelanggaran begitu masif dan sorotan publik meningkat. Padahal, tanpa penegakan hukum tegas yang berujung pada pembongkaran maupun sanksi pidana, integritas tata ruang Bali tidak akan pernah kembali [15].

Berbeda dengan Bingin, kasus Jodipan di Malang menawarkan wajah dilema humanis: pelanggaran tata ruang yang direspons dengan kompromi sosial dan kreativitas komunitas. Secara hukum, permukiman padat di bantaran Daerah Aliran Sungai (DAS) Brantas di Jodipan jelas melanggar aturan karena melanggar zona lindung. Akan tetapi, alih-alih menggusur, pemerintah memilih jalan kompromi. Warga yang sudah turun-temurun bermukim dilibatkan untuk mentransformasi kawasan menjadi Kampung Warna-Warni. Dinding rumah dicat penuh warna, mural menghias jalan sempit, dan kampung kumuh berubah menjadi destinasi wisata populer. Hasilnya, citra kota Malang terangkat, pendapatan warga bertambah, dan banyak wisatawan datang untuk menikmati suasana unik tersebut. Dari perspektif pembangunan partisipatif, Jodipan adalah contoh bagaimana masyarakat dengan dukungan pemerintah dan swasta (misalnya sponsorship cat) mampu berinovasi mengubah ruang ilegal menjadi ruang kreatif yang bermanfaat. Akan tetapi, meski inspiratif, kompromi ini menyimpan risiko. Jika semua pelanggaran DAS dibiarkan dengan alasan sosial-ekonomi, maka fungsi ekologis dan keamanan DAS akan hancur. Hal ini dapat menciptakan preseden buruk, di mana kelemahan hukum dijadikan dalih untuk pembiaran. Oleh sebab itu, pemerintah harus tetap memberi pembatasan melalui legalisasi terbatas, pengawasan ketat, dan pembinaan berkelanjutan agar Jodipan tidak menjadi justifikasi ketidakdisiplinan tata ruang [17].

Sementara itu, kasus Jatiluwih di Bali menghadirkan dilema warisan budaya versus eksploitasi pariwisata. Sebagai situs Warisan Dunia UNESCO sejak 2012, Jatiluwih memiliki keistimewaan global karena Subak-nya dianggap sebagai contoh terbaik sistem sosial-ekologis pertanian berkelanjutan. Namun hari ini, Jatiluwih menghadapi setidaknya 13 titik pelanggaran tata ruang berupa pembangunan vila, restoran, dan

fasilitas komersial yang tidak sesuai dengan RTRW. Pelanggaran ini melampaui soal administratif. Ia mengancam eksistensi Subak itu sendiri, menggerogoti kelestarian identitas budaya Bali, serta berpotensi memalukan Indonesia di panggung internasional bila status UNESCO tersebut dicabut. Tekanan untuk menjadikan lanskap sawah Subak sebagai komoditas wisata premium telah menimbulkan paradoks tragis: justru daya tarik utama Bali (autentisitas budaya agraris) terancam hilang akibat pariwisata itu sendiri. Sayangnya, pemerintah daerah tampak kompromistis, enggan menindak tegas pelanggaran karena pertimbangan ekonomi. Masyarakat adat dan petani pun termarginalisasi, kehilangan suara dalam menentukan masa depan ruang yang sejatinya adalah identitas kolektif mereka. Ini adalah kegagalan tata ruang yang paling serius, karena taruhan bukan hanya lingkungan, melainkan juga martabat budaya yang sudah mendapat pengakuan dunia.

Jika dibandingkan, ketiga kasus ini memperlihatkan pola yang berbeda. Bingin adalah contoh nyata tentang eksploitasi ekonomi tanpa kendali hukum, di mana kuasa modal internasional masuk dan menguasai ruang publik Bali. Jodipan mencerminkan dilema antara kemanusiaan versus aturan hukum: pelanggaran tata ruang “dinormalisasi” atas dasar realitas sosial dan hasilnya bisa positif, tetapi berisiko preseden buruk. Jatiluwih sendiri adalah krisis antara warisan budaya versus dorongan pariwisata komersial, di mana pemerintah terlalu lunak terhadap pelanggaran sehingga warisan dunia bisa kehilangan legitimasi. Analisis perbandingan ini memperlihatkan bahwa tata ruang di Indonesia bukan sekadar teknis soal izin, melainkan arena kompromi multi-dimensi: ekonomi, hukum, politik, dan budaya.

Tanggung jawab terbesar tetap berada pada pemerintah. Pemerintah harus menjalankan dua kewajiban: penegakan hukum tanpa tebang pilih, serta pendekatan adaptif berbasis konteks. Penegakan hukum berarti menindak investor asing atau pengusaha besar yang melanggar zona dengan sanksi nyata termasuk pembongkaran bangunan ilegal di Bingin maupun Jatiluwih. Tanpa tindakan keras, hukum tidak lagi dipercaya publik. Akan tetapi, di sisi lain, pemerintah sah menggunakan pendekatan adaptif pada konteks sosial-humanis, seperti di Jodipan, dengan catatan

tidak mengorbankan aspek ekologis yang vital. Regulasi tata ruang hanya mungkin dipercaya apabila konsisten ditegakkan, tidak diskriminatif, dan dipraktikkan dengan integritas.

Masyarakat lokal juga harus menjadi aktor aktif, bukan korban. Kasus Jodipan menunjukkan bahwa inisiatif kreatif warga bisa mengubah ruang ilegal menjadi ruang produktif. Akan tetapi, di Bingin atau Jatiluwih, lemahnya daya tawar masyarakat membuat mereka terpinggirkan oleh modal eksternal. Oleh sebab itu, tiga langkah penting harus diperkuat: penguatan literasi hukum agar masyarakat memahami hak atas ruang; pemberdayaan ekonomi lokal agar mereka tidak tergoda menjual atau tergeser; serta kolektivitas solidaritas agar masyarakat dapat melawan eksploitasi ruang secara bersama, bukan sporadis. Pada saat yang sama, pelaku usaha juga harus menjalankan tanggung jawab moral. Paradigma mencari keuntungan jangka pendek harus dikoreksi menjadi praktik bisnis berkelanjutan yang sesuai hukum, menghargai arsitektur lokal, dan menyisihkan keuntungan untuk kepentingan komunitas.

Akhirnya, pelanggaran tata ruang di Indonesia, dan khususnya di Bali, mencerminkan kegagalan tata kelola struktural. Tata ruang kehilangan kekuatan normatifnya dan diturunkan menjadi arena kompromi antara modal, politik, dan kepentingan jangka pendek. Bingin memperlihatkan wajah eksploitasi ruang oleh kapitalisme global. Jodipan menunjukkan kompromi sosial yang inspiratif tetapi berpotensi destruktif bila tanpa batas. Jatiluwih menampilkan paradoks antara warisan dunia dan komodifikasi pariwisata. Masa depan tata ruang Indonesia, apalagi Bali yang memiliki sensitivitas budaya tinggi, hanya bisa selamat jika kolaborasi sejati diwujudkan: pemerintah menegakkan hukum secara konsisten, masyarakat memperkuat partisipasi dan solidaritas, pelaku usaha menghentikan pola eksploitatif. Tata ruang tidak boleh lagi diperlakukan sekadar garis di atas peta birokrasi; ia adalah arena kehidupan, representasi warisan, sekaligus penentu masa depan. Pilihan kita sederhana tetapi krusial: apakah tata ruang dijaga sebagai warisan untuk generasi berikutnya, atau ditinggalkan sebagai catatan kelam tentang bagaimana kompromi politik dan rakusnya modal mengorbankan ruang hidup bangsa [18].

KRISIS SAMPAH BALI 2025: ANTARA ANCAMAN CITRA PARIWISATA DAN MOMENTUM REFORMASI LINGKUNGAN



Pariwisata sebagai industri global tidak pernah bisa dilepaskan dari konteks lingkungan, terutama pengelolaan sampah. Sejarah beberapa destinasi internasional memberi peringatan yang gamblang: kegagalan mengelola sampah akan berujung pada penurunan okupansi wisata, penghentian sementara destinasi, bahkan pemulihan citra yang memerlukan waktu panjang. Phuket di Thailand, misalnya, pernah menghadapi penumpukan sampah harian lebih dari 1.000 ton pada musim liburan, yang menyebabkan pencemaran laut, bau menyengat, dan gangguan

kenyamanan wisatawan serta penduduk. Maya Bay bahkan terpaksa ditutup sementara demi memulihkan ekosistem laut yang rusak akibat *overtourism* dan sampah. Di Peru, Machu Picchu menghadapi masalah serupa, di mana akumulasi sampah menjadi beban besar karena keterbatasan akses logistik pengangkutan. Kasus-kasus internasional itu memberi pelajaran bagi Bali: krisis sampah bukan sekadar isu teknis, tetapi ancaman strategis terhadap reputasi global yang selama ini menjadi modal utama pariwisata [19] [20].

Kini, Bali berada pada titik kritis yang sama dengan ketiga contoh tersebut. Penutupan bertahap TPA Suwung sejak 1 Agustus 2025 adalah tonggak penting yang menandai babak baru tata kelola sampah di Pulau Dewata. TPA terbesar di Bali yang selama ini menampung ribuan ton limbah setiap hari akhirnya mencapai keadaan jenuh. Keputusan untuk menghentikan penerimaan sampah organik, yang disusul rencana penutupan total pada Desember 2025, membawa konsekuensi besar khususnya pada sektor pariwisata yang terpusat di Denpasar dan Badung. Dua kabupaten/kota ini adalah episentrum industri wisata sekaligus episentrum sampah. Produksi sampah harian mencapai lebih dari 1.200 ton, dengan 68 persen berupa sampah organik yang sebagian besar bersumber dari sisa makanan hotel, restoran, dan rumah tangga. Hotel berbintang, restoran mewah, *beach club*, dan kawasan pemukiman padat menyumbang mayoritas volume. Saat sistem sentral Suwung terganggu, rantai logistik pengelolaan limbah pun lumpuh, memicu efek domino pada ekosistem pariwisata [21].

Dampak terhadap industri pariwisata dirasakan seketika. Data Persatuan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) menyebutkan adanya penurunan okupansi hotel hingga 10–20 persen di Denpasar, Badung, dan Sanur. Wisatawan asing kini jauh lebih sensitif terhadap kebersihan dan isu lingkungan. Bau busuk dan pemandangan tumpukan sampah yang membusuk membuat citra destinasi ternoda. Tidak hanya itu, hotel-hotel kelas atas kini harus mengeluarkan biaya tambahan signifikan untuk memindahkan limbah ke lokasi alternatif di luar kota. Biaya itu kemudian dialihkan ke harga kamar, sehingga menurunkan daya saing Bali dibanding destinasi Asia lain yang lebih bersih. Secara visual, sampah di kawasan

wisata seperti Kuta, Sanur, dan sekitar pusat Kota Denpasar telah menggerus estetika yang selama ini menjadi modal strategis pariwisata Bali. Lebih buruk lagi, risiko kesehatan masyarakat meningkat akibat sanitasi yang memburuk: penyakit kulit, saluran pernapasan, hingga ancaman demam berdarah berpotensi melonjak di sekitar kawasan kumuh yang terdampak.

Yang lebih berbahaya dari krisis ini adalah serangan terhadap citra dan kepercayaan global terhadap merek “Bali”. Di dunia digital, berita dan gambar tentang sampah menyebar jauh lebih cepat dibanding upaya perbaikan. Media internasional, influencer global, hingga akun wisatawan langsung menyoroti kondisi Bali yang beraroma busuk. Citra “Bali Green & Clean” yang dipromosikan bertahun-tahun kini menghadapi ancaman runtuh dalam sekejap. Padahal, dalam industri global penuh pilihan, reputasi adalah faktor utama. Sekali Bali dicap sebagai destinasi kotor, perjalanan pemulihan membutuhkan waktu lama, bahkan bisa lebih sulit dibanding memulihkan kerusakan fisik.

Akan tetapi, krisis TPA Suwung ini hanyalah puncak gunung es dari persoalan struktural yang sudah lama ada. Sistem pengelolaan sampah Bali terlalu terpusat pada satu titik. TPS3R (*Tempat Pengolahan Sampah Reduce-Reuse-Recycle*) yang tersebar di beberapa desa belum mampu menanggung beban akibat keterbatasan infrastruktur, kapasitas SDM, maupun ketersediaan teknologi. Konsep *circular economy* masih sekadar jargon: membuang sampah masih dianggap akhir proses, bukan awal dari siklus baru yang menciptakan nilai tambah. Padahal, organik bisa diolah jadi kompos atau biogas, plastik bisa didaur ulang, dan residu energi bisa dikonversi menjadi listrik. Hotel-hotel dan restoran besar baru sebagian kecil yang melakukan pemilahan serius. Ironisnya, upaya ini tetap bergantung pada alur transportasi ke Suwung. Begitu simpul utama ditutup, semua inisiatif di hulu kehilangan tempat muara. Inilah problem struktural pengelolaan sampah Bali yang terlalu mono-sentralistik, sehingga rapuh dalam menghadapi guncangan.

Menghadapi situasi ini, solusi parsial tidak akan cukup. Diperlukan strategi komprehensif berbasis peralihan sistem. Pertama, Bali harus membangun infrastruktur modern dengan kapasitas memadai:

modernisasi TPS3R untuk mempercepat pengolahan organik melalui teknologi fermentasi cepat, pengembangan *waste to energy* di lokasi strategis, serta pencanangan pusat daur ulang plastik berkapasitas industri. Kedua, implementasi sistem ekonomi sirkular harus merambah sektor pariwisata sebagai produsen limbah terbesar. Sisa organik dari hotel dan restoran, yang sejauh ini hanya disposal, seharusnya bisa dimanfaatkan sebagai bahan baku kompos untuk pertanian, biogas untuk listrik skala komunitas, atau bahkan pakan ternak. Plastik sekali pakai harus diubah menjadi bahan industri daur ulang yang memberi manfaat ekonomi. Ketiga, pemerintah harus memainkan peran kombinatorik: menyediakan insentif inovasi (diskon pajak, fasilitas kredit hijau) bagi hotel/resto yang mampu mengelola limbah mandiri, sekaligus menegakkan sanksi tegas terhadap pelanggaran pembuangan ilegal.

Selain infrastruktur dan regulasi, kolaborasi lintas kabupaten/kota juga harus diwujudkan. Ketimpangan yakni Denpasar-Badung sebagai pusat sampah menuntut adanya redistribusi pemrosesan lewat TPST regional di Gianyar, Buleleng, hingga Karangasem. Dengan begitu, Beban Bali Selatan tidak lagi menjadi bom waktu ekologis. Di sisi lain, edukasi publik mutlak dilakukan secara massif. Pemilahan sampah dari rumah tangga harus dipandang bukan kewajiban individu semata, melainkan aksi kolektif sebuah destinasi global. Desa adat, sekolah, pecalang, dan pekerja pariwisata harus dilibatkan agar perubahan perilaku menjadi budaya baru, bukan sekadar proyek tempelan.

Momentum penutupan TPA Suwung ini seharusnya tidak dibaca sebagai krisis semata, tetapi sebagai peluang untuk melakukan transformasi. Bali punya kesempatan menjadikan dirinya model destinasi global berbasis *circular economy*. Dengan sejarah panjangnya sebagai pionir pariwisata budaya-spiritual, Bali bisa memperluas branding sebagai pusat inovasi destinasi hijau dunia. Jika langkah reformasi dilakukan dengan komitmen politik kuat, Bali tidak hanya menyelamatkan reputasinya, tetapi sekaligus menginspirasi kota wisata di seluruh dunia yang bergulat dengan persoalan serupa.

Sebaliknya, jika Bali hanya mengandalkan solusi setengah hati menutup satu TPA, membuka lahan baru, tanpa mengubah sistem pemrosesan, tanpa insentif ekonomi, tanpa edukasi publik, tanpa

keberanian menindak mafia sampah—maka masalah akan terus menjadi penyakit laten. Bali akan digerogoti reputasinya sedikit demi sedikit, dikritik media global, ditinggalkan *repeater*, dan akhirnya mengalami stagnasi pariwisata. Pertanyaan mendasarnya kini adalah: apakah Bali akan membiarkan pariwisatanya runtuh karena sampah, atau menjadikan krisis ini batu loncatan menuju tata kelola lingkungan kelas dunia?

Krisis sampah Bali 2025 memperlihatkan ujian konkret bahwa pembangunan pariwisata berkelanjutan tidak bisa lagi menjadi jargon. Inilah waktu bagi Bali untuk menjawab dengan tindakan nyata. Dunia sedang melihat, wisatawan sedang menilai, dan generasi muda Bali sedang berharap. Jika Bali berhasil mengubah krisis sampah menjadi momentum reformasi, ia akan lahir kembali bukan hanya sebagai Pulau Dewata, tetapi sebagai pionir dunia dalam harmoni antara industri wisata dan ekologi berkelanjutan [22].

MASA DEPAN BALI PERTANYAKAN: REFORMASI SURGA PARIWISATA MENJADI PUSAT INOVASI EKONOMI BERKELANJUTAN



Bali merupakan ikon pariwisata internasional yang selama beberapa dekade telah menempatkan sektor pariwisata sebagai tulang punggung utama perekonomian daerahnya. Kontribusi pariwisata terhadap PDRB Bali bahkan mencapai sekitar 54% sebelum pandemi COVID-19, menempatkan pulau ini dalam posisi sangat tergantung pada keberlanjutan arus wisatawan. Namun, ketergantungan ekstrem ini menunjukkan kerentanannya ketika terjadi guncangan seperti pandemi, saat dunia menutup perbatasan dan jumlah kunjungan wisatawan—baik

domestik maupun mancanegara—anjlok hingga lebih dari 80% dalam waktu kurang dari setahun. Bali mengalami kontraksi ekonomi paling dalam di Indonesia saat itu, dan pelajaran kritisnya adalah fondasi ekonomi monosektor sangat rentan terhadap krisis eksternal yang tidak bisa diprediksi.

Ketergantungan dan Kerentanan Ekonomi Bali: Monosektor pariwisata memang pernah menawarkan motor penggerak pertumbuhan ekonomi yang pesat. Epidermis kemakmuran yang dibangun sektor ini tampak menonjol sebelum pandemi, namun pengalaman global COVID-19 membuktikan bahwa lapisan kesejahteraan tersebut begitu rapuh. Bali, yang pada tahun 2019 menerima devisa pariwisata sekitar USD 9,3 miliar dan menjadi sumber mata pencaharian primer sebagian besar masyarakat, tiba-tiba menemukan dirinya dalam situasi ekonomi lumpuh akibat penutupan pariwisata.

Kerentanan model pembangunan semacam ini menjadi nyata: ketika pariwisata jatuh, seluruh lini ekonomi, dari hotel, restoran, UMKM hingga sektor informal ikut terpuruk secara signifikan. Laporan-laporan resmi menunjukkan bahwa hampir 78% perputaran ekonomi Bali pada 2019 sangat terkait dengan aktivitas pariwisata, sementara sektor-sektor lain hanya berperan marginal. Pengalaman ini menimbulkan refleksi mendalam, mendorong diskursus diversifikasi ekonomi sebagai antisipasi menghadapi volatilitas di masa mendatang.

Advokasi Diversifikasi Ekonomi: Urgensi dan Argumen: Diskursus diversifikasi bukan berarti menafikan peran vital pariwisata bagi Bali. Justru argumen kritis ini lahir dari kebutuhan membangun pilar ekonomi tambahan agar ekosistem perekonomian Bali tidak mudah ambruk setiap kali sektor unggulan terkena krisis eksternal. Beberapa sektor potensial sudah jelas bisa dimaksimalkan—pertanian dan perikanan berkelanjutan, ekonomi kreatif, hingga teknologi dan digitalisasi.

Sektor pertanian Bali, meskipun kini porsinya menurun, tahap awal pembangunan ekonomi daerah ini justru berakar kuat pada agrikultur. Dengan perubahan tren konsumsi dunia yang kini menyoroti pangan organik dan berkelanjutan, serta meningkatnya permintaan produk berbahan alami, Bali memiliki peluang memperkuat pertanian berbasis

komoditas unggulan mulai dari salak, manggis, kopi, hingga jamu dan fitofarmaka. Jika komoditas lokal diproses dengan inovasi melalui pengolahan produk turunan, standardisasi kualitas, serta integrasi hasil riset maka sektor ini bisa berkembang menjadi pilar ekspor strategis. Efek berganda terhadap ekonomi pedesaan juga besar: menciptakan lapangan kerja, menahan laju urbanisasi, dan mendorong penguatan pangan lokal.

Ekonomi kreatif, yang mengakar dari kekayaan budaya Bali, menawarkan jalur diferensiasi lain. Sektor kriya, seni, fashion, animasi, hingga film yang awalnya melayani wisatawan secara fisik beradaptasi dengan pasar digital global lewat platform daring dan promosi lintas negara. Pemerintah dapat mempercepat potensi industri kreatif ini dengan menyediakan fasilitas pelatihan, pembiayaan, standarisasi produk, serta memperluas jejaring pemasaran digital ke pasar internasional. Generasi muda Bali, yang sangat familiar dengan teknologi, bisa menjadi motor penggerak menciptakan produk bernilai tambah tinggi tanpa harus bergantung sepenuhnya pada kehadiran wisatawan di pulau dewata.

Sektor perikanan dan kelautan pun penting, sebab Bali dikelilingi perairan potensial yang mendukung perikanan tangkap maupun budidaya. Pengelolaan yang berbasis keberlanjutan sangat krusial agar sumber daya ini tidak terkuras atau mencederai ekosistem laut yang juga menjadi daya tarik wisata. Diversifikasi lewat ekspor produk laut seperti tuna, udang, dan rumput laut bisa menjadi penyangga ekonomi sekaligus mendukung ketahanan pangan daerah.

Selain itu, teknologi informasi dan komunikasi (TIK) harus menjadi pilar utama ekonomi masa depan Bali. Startup digital dan perusahaan berbasis teknologi dapat lahir dari kolaborasi antara komunitas, pemerintah, dan dunia pendidikan. Model kolaboratif ini membuka peluang ekonomi baru bagi talenta muda, sembari tetap mempertahankan daya saing sektor pariwisata melalui integrasi *big data*, pemasaran digital, dan infrastruktur daring.

Reposisi Peran Pariwisata dan Tantangan Implementasi:

Penting untuk menekankan bahwa upaya diversifikasi tidak dimaksudkan untuk mematikan pariwisata, namun untuk mereposisi peran sektor ini agar lebih adaptif dan berkelanjutan pasca pandemi. Model bisnis

pariwisata harus didesain ulang agar lebih inklusif mengusung pariwisata berbasis komunitas, pelibatan pelaku lokal secara adil, pengembangan desa wisata hijau, dan edukasi keberlanjutan kepada pelaku industri. SDM pariwisata harus bertransformasi dengan menguasai teknologi, bahasa asing, serta prinsip *hospitality* dan *green tourism* sehingga dapat memenuhi kebutuhan pasar global baru yang semakin menuntut jejak karbon rendah dan keaslian budaya.

Namun, realisasi diversifikasi bukan hal mudah. Kebijakan lintas sektor harus terintegrasi, kurikulum pendidikan mesti dirancang guna melahirkan tenaga siap pakai untuk sektor agribisnis, ekonomi kreatif, teknologi pangan, hingga digital marketing. Perguruan tinggi dan sekolah kejuruan harus berkolaborasi dengan dunia usaha dan pemerintah daerah dalam menyiapkan SDM unggul yang adaptif terhadap perubahan pasar kerja.

Diversifikasi sebagai Pilar Keberlanjutan dan Daya Tahan Bali:

Diversifikasi ekonomi Bali sebenarnya adalah strategi fundamental bagi kemandirian, distribusi pendapatan, dan ketahanan sosial ekonomi daerah. Pengalaman pandemi telah menjelaskan pentingnya integrasi pendapatan antar sektor agar ketika satu sektor tertekan, sektor lain tetap hidup dan menopang ekonomi masyarakat secara menyeluruh. Dalam kerangka pembangunan berkelanjutan, strategi diversifikasi sangat relevan dengan filosofi Tri Hita Karana—menciptakan keseimbangan antara manusia (pawongan), alam (palemahan), dan nilai ketuhanan (parahyangan) yang menjadi fondasi harmoni Bali selama ini.

Kombinasi penguatan sektor tradisional (pertanian, perikanan, kerajinan), ekspansi ekonomi kreatif berbasis budaya, serta adopsi teknologi inovasi baru adalah kunci membangun masa depan Bali yang *resilient*. Tantangan terbesarnya adalah menghindari diversifikasi semu, di mana strategi hanya berhenti sebagai jargon tanpa implementasi jelas. Untuk itu, kebijakan harus partisipatif, berbasis data, dan didukung komitmen kuat dari pemerintah, swasta, masyarakat, dan dunia pendidikan.

Pada tahap ini, pertanyaan krusial untuk Bali bukan lagi “apakah diversifikasi perlu dilakukan?”, melainkan “bagaimana mendesain dan

mengeksekusi diversifikasi sektor secara terintegrasi dan berdaya saing?”. Jika Bali mampu membangun visi, mengintegrasikan kebijakan lintas bidang, memberdayakan SDM, dan memanfaatkan kekuatan digital serta keunggulan lokal, bukan hanya ekonomi daerah yang akan pulih, tetapi juga eksistensi Bali sebagai model pembangunan berkelanjutan di era globalisasi ekonomi yang kian kompleks dan terkoneksi.

Setiap langkah ini menuntut keberanian untuk berubah, inovasi kolektif, serta konsistensi perjalanan jangka panjang agar Bali tetap lestari, tangguh, dan menjadi rumah yang bermartabat bagi generasi masa depan [23] [24].

KORUPSI DAN ANCAMAN DISINTEGRASI BANGSA: TINJAUAN KRITIS ATAS KRISIS TATA KELOLA DI INDONESIA



Korupsi sejak lama dipandang sebagai salah satu faktor utama yang dapat menggiring sebuah bangsa ke arah kehancuran. Para ahli menegaskan bahwa ciri-ciri negara yang menuju keruntuhan tidak hanya terletak pada persoalan ekonomi semata, tetapi juga pada ketidakseimbangan sosial, degradasi moral, dan runtuhnya kontrak sosial antara pemerintah dan rakyat. Ketimpangan yang semakin melebar antara kaya dan miskin, disintegrasi budaya yang merusak persatuan nasional, hingga hilangnya

rasa nasionalisme serta identitas kolektif suatu bangsa, kesemuanya menjadi indikator negatif yang saling terkait dan dapat membawa negara kepada jurang krisis multidimensi. Dalam konteks Indonesia, korupsi telah menjadi faktor dominan yang merusak legitimasi negara dan kualitas kehidupan masyarakat. Ironisnya, meskipun korupsi terus dipandang sebagai musuh bersama, realitas empiris menunjukkan bahwa praktik ini masih sangat mengakar di berbagai lini kehidupan, mulai dari level pusat hingga daerah, dari perusahaan milik negara hingga lembaga perbankan daerah, serta dari pengelolaan sumber daya alam hingga pelayanan publik mendasar [25].

Kasus-kasus terbaru yang mencuat di awal tahun 2025 semakin membuka mata publik bahwa korupsi di Indonesia bukanlah tindakan sporadis, melainkan fenomena sistemik. Dugaan korupsi besar terjadi di PT Pertamina, Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI), Bank BJB, dan Bank Jatim. Kasus dugaan korupsi tata kelola minyak mentah di Pertamina dengan kerugian negara mencapai Rp193,7 triliun hanya dalam kurun satu tahun memperlihatkan betapa serius dampak finansial sekaligus struktural dari praktik korupsi dalam sektor strategis. Kasus ini bukan hanya mencerminkan kebocoran keuangan negara dalam skala raksasa, tetapi juga menunjukkan kegagalan tata kelola sumber daya alam yang seharusnya menjadi tulang punggung kesejahteraan rakyat. Dalam waktu hampir bersamaan, KPK juga membongkar dugaan korupsi di LPEI dengan kerugian sebesar Rp11,7 triliun, serta kasus dugaan kredit fiktif di Bank Jatim dengan nilai Rp569,4 miliar. Fakta-fakta ini bukan hanya angka mengejutkan, melainkan juga cerminan dari lemahnya integritas individu, kerentanan sistem pengawasan internal, serta rapuhnya komitmen institusi negara dalam memastikan akuntabilitas publik.

Jika dilihat dari perspektif makro, korupsi tidak hanya merugikan negara secara finansial, melainkan juga memiliki implikasi sosial yang sangat destruktif. Menurut Transparansi Internasional, diperkirakan sekitar 30–40% APBN dan APBD bocor setiap tahunnya akibat praktik korupsi. Angka ini, jika benar adanya, berarti dana publik dalam jumlah raksasa yang seharusnya dialokasikan untuk pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur menguap masuk ke kantong pribadi. Dampak langsungnya jelas: rakyat

tetap harus membayar pendidikan mahal, akses kesehatan belum memadai, dan infrastruktur publik sering kali buruk kualitasnya karena dikorupsi dalam proses pengadaan maupun pelaksanaannya. Akhirnya, masyarakat menanggung beban biaya hidup yang tinggi meskipun negara kaya akan sumber daya. Ketidakadilan struktural semacam ini berpotensi memicu keresahan sosial, memperlebar jurang ketidakpercayaan rakyat terhadap negara, dan dalam jangka panjang melemahkan nasionalisme serta keutuhan bangsa.

Korupsi sendiri tidak dapat dipandang sekadar sebagai tindakan kriminal biasa, melainkan *extraordinary crime* yang membutuhkan strategi pemberantasan luar biasa. Namun dalam praktiknya, upaya pemberantasan masih berjalan setengah hati. KPK yang seharusnya berdiri sebagai lembaga antikorupsi independen kerap kali menghadapi tekanan politik yang mengancam integritasnya. Reformasi birokrasi yang diharapkan mampu mempersempit ruang gerak praktik koruptif juga belum sepenuhnya efektif, karena mentalitas birokrasi yang feodal dan politisasi jabatan masih dominan. Lingkaran setan politik uang dalam kontestasi pemilu memperburuk kondisi, karena pemimpin yang terpilih melalui praktik transaksional cenderung menggunakan jabatan untuk mengembalikan modal kampanye melalui rente dan korupsi kebijakan. Situasi ini menciptakan struktur kekuasaan yang beroperasi bukan atas dasar meritokrasi dan etika pelayanan publik, melainkan atas dasar transaksi ekonomi politik yang penuh kompromi.

Dari perspektif sosial budaya, dampak korupsi juga mengikis identitas moral bangsa. Ketika praktik suap, kolusi, dan manipulasi hukum menjadi hal yang biasa, masyarakat perlahan kehilangan sensitivitas terhadap tindakan yang salah. Fenomena “budaya permisif” terhadap korupsi membuat masyarakat sering kali apatis dan hanya menyalahkan elit tanpa memperbaiki perilaku sehari-hari yang juga rentan terhadap praktik kecil koruptif, misalnya dalam bentuk pungutan liar atau gratifikasi kecil-kecilan. Gejala ini memperlihatkan bahwa perlawanan terhadap korupsi tidak dapat hanya ditopang oleh aparat hukum, tetapi harus dibarengi dengan rekonstruksi moral masyarakat secara keseluruhan.

Dalam lanskap kebijakan publik, korupsi juga menyebabkan fragmentasi institusional. Pelanggaran terhadap kontrak sosial antara negara dan rakyat semakin terlihat jelas ketika kebijakan publik tidak lagi berpihak pada kesejahteraan bersama, melainkan diarahkan untuk kepentingan kelompok tertentu. Kesenjangan antara segelintir orang kaya dan mayoritas rakyat miskin semakin melebar, karena kebijakan ekonomi serupa subsidi, insentif usaha, atau pengadaan proyek cenderung dikomodifikasi untuk menguntungkan elit politik dan pengusaha tertentu. Pengingkaran terhadap prinsip keadilan distributif ini secara teoritik adalah resep menuju kehancuran negara sebagaimana diperingatkan banyak ilmuwan politik.

Dalam situasi seperti ini, membangun komitmen antikorupsi harus dilakukan melalui pendekatan multipihak. Pertama, pemerintah perlu memperkuat independensi lembaga antikorupsi seperti KPK, Kejaksaan, dan kepolisian, serta memastikan tidak ada intervensi politik dalam penanganan kasus besar. Transparansi harus menjadi prinsip utama dalam seluruh proses penyelidikan dan pengadilan. Kedua, pendidikan antikorupsi harus ditanamkan sejak dini. Perguruan tinggi misalnya dapat menetapkan kurikulum wajib yang menekankan pada nilai integritas, analisis kritis terhadap dampak korupsi, serta strategi pencegahan berbasis komunitas. Mahasiswa sebagai agen perubahan memiliki peran krusial dalam menanamkan etika baru yang menolak kompromi terhadap perilaku koruptif. Ketiga, masyarakat sipil harus memperkuat gerakan antikorupsi berbasis partisipasi publik. Pelaporan kasus korupsi, kampanye anti suap, serta gerakan sosial untuk menolak segala bentuk kompromi dapat menjadi tekanan moral tambahan terhadap sistem hukum yang sering kali lamban bergerak.

Penting untuk diingat bahwa keberhasilan pemberantasan korupsi bukan hanya soal seberapa banyak kasus besar yang berhasil diungkap, tetapi lebih kepada seberapa jauh sistem sosial, politik, dan birokrasi dapat diperbaiki sehingga ruang gerak korupsi menjadi semakin sempit. Jika upaya ini tidak dijalankan secara serius, maka korupsi akan terus memperlemah fondasi negara dan menggerogoti daya tahan nasional. Dengan kerugian negara yang mencapai triliunan rupiah setiap tahunnya,

Indonesia sesungguhnya kehilangan peluang emas untuk meningkatkan kualitas hidup rakyatnya secara signifikan.

Sebaliknya, jika pemberantasan korupsi dilakukan dengan komitmen penuh dan melibatkan seluruh pemangku kepentingan, Indonesia sebenarnya memiliki modal besar untuk keluar dari jeratan krisis tata kelola. Pendidikan antikorupsi, reformasi birokrasi, transparansi kebijakan publik, dan penguatan peran masyarakat sipil adalah empat tiang yang dapat menopang bangunan antikorupsi ke depan. Meski perjalanan panjang dan penuh tantangan, pilihan untuk bertahan dengan status quo justru akan menjerumuskan bangsa pada kondisi yang digambarkan para ahli sebagai ciri-ciri kehancuran negara. Dengan kata lain, korupsi bukan hanya soal kejahatan dalam pengelolaan anggaran, melainkan ancaman eksistensial bagi bangsa dan negara itu sendiri. Oleh karena itu, pemberantasan korupsi di Indonesia harus diposisikan sebagai agenda penyelamatan nasional, bukan sekadar program sektoral yang dijalankan secara birokratis [25].

SEJARAH MILIK PEMENANG ATAU MILIK SEMUA? REFLEKSI KRITIS ATAS NARASI, KUASA, DAN KEBENARAN



Sebuah percakapan kelakar dengan teman pernah melahirkan diskusi serius tentang sejarah. Ia berujar tentang menghidupkan kembali kejayaan masa lalu, dan komentar ringan yang muncul adalah ungkapan bahwa cita-cita tersebut mirip orang tua yang ingin jadi penyanyi cilik. Dari obrolan sederhana itu lahirlah refleksi yang lebih mendalam: apakah sejarah memang bisa diluruskan, ataukah sejarah sejatinya tidak pernah lurus karena selalu didominasi oleh para pemenang? Pertanyaan mendasar ini mengundang kita untuk berpikir kritis tentang hakikat

sejarah, siapa yang menuliskannya, dan bagaimana ia digunakan oleh pihak-pihak yang berkuasa untuk melanggengkan dominasi [26].

Ungkapan “sejarah ditulis oleh para pemenang” sering muncul dalam ruang-ruang publik baik dalam diskusi akademik maupun candaan kasual sebagai mantra yang merefleksikan kenyataan bahwa narasi masa lalu lebih banyak dimonopoli oleh mereka yang berhasil merebut kekuasaan. Dalam pandangan umum, sejarah dianggap catatan objektif tentang masa lalu, sebuah memori kolektif yang bisa memberi pelajaran bagi generasi berikutnya. Tetapi kenyataannya, sejarah sering kali jauh dari objektif. Sejarah adalah konstruksi sosial yang dibentuk oleh kuasa, diseleksi oleh kepentingan, dan diulang melalui mekanisme pendidikan, arsip, dan simbol-simbol budaya. Ada jurang yang nyata antara idealisasi sejarah sebagai cermin kebenaran universal dengan realitas penulisannya yang sarat distorsi, manipulasi, dan penghilangan.

Faktanya, sejarah yang dominan hampir selalu merupakan narasi yang mewakili kehendak pemenang. Pihak yang menang dalam perang, konflik, atau pergulatan politik memiliki privilese untuk mengatur arsip, dokumen, monumen, hingga sistem pendidikan. Mereka menonjolkan kontribusinya, mengaburkan suara lawan, bahkan menghapus eksistensi kelompok yang dianggap mengganggu legitimasi. Sejarah pun menjadi alat ideologis: bukan lagi sekadar catatan faktual, melainkan mesin pembentuk identitas kolektif sesuai selera kekuasaan. Hal ini bisa dilihat pada berbagai rezim di dunia, termasuk Indonesia. Narasi resmi G30S/PKI selama Orde Baru adalah contoh jelas bagaimana sejarah dijadikan alat politik untuk melanggengkan kekuasaan. Hanya satu versi yang diajarkan di sekolah, ditayangkan berulang dalam film wajib, dan diabadikan dalam buku serta kurikulum nasional. Suara para penyintas, eksil, dan korban tidak muncul dalam arus utama, melainkan dibungkam atau disingkirkan.

Dalam perspektif teori kritis, praktik semacam ini dapat dianalisis melalui pandangan Michel Foucault yang melihat sejarah sebagai arena perebutan kuasa, di mana berbagai kekuatan berkompetisi untuk menentukan apa yang dianggap penting untuk diingat dan apa yang dilupakan. Kebenaran, bagi Foucault, adalah hasil konstruksi relasi kuasa,

bukan entitas netral yang berdiri di luar kepentingan. Dalam kerangka ini, sejarah bukanlah jalan lurus, melainkan palimpsest penuh coretan, penghapusan, revisi, dan penulisan ulang. Tiap rezim meninggalkan lapisan narasi yang menutupi lapisan sebelumnya, dengan tujuan memberi legitimasi pada dirinya dan membatasi ingatan kolektif rakyat.

Akan tetapi, pertanyaan kritis berikutnya adalah apakah sejarah memang hanya milik pemenang? Jawabannya tidak sesederhana itu. Dalam era globalisasi, tumbuhnya historiografi kritis, keterbukaan informasi, dan kemajuan teknologi digital telah memberi kesempatan bagi suara-suara alternatif untuk muncul. Reformasi 1998 di Indonesia membuka ruang bagi narasi tandingan terhadap versi sejarah resmi Orde Baru. Diskursus tentang G30S kini lebih beragam, meskipun tarik menarik kuasa antara narasi negara dan narasi komunitas kritis masih terjadi. Demikian pula, munculnya jurnalisme investigasi, film dokumenter independen, hingga arsip digital memungkinkan masyarakat mengakses versi-versi sejarah yang dulunya terpinggirkan. Hal ini membuktikan bahwa meskipun pemenang berkuasa atas narasi, sejarah tidak pernah benar-benar tunggal; ia selalu menyisakan ruang untuk versi lain, terutama ketika ada masyarakat kritis yang ingin mengungkap ingatan terpendam.

Dari konteks global, kita juga bisa melihat fenomena yang sama. Kisah Holocaust, misalnya, semula ditulis dominan dari sudut pandang negara pemenang perang. Namun dokumentasi korban dan generasi penerus berhasil melahirkan ruang ingatan tandingan yang mengisi kekosongan narasi resmi. Demikian pula sejarah kolonisasi sering kali ditulis dari perspektif penjajah, tetapi kini semakin banyak karya dari perspektif bangsa terjajah yang mengkritisi “narasi agung” kolonialisme. Proses revisi narasi sejarah adalah bukti nyata bahwa sejarah tidak permanen, melainkan arena dinamis yang selalu bisa diperdebatkan kembali.

Jika demikian, sejatinya yang perlu dikembangkan bukan ide untuk meluruskan sejarah hingga benar-benar “objektif” karena objektivitas absolut dalam sejarah sulit dicapai tetapi kesadaran kritis bahwa sejarah memiliki banyak wajah. Keadilan dalam sejarah bukan berarti satu versi

tunggal yang dianggap benar, melainkan keterbukaan untuk menghadirkan banyak versi milik pemenang, pihak kalah, kelompok marginal, dan suara korban agar generasi masa kini dan mendatang dapat belajar dari beragam perspektif. Sejarah yang inklusif justru memberi bangsa kesempatan memproses luka, mengakui kesalahan, serta membangun rekonsiliasi yang lebih jujur.

Dalam kerangka ini, ada beberapa langkah penting yang dapat dilakukan. Pertama, keterbukaan arsip harus dijamin oleh negara, agar publik dan sejarawan memiliki akses terhadap dokumen yang selama ini dirahasiakan. Arsip yang tertutup hanya memberi ruang bagi mitos, bukan kebenaran. Kedua, pendidikan sejarah harus bergeser dari pola hafalan versi resmi ke arah pembelajaran kritis yang melatih siswa membaca berbagai sumber, membandingkan narasi, dan bertanya “siapa yang berbicara” dalam setiap teks sejarah. Guru dan dosen harus berperan sebagai fasilitator kritis, bukan sekadar pengulang narasi negara. Ketiga, ruang publik—baik dalam bentuk buku, film, diskusi, hingga media sosial—harus dijadikan sarana untuk menyuarakan narasi alternatif. Demokratisasi media memungkinkan orang-orang pinggiran untuk berbicara, asalkan tidak ada represi negara yang menutup ruang tersebut.

Lebih jauh lagi, masyarakat juga harus belajar bahwa mengidealkan masa lalu dengan keinginan “menghidupkan kejayaan sejarah” bisa menjadi jebakan romantisme yang berbahaya. Sejarah tidak pernah hitam putih, selalu kompleks, dan penuh paradoks. Mengidealkan masa lalu sering kali hanya memilih fragmen fragmen yang indah dan melupakan sisi gelapnya. Dengan kesadaran kritis, kita sebaiknya melihat sejarah sebagai ruang refleksi, bukan nostalgia buta. Sejarah tidak bisa diluruskan hingga lurus benar, tetapi bisa diperkaya hingga lebih adil.

Pada akhirnya, pertanyaan “apakah sejarah lurus?” bukan untuk dijawab dengan mutlak, melainkan untuk menggugah kesadaran bahwa sejarah adalah konstruksi yang harus terus diuji, dikritisi, dan diperdebatkan. Benar bahwa sejarah sering ditulis oleh para pemenang, tetapi bukan berarti ia milik para pemenang semata. Sejarah adalah milik semua yang pernah hidup, menderita, berjuang, dan bahkan kalah. Dengan membuka ruang bagi semua suara, kita tidak sedang meluruskan

sejarah, melainkan melengkapinya. Karena sejarah yang lurus bukanlah sejarah tanpa celah, melainkan sejarah yang berani mengakui keragaman wajah kebenaran dan memberi tempat pada mereka yang lama dibungkam [27].

PEMBANGUNAN TERMINAL LNG SIDAKARYA: ANTARA KETAHANAN ENERGI DAN KEBERLANJUTAN SOSIAL LINGKUNGAN BALI



Rencana pembangunan Terminal Liquefied Natural Gas (LNG) di Pantai Sidakarya, Denpasar Selatan, Bali, merupakan proyek yang digagas dalam kerangka program besar Bali Mandiri Energi Bersih. Proyek ini ditempatkan sebagai salah satu inisiatif strategis untuk menjawab kebutuhan energi listrik Bali yang diproyeksikan akan terus meningkat seiring dengan pertumbuhan ekonomi, urbanisasi, dan tuntutan global atas penggunaan energi lebih ramah lingkungan. Akan tetapi, proyek tersebut menimbulkan dialog dan perdebatan di ruang publik karena posisinya yang krusial dalam

menyeimbangkan antara kepentingan manusia (*people*), ekonomi (*profit*), dan lingkungan (*planet*). Kerangka analisis *people profit planet* menjadi penting untuk mengkritisi sejauh mana pembangunan ini membawa manfaat nyata sekaligus potensi risikonya bagi masa depan Bali [28].

Dari aspek sosial atau *people*, pembangunan terminal LNG ini memunculkan dilema yang cukup kompleks. Masyarakat lokal dari Desa Sidakarya, Desa Serangan, dan Desa Intaran menyuarkan kekhawatiran atas dampak sosial maupun ekologis. Kekhawatiran utama ditujukan pada aspek keamanan, potensi kerusakan ekosistem laut, hingga keberlangsungan hidup nelayan yang bergantung pada laut sebagai sumber mata pencaharian. Desakan masyarakat menunjukkan bahwa proyek energi strategis tidak dapat dilepaskan dari sensitivitas sosial, budaya, dan ekonomi lokal yang melekat pada Bali sebagai wilayah dengan tradisi agraris maritim dan falsafah hidup Tri Hita Karana. Akan tetapi, Gubernur Bali menegaskan bahwa seluruh proses telah melalui studi lingkungan secara menyeluruh, termasuk Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL), serta menjamin bahwa jalur transportasi kapal LNG menggunakan jalur eksisting tanpa melewati terumbu karang aktif. Lebih jauh lagi, penegasan disampaikan bahwa pipa gas akan ditanam hingga 15 meter di bawah hutan mangrove, sehingga tidak merusak ekosistem akar mangrove yang krusial untuk keseimbangan pesisir.

Dari sisi pemerintah daerah, pembangunan ini disebutkan akan memberdayakan masyarakat dengan peluang ekonomi baru. Kerja sama dengan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) maupun Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) akan membuka ruang partisipasi masyarakat dalam mengelola kawasan sekitar, mengoperasikan dermaga pariwisata, serta menjadikannya bagian dari sistem ekonomi energi terintegrasi. Jadi, terdapat potensi untuk menciptakan hubungan positif antara proyek infrastruktur energi dengan penguatan ekonomi lokal. Akan tetapi, kritik dari kelompok lingkungan seperti Walhi Bali memperlihatkan bahwa suara publik tidak boleh diabaikan begitu saja. Walhi menyoroti adanya ketidakkonsistenan dalam dokumen Kerangka Acuan Analisis Dampak Lingkungan (KA ANDAL), di mana lokasi pembangunan diduga berada di kawasan hutan mangrove Taman Hutan Raya Ngurah Rai sebuah kawasan

lindung yang memiliki peran ekologis besar dalam melindungi garis pantai, mencegah abrasi, dan menyerap karbon. Kritik ini menegaskan bahwa ada potensi ambiguitas dalam dokumen perencanaan yang dapat merugikan masyarakat jangka panjang jika tidak ditangani secara transparan. Jadi, aspek *people* menggambarkan adanya tarik menarik antara janji pemberdayaan dengan risiko kehilangan ruang hidup masyarakat, terutama nelayan dan komunitas pesisir.

Dari dimensi ekonomi atau profit, proyek Terminal LNG Sidakarya ditempatkan sebagai bagian penting dalam agenda ketahanan energi Bali sekaligus transisi menuju energi bersih. Terminal ini akan terhubung dengan Pembangkit Listrik Tenaga Gas (PLTG) Pesanggaran dan pembangunan pembangkit baru di wilayah perbatasan Denpasar Gianyar dengan total kapasitas 1.550 MW pada tahun 2029. Jika terealisasi, Bali akan memiliki sumber energi yang lebih stabil sekaligus ramah lingkungan dibandingkan masih mengandalkan batu bara atau minyak solar. LNG dianggap lebih efisien dan menghasilkan emisi gas rumah kaca lebih rendah. Keuntungan strategis ini menjadikan proyek ini penting dalam upaya mencapai target nasional penurunan emisi karbon sekaligus mendorong reputasi Bali sebagai destinasi wisata hijau berkelas dunia.

Dalam analisis ekonomi lokal, proyek ini berpotensi membuka peluang investasi dan peningkatan pendapatan masyarakat sekitar melalui pengelolaan kawasan, dermaga wisata, serta potensi pengembangan pariwisata maritim yang lebih terintegrasi dengan sektor energi. Konsep integrasi antara industri energi dan masyarakat pariwisata dapat membuka lintasan ekonomi baru yang sebelumnya jarang disentuh. Akan tetapi, risiko ekonomi tetap mengintai. Ancaman kerusakan lingkungan akibat pengerukan dan reklamasi akan berdampak negatif pada citra pariwisata Bali. Sektor pariwisata yang menyumbang sekitar 50 persen dari PDRB Bali sangat rentan terhadap isu lingkungan. Kasus penutupan Maya Bay di Thailand akibat degradasi lingkungan menjadi peringatan keras bahwa kerusakan ekologis sekecil apapun dapat menurunkan okupansi wisatawan dan menimbulkan kehilangan devisa yang signifikan. Oleh karena itu, nilai profit dari terminal LNG harus diukur tidak hanya dari keuntungan ekonomi

langsung, tetapi juga kerugian potensial yang akan diderita jika pariwisata terganggu.

Sementara dari dimensi lingkungan atau planet, resiko proyek ini menempati titik paling kritis. Walhi menilai terminal LNG Sidakarya berpotensi merusak hutan mangrove Tahura Ngurah Rai yang mencapai 14,5 hektare. Kehilangan mangrove berarti hilangnya benteng alami terhadap abrasi, berkurangnya habitat berbagai jenis satwa, dan meningkatnya emisi karbon karena mangrove dikenal sebagai penyerap karbon yang sangat efektif. Keberatan lain muncul atas rencana pengerukan 3,3 juta meter kubik pasir laut untuk keperluan dumping. Pengerukan masif berpotensi meningkatkan kekeruhan perairan, membahayakan terumbu karang dan biota laut. Pemerintah Bali memang menjanjikan akan menggunakan teknologi pengerukan ramah lingkungan seperti kapal hisap pasir dan kelambu lumpur, tetapi efektivitasnya perlu diverifikasi secara independen. Selain itu, tidak jelas sejauh mana dampak reklamasi akan diantisipasi agar tidak merubah konfigurasi ekosistem pesisir secara signifikan.

Sementara itu, jaminan pemerintah bahwa LNG lebih aman dibanding LPG karena sifatnya yang tidak mudah meledak dan jika bocor akan segera menguap di udara memang dapat meredakan kekhawatiran masyarakat tentang risiko ledakan. Akan tetapi, keamanan energi tidak hanya menyangkut risiko teknis ledakan, tetapi juga harus memperhitungkan risiko lingkungan jangka panjang akibat pembangunan infrastruktur besar di kawasan lindung. Di sinilah letak problem serius: apakah kepentingan energi dapat dibenarkan untuk mengambil risiko ekologis sebesar itu? Menteri Lingkungan Hidup bahkan memberikan batas waktu tiga bulan kepada Pemerintah Provinsi Bali untuk menyelesaikan kajian lingkungan komprehensif dan menentukan kelayakan lokasi terminal LNG di Sidakarya atau mencari alternatif lain. Bahkan, Bali Utara sesungguhnya disebut lebih layak dijadikan lokasi alternatif karena secara geografis memiliki perairan dalam, jalur laut yang lebih terbuka, dan sekaligus dapat membuka pemerataan pembangunan ekonomi di luar Bali Selatan.

Diskursus tentang Terminal LNG Sidakarya dengan demikian tidak berhenti pada wacana teknis, melainkan juga menjadi refleksi kritis tentang arah pembangunan Bali. Ketahanan energi memang sangat penting, terutama karena sektor pariwisata dan ekonomi modern membutuhkan energi listrik yang stabil. Akan tetapi, pembangunan dalam kerangka berkelanjutan menuntut adanya keseimbangan tiga dimensi: manfaat sosial bagi masyarakat, keuntungan ekonomi yang inklusif, dan kelestarian lingkungan. Tanpa keseimbangan tersebut, pembangunan boleh jadi mengantarkan Bali pada krisis baru: kehilangan identitas ekologis dan citra pariwisata hijau yang selama ini dijadikan modal global.

Oleh karena itu, kunci utama proyek ini ada pada tata kelola dan keterbukaan informasi. Kajian kualitatif berbasis *people profit planet* dengan jelas memperlihatkan bahwa ada manfaat nyata tetapi juga risiko signifikan. Agar manfaat bisa dioptimalkan, maka keterlibatan masyarakat dalam pengambilan keputusan harus diperluas, transparansi hasil kajian lingkungan harus benar-benar dijaga, dan mekanisme pengawasan independen harus diperkuat. Energi memang vital, tetapi lingkungan dan masyarakat adalah pondasi utama kehidupan Bali itu sendiri. Jika pembangunan terminal LNG Sidakarya benar-benar ingin menjadi tonggak menuju Bali Mandiri Energi Bersih, maka ia harus terbukti bukan hanya melayani kebutuhan energi, tetapi juga menjadi contoh pembangunan yang partisipatif, adil, dan berkelanjutan [28].

PASAR TRADISIONAL BALI DALAM PUSARAN MODERNISASI: ANTARA TITIK KRITIS DAN HARAPAN REVITALISASI



Kondisi pasar tradisional di Bali kini berada pada titik kritis dalam menghadapi gempuran pasar modern dan penetrasi teknologi retail online. Jumlah gerai minimarket modern yang menjamur semakin mencengangkan. Dua jaringan besar yang populer di Bali dengan gaya pemasaran “PALUGADA” Apa Lu Mau Gue Ada diperkirakan telah membuka antara 380 hingga 480 gerai. Pertumbuhan jumlah gerai ini meningkat signifikan dibandingkan dekade sebelumnya. Konsumen diberikan kemudahan

berbelanja karena produk kebutuhan sehari-hari tersedia dengan cepat dan nyaman dalam ruang ber-AC, tata kelola profesional, promosi agresif, serta jam operasional panjang. Konsekuensinya, pasar tradisional semakin tersisih dari arena kompetisi, kehilangan pengunjung, dan menghadapi ancaman nyata bagi kelangsungan para pedagang kecil yang telah lama menggantungkan hidupnya di sana. Fenomena ini menjadi representasi dari perubahan lanskap ekonomi, sosial, dan budaya lokal Bali yang semakin mendesak untuk ditelaah secara kritis [29] [30] [31].

Secara historis, pasar tradisional di Bali memegang peranan penting sebagai jantung ekonomi kerakyatan. Ia bukan sekadar ruang jual beli kebutuhan harian, tetapi juga menjadi simpul interaksi sosial, ajang pelestarian budaya, dan sarana penyerapan tenaga kerja pada level mikro dan kecil. Pasar tradisional adalah ruang di mana bahasa lokal, ritual, dan solidaritas sosial tumbuh seiring dengan transaksi ekonomi. Akan tetapi, selama satu dekade terakhir, pamornya perlahan merosot. Data nasional menunjukkan bahwa jumlah pasar tradisional menurun hampir 3 persen tiap tahun, sebaliknya pertumbuhan pasar modern mencapai lebih dari 40 persen. Pola konsumsi masyarakat pun bergeser: konsumen dari kelas menengah ke atas lebih memilih pasar modern karena dianggap lebih higienis, aman, tertata, dan memberikan pengalaman berbelanja yang nyaman. Sementara pasar tradisional masih melekat dengan stigma kumuh, becek, bau, dan tata kelola yang tidak profesional. Stigma inilah yang memerlukan refleksi serius sebab telah memengaruhi loyalitas konsumen, sehingga pasar tradisional semakin kesulitan mengubah persepsi publik tentang dirinya.

Lapisan tekanan semakin berat dengan hadirnya retail online. Penjualan daring memberikan fleksibilitas luar biasa bagi konsumen untuk membandingkan harga, membaca ulasan, mendapat potongan harga, menikmati promo bebas ongkir, hingga menerima barang langsung di depan pintu rumah. Kemudahan ini sudah tentu tidak bisa ditandingi oleh sistem jual beli konvensional di pasar tradisional yang minim promosi dan tidak mampu menawarkan pengalaman praktis sebagaimana platform digital. Strategi promosi agresif yang dijalankan minimarket modern dan platform *e-commerce* seperti flash sale, diskon berbasis algoritma, hingga loyalty program, semakin memperkuat ikatan antara konsumen dengan sistem

belanja digital. Situasi ini menempatkan pasar tradisional dalam posisi sangat terpojok, karena selain kalah dari sisi fisik dan pelayanan, mereka juga kalah dalam penetrasi teknologi.

Salah satu ilustrasi nyata tentang terpuruknya pasar tradisional adalah kondisi memprihatinkan Pasar Kreneng di Denpasar. Pasar yang dulunya ramai sebagai pusat ekonomi rakyat kini justru menghadapi degradasi parah. Bangunan yang tak terurus, sanitasi buruk, manajemen sampah yang tidak optimal, serta minimnya tata kelola menjadi wajah sehari-hari Pasar Kreneng. Banyak kios kosong karena pedagang enggan berjualan dalam kondisi yang tidak mendukung. Jumlah pembeli pun kian menipis, bahkan saat momen perdagangan tinggi seperti liburan panjang dan hari raya. Pendapatan pasar dapat turun 25-30 persen, memperlihatkan krisis sistemik yang berlangsung lama. Ironisnya, banyak pedagang luar Bali yang biasanya meramaikan pasar justru memilih meninggalkan Kreneng dan mencari peluang di tempat lain. Hal ini menegaskan bahwa gagalnya pasar tradisional bukan hanya karena kalah dari pesaing modern, melainkan juga akibat kelemahan manajerial dan minimnya inovasi pelayanan.

Pemerintah Kota Denpasar sesungguhnya telah merespons situasi ini melalui rencana revitalisasi fisik Kreneng. Pergantian kios, renovasi los, hingga penataan infrastruktur mulai digagas. Akan tetapi, revitalisasi fisik semata jelas tidak cukup. Masalah fundamental pasar tradisional terletak pada budaya pengelolaan dan manajemen yang tidak profesional. Banyak pengelola pasar dan pedagang belum memahami bahwa menjaga kenyamanan, kebersihan, keamanan, serta kualitas interaksi adalah modal utama untuk menarik kembali konsumen. Revitalisasi seharusnya holistik, mencakup perbaikan tata kelola, integrasi sistem kebersihan, kultur pelayanan, dan pendampingan pedagang untuk adaptasi dengan pola konsumsi modern. Infrastruktur baru yang indah akan membusuk kembali jika budaya lama dalam pengelolaan tetap dipertahankan.

Selain itu, regulasi dan pengawasan terhadap ekspansi pasar modern yang lemah menjadi faktor eksternal penting dalam keterpurukan pasar tradisional. Banyak minimarket modern berdiri tanpa memperhatikan aturan jarak minimal dengan pasar tradisional sebagaimana diamanatkan regulasi. Persaingan langsung yang tidak seimbang menciptakan

ketidakadilan struktural, karena pasar modern memiliki modal kuat, akses pemasaran, serta dukungan manajerial yang profesional, sementara pasar tradisional tidak memiliki perlindungan berarti. Regulasi yang longgar telah mempercepat marginalisasi pasar rakyat. Lebih jauh lagi, kebijakan pemerintah terkait revitalisasi pasar masih bersifat parsial—berfokus pada bangunan, tanpa menggarap inovasi manajerial dan pola pendidikan pedagang.

Jika ditelaah lebih dalam, akar masalah sebenarnya berada pada tataran budaya dan pola pikir. Pasar tradisional belum mampu menyerap prinsip manajemen modern yang berorientasi pada konsumen. Pedagang sering kali menampilkan layanan dengan kualitas rendah, tidak paham pentingnya *display* produk yang menarik, masih terjebak pada harga tawar menawar yang tidak efisien, bahkan abai terhadap sanitasi dan kualitas layanan dasar. Hal ini bertolak belakang dengan pasar modern yang sangat menjunjung profesionalisme, kenyamanan, serta pelayanan ramah yang menjadi standar baku. Dengan kata lain, kelemahan pasar tradisional bukan hanya terletak pada investasi rendah dalam infrastruktur, tetapi lebih pada ketiadaan transformasi budaya pasar.

Maka, transformasi sejati pasar tradisional Bali harus diarahkan pada tiga poros: tata kelola profesional, inovasi pelayanan, dan integrasi teknologi. Tata kelola profesional berarti pengelola pasar memiliki kapasitas manajerial layaknya manajer retail modern: sistem administrasi yang transparan, manajemen keuangan sehat, sistem kebersihan terorganisir, hingga layanan keamanan yang membuat konsumen merasa aman berbelanja. Inovasi pelayanan mencakup strategi penataan kios, branding pasar sebagai pusat budaya kuliner dan produk lokal, serta modernisasi cara berjualan yang lebih interaktif. Integrasi teknologi berarti pedagang tidak lagi hanya mengandalkan konsumen datang ke pasar, tetapi juga memanfaatkan platform digital untuk promosi, menerima pemesanan, bahkan sistem pembayaran *cashless*. Jadi, pasar tradisional tidak serta merta kalah oleh retail modern dan *e-commerce*, melainkan bisa berkembang dengan identitasnya sendiri sekaligus adaptif terhadap zaman.

Transformasi pasar tradisional juga memerlukan intervensi regulasi yang lebih tegas dari pemerintah. Regulasi tentang zonasi pasar modern

harus ditegakkan ketat agar pasar tradisional tidak langsung bersaing dengan ritel modern di depan mata. Kebijakan afirmatif juga dapat berupa penyediaan pelatihan manajemen modern bagi pedagang pasar, pemberian subsidi revitalisasi berbasis komunitas, serta penciptaan program kolaborasi pasar rakyat dengan pariwisata Bali. Pasar tradisional bisa difungsikan bukan hanya sebagai tempat belanja harian, tetapi juga destinasi wisata kuliner dan budaya. Konsep *tourism marketplace* yang mengintegrasikan pasar dengan atraksi seni, kuliner, dan kerajinan lokal dapat membuka peluang baru bagi regenerasi pengunjung. Wisatawan mancanegara maupun domestik akan tertarik jika pasar tradisional dipoles sebagai pengalaman budaya yang autentik, bukan sekadar ruang kotor dan sesak.

Argumentasi terakhir, keberlangsungan pasar tradisional bukan hanya soal ekonomi, tetapi juga identitas budaya Bali. Pasar adalah ruang sosial tempat masyarakat lokal mengartikulasikan bahasa, budaya, dan pola interaksi sehari-hari. Hilangnya pasar tradisional bukan sekadar kerugian ekonomi bagi pedagang kecil, tetapi juga menggerus salah satu dimensi *cultural heritage* Bali. Oleh sebab itu, revitalisasi pasar harus menjadi agenda strategis dalam pembangunan Bali yang berkelanjutan. Jika tidak, pasar tradisional hanya akan tinggal cerita, bagian dari sejarah ekonomi kerakyatan yang digantikan oleh retail modern dan toko daring.

Dalam kerangka pembangunan adil dan berkelanjutan, revitalisasi pasar tradisional tidak boleh berhenti pada fisik bangunan. Revitalisasi sesungguhnya adalah transformasi budaya pelayanan, profesionalisasi manajemen, integrasi teknologi, serta kebijakan protektif terhadap ekspansi pasar modern agar ruang ekonomi kerakyatan tetap terlindungi. Sinergi pemerintah, masyarakat, pengelola pasar, dan pedagang adalah satu satunya jalan untuk mengembalikan pasar tradisional sebagai jantung ekonomi rakyat Bali. Jika hal ini berhasil, pasar tradisional tidak hanya bertahan, tetapi dapat bertransformasi menjadi ruang ekonomi sekaligus ruang budaya yang tetap hidup di tengah modernisasi dan digitalisasi. Jika gagal, maka pasar rakyat hanya akan menjadi nostalgia yang hilang, pelan-pelan tergantikan oleh bangunan ritel modern dan layar gawai yang dingin namun efisien [32].

FRAGMENTASI PARIWISATA BALI PASCA PANDEMI: ANTARA *OVERTOURISM*, KESAKRALAN, DAN JALAN MENUJU KEBERLANJUTAN



Pasca pandemi COVID-19, pariwisata Bali memperlihatkan wajah yang terbelah. Di satu sisi, kawasan-kawasan yang populer seperti Ubud, Sanur, dan Tanah Lot menanggung beban berlebih akibat lonjakan wisatawan serta pembangunan yang pesat. Alam, sosial, bahkan spiritualitas masyarakat adat mengalami tekanan yang signifikan. Di sisi lain, kawasan seperti Lovina dan Bali Utara Timur masih relatif tenang dan stabil, namun justru rentan mengikuti jejak kerusakan yang sama bila pengelolaan tidak dilakukan

secara hati-hati. Fragmentasi ini menegaskan bahwa tanpa arah yang jelas, kebijakan yang terukur, dan pengelolaan yang mengutamakan keberlanjutan, Bali berisiko kehilangan daya tarik autentiknya, merusak harmoni yang menjadi roh keberadaannya, serta menjelma menjadi sekadar destinasi yang terjebak pada logika industri massal [33] [34] [3].

Bali sejak lama menjadi magnet wisata dunia karena alamnya yang indah dan budaya yang unik. Akan tetapi, sejak pembatasan pandemi dicabut dan denyut wisata kembali hidup, pulau ini menghadapi dilema baru: destinasi yang sedang bangkit justru berada di ambang bahaya *overtourism*. Lonjakan wisatawan memang berhasil menghidupkan kembali ekosistem ekonomi dan membuka ribuan lapangan kerja, namun tekanan berlebih mulai merongrong fondasi keberlanjutan. Fenomena *overtourism* bukan sekadar bertambahnya jumlah pengunjung, tetapi lebih dalam: ia adalah kerumitan yang menimbulkan degradasi ekologi, potensi konflik sosial, dan pelecehan terhadap kesakralan budaya Bali. Identitas yang semula menjadi kebanggaan kini berubah menjadi tantangan besar ketika pariwisata tumbuh tanpa batas.

Jika dianalisis berdasarkan data riset terbaru tahun 2025, level *overtourism* di Bali bervariasi pada tiap kawasan. Di beberapa destinasi pantai populer, alih fungsi lahan marak terjadi, mengakibatkan kian sempitnya ruang hijau dan area sawah. Kemacetan lalu lintas, timbunan sampah, serta aktivitas pesta malam di dekat pura kerap memicu keresahan masyarakat. Tanda-tanda ketidakseimbangan ini menunjukkan bahwa pertumbuhan pariwisata yang terlalu cepat telah mengorbankan daya dukung wilayah, sebuah fenomena serius pada pulau kecil dengan ekosistem rapuh seperti Bali.

Ubud yang sebelumnya dipandang sebagai pusat kesenian dan spiritualitas unik, kini menghadapi tekanan ganda. Sawah yang dulu mendominasi pemandangan perlahan dialihfungsikan menjadi hotel berbintang, vila, dan kafe modern. Ironisnya, para wisatawan justru datang dengan ekspektasi mencari “Bali yang autentik”, tetapi pembangunan untuk memenuhi tuntutan tersebut malah menggerus wajah autentisitas itu sendiri. Pura serta upacara keagamaan yang seharusnya menjadi ruang sakral kini berubah menjadi latar swafoto turis. Masyarakat lokal merasa

resah, karena warisan leluhur berubah menjadi komoditas tontonan. Situasi ini menegaskan paradoks fundamental di Ubud: destinasi budaya yang semakin kehilangan kultur dan spiritualitasnya lantaran komersialisasi yang berlebihan.

Hal serupa juga terjadi di Sanur. Kawasan yang dulu dikenal sebagai lokasi ramah keluarga dengan nuansa tenang kini diterpa konflik tata ruang akibat proyek reklamasi. Lingkungan pesisir terkikis, volume sampah meningkat, dan harga rumah melonjak drastis akibat spekulasi lahan. Bagi masyarakat lokal, kondisi tersebut bukan hanya persoalan fisik, melainkan juga pertarungan ruang hidup. Agenda adat kadang berbenturan dengan agenda pariwisata, sehingga menimbulkan ketegangan sosial yang sulit diredakan. Transformasi Sanur menunjukkan betapa pariwisata modern sering kali bertabrakan dengan praktik sosial-budaya masyarakat setempat, mengikis kohesi sosial, sekaligus mengeskalasi komodifikasi sumber daya alam.

Di Tanah Lot, tekanan lebih kentara pada aspek spiritual dan simbolik. Ribuan pengunjung yang datang tiap hari berdesakan sambil berfoto di kawasan pura, mengabaikan norma kesakralan. Bagi masyarakat adat Bali, perilaku wisatawan yang tidak paham aturan ini dirasakan sebagai pelecehan. Jika tidak diatur secara ketat, kawasan spiritual dapat berubah menjadi ruang komersial biasa, kehilangan legitimasi budaya, dan menjadi sumber ketegangan berkepanjangan antara masyarakat adat dan pengunjung. Narasi “Bali yang sakral” bisa kehilangan makna jika pura diubah menjadi sekadar taman hiburan.

Berbeda halnya dengan Lovina, serta Bali Utara dan Timur. Kawasan ini hingga kini relatif stabil, belum mengalami tekanan pariwisata yang signifikan. Lingkungan masih terjaga, masyarakat pun ramah menyambut wisatawan. Namun pengalaman di Bali Selatan sudah memberi pelajaran bahwa tanpa tata kelola yang bijak, daerah-daerah yang saat ini terlihat aman dapat segera mengulangi pola kerusakan. Sebuah peluang untuk memajukan pembangunan di kawasan ini bisa berubah menjadi ancaman besar di masa depan. Fenomena ini memperlihatkan bahwa Bali kini terfragmentasi: kawasan pesisir selatan mengalami kelebihan beban, sementara kawasan lain masih dalam fase awal. Jika fragmentasi ini tidak

ditangani dengan perspektif menyeluruh, maka krisis bisa menyebar ke seluruh pulau.

Solusi jangka pendek yang bersifat “pemadam kebakaran” harus segera dilakukan pada kawasan yang telah mencapai titik kritis. Pertama, diperlukan strategi penyebaran wisatawan agar tidak menumpuk di Ubud, Sanur, Tanah Lot, maupun pantai populer lain. Promosi destinasi alternatif di Bali Utara dan Timur harus gencar dilakukan, disertai penyediaan transportasi memadai dan sistem pengelolaan ketat untuk menjaga keberlanjutan. Kedua, moratorium pembangunan menjadi keharusan di kawasan yang jenuh. Pemberian izin pembangunan hotel, vila, maupun restoran baru harus dihentikan sementara hingga dilakukan audit daya dukung dan dampak lingkungan. Ketiga, zona sakral harus ditegakkan tanpa kompromi. Pura dan kawasan spiritual tidak boleh berubah menjadi taman hiburan semata. Regulasi mengenai perilaku, pakaian, serta waktu kunjungan perlu ditegakkan secara jelas melalui papan informasi, video edukasi, hingga workshop singkat bagi wisatawan. Keempat, manfaat ekonomi pariwisata harus segera diperkuat di aras lokal. Dana dari retribusi pariwisata sebaiknya dialokasikan ke desa adat dan komunitas asli. *Homestay*, usaha kecil, dan kegiatan kerajinan harus diberdayakan agar masyarakat lokal menjadi pelaku utama, bukan sekadar korban atau penonton.

Meski demikian, solusi cepat hanya meredam masalah sementara. Bali membutuhkan arah jangka panjang yang visioner agar krisis tidak berulang. Pertama, daya dukung harus menjadi standar pengelolaan pariwisata Bali. Kapasitas kunjungan tidak semata dihitung dari jumlah orang, tetapi harus memperhitungkan beban sampah, kapasitas transportasi, kebutuhan air, ruang spiritual, dan daya dukung ekologis. Dengan strategi berbasis daya dukung, pertumbuhan ekonomi tidak lagi hanya mengejar target jumlah wisatawan, melainkan memastikan keseimbangan ekologis, sosial, dan spiritual. Kedua, diversifikasi ekonomi mutlak diperlukan. Ketergantungan tunggal pada pariwisata membuat Bali rapuh saat pandemi, dan kerentanan itu bisa terulang. Sektor pertanian, kerajinan rakyat, perikanan, serta ekowisata berbasis komunitas harus dikembangkan utuh sebagai fondasi diversifikasi ekonomi.

Ketiga, kesakralan budaya Bali harus tetap dijaga. Upacara adat dan pura tidak bisa diperlakukan sebagai komoditas tontonan. Sebagai pusat spiritualitas, Bali membutuhkan kode etik wisata spiritual yang dapat diterapkan secara internasional, memastikan wisatawan menghormati nilai lokal. Keempat, teknologi perlu dimanfaatkan sebagai alat bantu. Sistem big data pariwisata berbasis sensor dan aplikasi digital bisa membantu pemerintah memantau jumlah pengunjung di satu kawasan, dan menyalurkan arus ke destinasi alternatif secara real time. Kelima, generasi muda Bali adalah aktor kunci masa depan. Dengan kreativitas dan kemahiran digital, anak-anak muda bisa menghadirkan narasi baru Bali, bukan hanya sebagai tempat hiburan massal, tetapi sebagai rumah bagi harmoni ekologis, sosial, dan spiritual yang diakui dunia.

Menghadapi fenomena *overtourism*, kepemimpinan kolektif sangat dibutuhkan. Pemerintah daerah mesti memandu proses melalui *task force* lintas pihak yang melibatkan pemerintah pusat, desa adat sebagai penjaga budaya, pelaku industri sebagai agen implementasi, serta akademisi dan media sebagai pengawas kritis. Masyarakat harus ditempatkan di pusat manfaat, bukan hanya objek, sementara wisatawan perlu terus diberi edukasi tentang etika berkunjung. Dengan manajemen pariwisata berbasis daya dukung, penguatan ekonomi lokal, dan penghormatan terhadap spiritualitas Bali, pulau ini masih punya peluang besar untuk mengembalikan harmoni.

Akhirnya, dinamika Bali pasca pandemi memperlihatkan sebuah paradoks besar. Bali sebagai destinasi dunia tengah menanggung beban berat akibat *overtourism*, namun di saat yang sama masih memiliki peluang membangun arah baru. Dengan strategi terukur, keterlibatan masyarakat, dan visi jangka panjang, Bali dapat menghindari krisis total. Namun jika langkah-langkah tersebut diabaikan, fragmentasi wilayah hanya akan menjadi domino yang menjatuhkan Bali dari pulau yang sakral dan harmonis menjadi destinasi massal yang kehilangan jiwanya [35].

PARIWISATA BALI DI PERSIMPANGAN: ANTARA *OVERTOURISM*, TRANSFORMASI, DAN KEBERLANJUTAN



Pariwisata Bali hari ini berada di titik krusial, sebuah persimpangan yang menentukan apakah ia akan berani bertransformasi menuju pariwisata berkelanjutan atau kembali terjebak dalam jebakan lama berbasis *mass tourism* yang rapuh. Pandemi COVID-19 telah menjadi ujian terbesar dalam sejarah pariwisata Bali, ketika denyut utama ekonomi hampir sepenuhnya berhenti. Hotel kosong, pekerja pariwisata dirumahkan, usaha mikro gulung tikar, hingga rantai pasok hancur. Krisis ini seharusnya menjadi alarm keras tentang betapa rentannya sistem ekonomi Bali yang terlalu bergantung pada

sektor tunggal pariwisata. Akan tetapi, sejak tahun 2023 hingga 2025, ketika pemulihan mulai terasa dan jumlah kunjungan wisatawan kembali meningkat, euforia muncul secara berlebihan. Banyak pihak kembali merayakan angka kunjungan seolah itu penanda kemenangan, padahal wajah dan perilaku wisatawan global telah berubah secara fundamental. Wisatawan masa kini tidak sekadar mencari hiburan singkat, tetapi menuntut pengalaman autentik, keberlanjutan lingkungan, serta nilai budaya yang hidup. Jika Bali hanya mengejar angka kunjungan, maka sesungguhnya pulau ini sedang menggali kuburnya sendiri dalam paradoks nostalgia masa lalu [34].

Perubahan tren wisatawan global hari ini harus dibaca sebagai tamparan keras bagi arah pembangunan pariwisata Bali. Era ketika jumlah kunjungan dianggap ukuran keberhasilan sesungguhnya telah usang. Wisatawan modern datang bukan hanya untuk berfoto di destinasi populer, tetapi juga untuk merasakan pengalaman nyata dalam bentuk *wellness tourism*, ekowisata, wisata budaya, maupun interaksi autentik dengan komunitas lokal. Mereka menuntut keterhubungan dengan ruang hidup, kritis terhadap isu lingkungan, dan selektif terhadap destinasi yang peduli pada keberlanjutan serta menjaga nilai kultural. Ironisnya, Bali masih terlihat terjebak dalam pola lama yang mengejar kuantitas, bukannya kualitas. Jika pemerintah daerah, industri, dan masyarakat tidak segera menanamkan prinsip keberlanjutan secara konsisten, maka Bali berisiko menjadi panggung ilusi: indah dengan brosur promosi, tetapi rapuh dalam kenyataan.

Ancaman terbesar yang kini kembali menghantui adalah fenomena *overtourism*. Sebelum pandemi, kawasan Kuta, Seminyak, dan Ubud sudah menjadi laboratorium nyata dari krisis pariwisata massal. Infrastruktur lumpuh oleh kemacetan, gunung sampah menghantui wajah Bali, ketersediaan air bersih semakin menurun, dan masyarakat lokal kehilangan kenyamanan dalam ruang hidupnya. Kini, meskipun kedatangan wisatawan belum sepenuhnya menyamai level sebelum pandemi, tanda-tanda ke arah itu mulai terasa. Bali kembali berdiri di jalan yang sama: apakah akan mengulangi kesalahan lama atau berani bertransformasi. *Overtourism* ibarat bayangan masa lalu yang muncul lagi, membawa risiko domino berupa ketidaknyamanan wisatawan, penurunan daya saing global, hingga

degradasi identitas sosial-budaya. Pemerataan destinasi bukan lagi pilihan tambahan, melainkan keharusan strategis. Tanpa penyebaran arus kunjungan yang merata ke Bali Utara dan Timur, Bali Selatan akan terus tercekik oleh popularitasnya sendiri.

Selain *overtourism*, persoalan lingkungan di Bali hari ini telah berkembang menjadi bom waktu yang terus berdetak. Pertumbuhan industri pariwisata yang tidak terkendali berjalan paralel dengan meningkatnya tekanan terhadap sumber daya alam. Sampah plastik menumpuk di sungai dan pesisir pantai, hutan hijau terus dikonversi menjadi hunian wisata, sumber daya air terkuras demi hotel dan vila, sementara warga lokal di banyak desa bahkan kesulitan memenuhi kebutuhan dasar air bersih. Ironi semacam ini justru semakin menunjukkan ketimpangan struktural pariwisata Bali: keuntungan dinikmati investor dan pelaku usaha besar, sementara risiko ekologis ditanggung masyarakat lokal. Bali sebagai sebuah pulau kecil dengan daya dukung terbatas seharusnya dipandang dari kacamata ekologi, bukan sekadar ruang kosong untuk konsumsi pariwisata massal. Jika daya dukung lingkungan runtuh, maka bukan hanya warga lokal yang menderita, melainkan hilang pula pesona Bali yang menjadi wajah pariwisatanya.

Dampak lain yang tak kalah mengkhawatirkan adalah degradasi budaya lokal. Budaya Bali yang seharusnya menjadi sumber kekuatan pariwisata kini berada di ujung tanduk. Alih-alih dipelihara sebagai warisan hidup, budaya justru kerap dikemas semata sebagai tontonan untuk memuaskan wisatawan. Ritual, tari, hingga simbol-simbol sakral perlahan tereduksi menjadi komoditas hiburan yang homogen, kehilangan kedalaman makna spiritualnya. Padahal budaya adalah magnet utama yang membedakan Bali dari destinasi lain di dunia. Jika identitas Bali semakin larut dalam arus homogenisasi budaya global, maka kekuatan sejatinya bakal hilang. Filosofi Tri Hita Karana yang mengajarkan keseimbangan antara manusia, sesama, dan alam, justru terdistorsi oleh logika kapitalistik jangka pendek. Pariwisata yang tercerabut dari budaya adalah pepesan kosong: memiliki kemasan indah, tetapi tidak lagi memberi isi yang penuh nilai.

Selain persoalan substansi budaya, terdapat ironi besar dalam kesenjangan antara riset akademik dan praktik lapangan. Setiap tahun berbagai penelitian dilakukan tentang pengelolaan sampah, pelestarian budaya, tata kelola pariwisata, hingga strategi digitalisasi. Akan tetapi, sebagian besar riset hanya berhenti sebagai laporan atau publikasi tanpa pernah benar-benar ditransformasikan menjadi kebijakan atau aksi nyata. Hasil penelitian tidak terintegrasi dengan kebijakan birokrasi, sementara inovasi teknologi pariwisata masih stagnan. Hal ini menunjukkan lemahnya sinergi antara akademisi, pemerintah, industri, dan masyarakat. Akibatnya, pembangunan pariwisata Bali lebih sering reaktif, berbasis trial and error, tanpa visi jangka panjang yang solid. Bali membutuhkan jembatan nyata agar riset tidak lagi menjadi arsip mati, melainkan motor inovasi yang memberi arah jelas bagi praktik di lapangan.

Di tengah problematika itu, sumber daya manusia (SDM) pariwisata Bali sesungguhnya sangat melimpah. Universitas dan sekolah pariwisata terus mencetak ribuan lulusan setiap tahun. Akan tetapi, ironi muncul ketika peluang kerja yang tersedia terbatas, dan kompetisi antar lulusan semakin ketat. Hal ini memperlihatkan bahwa pendidikan pariwisata Bali masih lebih banyak berfungsi sebagai pabrik ijazah, ketimbang pusat lahirnya agen perubahan. Seharusnya universitas memiliki tanggung jawab moral dan strategis untuk menyiapkan generasi muda yang tidak sekadar mahir teknis, tetapi juga kritis, adaptif, melek digital, dan memiliki kesadaran budaya serta tanggung jawab sosial. Kurikulum harus berubah agar lebih fleksibel, memasukkan literasi digital, keberlanjutan, *problem-solving*, dan keterampilan lintas budaya. Program magang, penelitian berbasis komunitas, hingga *experiential learning* harus diintensifkan untuk menjembatani teori dengan realita industri. Tanpa transformasi pendidikan tinggi, Bali akan terus menghasilkan lulusan yang hanya siap menjadi penonton, bukan pemain utama di “panggung besar” pariwisata dunia.

Di era revolusi digital, disrupsi teknologi dan kecerdasan buatan (AI) semakin tidak terelakkan bagi industri pariwisata global. Promosi konvensional dan layanan manual sudah tidak relevan lagi. Wisatawan kini menuntut kecepatan, efisiensi, personalisasi, dan keterhubungan digital. Mereka mencari informasi, memesan transportasi, memilih akomodasi,

bahkan berbagi pengalaman secara daring dalam hitungan detik. *Data analytics*, aplikasi reservasi, strategi digital marketing, hingga penggunaan AI kini bukan lagi pelengkap, tetapi pondasi utama sistem pariwisata. Institusi pendidikan di Bali harus menyiapkan mahasiswa untuk akrab dengan teknologi ini agar mampu bersaing. Jika hal ini tidak segera dilakukan, bukan hanya pariwisata Bali yang tertinggal, tetapi juga tenaga kerja lokal yang terpinggirkan dalam persaingan pasar global.

Ke depan, solusi bagi Bali tidak mungkin parsial. Kolaborasi lintas sektor adalah jalan utama. Pemerintah, industri, akademisi, masyarakat, dan wisatawan harus diposisikan sebagai bagian dari ekosistem keberlanjutan. Pemerataan destinasi menjadi langkah penting agar beban pariwisata tidak menumpuk di Bali Selatan. Bali Utara dan Timur perlu mendapat porsi pembangunan turisme yang terencana, dikawal dengan daya dukung ekologis dan kapasitas sosial. Dalam kerangka ini, desa adat wajib diperkuat posisinya agar tidak sekadar jadi pelengkap, tetapi aktor utama yang mengawal pariwisata berbasis nilai lokal. Disrupsi digital juga perlu dipadukan dengan penguatan nilai budaya agar teknologi tidak terlepas dari akar identitas Bali.

Akhirnya, Bali berada pada persimpangan yang menentukan. *Overtourism*, kerusakan lingkungan, dan komersialisasi budaya adalah tantangan nyata yang menunggu jawaban. Wisatawan global kini menuntut autentisitas, keberlanjutan, dan tanggung jawab sosial. Jika Bali hanya kembali mengejar angka kunjungan, maka daya tarik sejati pulau ini akan terkikis perlahan. Akan tetapi, jika Bali berani bertransformasi dengan memberdayakan riset, melahirkan SDM adaptif berbasis teknologi dan budaya, memperkuat desa adat, serta mengedepankan diversifikasi ekonomi, maka kritik tentang rapuhnya sistem lama bisa diubah menjadi peluang emas untuk menciptakan masa depan yang tangguh. Bali berpeluang menjadi laboratorium dunia untuk praktik pariwisata berkelanjutan, sekaligus memberi inspirasi global tentang bagaimana sebuah destinasi tidak hanya menjual keindahan alam dan budaya, tetapi juga menawarkan jalan menuju harmoni ekologis, sosial, dan spiritual di era modern [36].

TAGAR #KABURAJADULU: EKSPRESI KEKECEWAAN, TANTANGAN PENDIDIKAN, DAN ARAH MASA DEPAN GENERASI MUDA INDONESIA



Fenomena viral tagar **KaburAjaDulu di media sosial Indonesia telah menjadi cermin keresahan generasi muda terhadap kondisi sosial, ekonomi, dan politik tanah air. Frasa sederhana tersebut bukan sekadar gurauan atau ekspresi spontan, melainkan representasi dari kekecewaan kolektif yang mendalam terhadap realitas yang mereka hadapi sehari-hari. Bagi sebagian kalangan, tagar ini dianggap sebagai bentuk ketidakloyalan nasionalisme. Akan tetapi, jika dicermati lebih kritis,

sebetulnya esensi tagar ini bukanlah penolakan terhadap identitas kebangsaan, melainkan kritik terhadap kegagalan negara dalam menyediakan ruang hidup yang layak, adil, dan bermartabat bagi warganya, khususnya generasi produktif. Jadi, #KaburAjaDulu merupakan alarm sosial yang menuntut refleksi serius dari pemerintah, elite politik, akademisi, dan seluruh pemangku kebijakan di Indonesia [37].

Dalam perspektif sosiologi, ekspresi meninggalkan tanah air atau “kabur” tidak dapat semata-mata dimaknai sebagai sikap antipati terhadap bangsa. Fenomena ini lebih tepat dipandang sebagai bentuk *exit strategy*, sebuah pilihan sosial dalam menghadapi ketidakpuasan terhadap sistem yang gagal memberikan kepastian hidup. Generasi muda menggunakan tagar ini sebagai media simbolik untuk mengartikulasikan frustrasi mereka terhadap kondisi yang stagnan: upah minimum yang rendah, lapangan kerja yang sempit, korupsi yang merajalela, praktik politik yang transaksional, serta ketidakpastian hukum. Realitas tersebut melahirkan perasaan bahwa potensi mereka lebih dihargai di luar negeri ketimbang di tanah sendiri. Di sini, #KaburAjaDulu harus dibaca sebagai tanda bahwa kontrak sosial antara negara dan warganya sedang mengalami erosi. Jika negara gagal memperbaiki kepercayaan generasi muda, maka wajar bila sebagian mereka memilih jalur individualistik dengan merantau ke luar negeri untuk mencari kehidupan yang lebih stabil.

Faktor ekonomi menjadi pemicu utama tersulutnya fenomena ini. Banyak kaum muda menilai biaya hidup di Indonesia tidak sebanding dengan gaji yang diterima. Tenaga kerja terampil dan lulusan perguruan tinggi merasa talenta mereka dihargai lebih murah dibandingkan negara lain. Akibatnya, mereka merasakan disinsentif untuk tinggal dan membangun negeri. Selain persoalan gaji, kesenjangan sosial juga menjadi alasan kuat. Akses pendidikan dan kesempatan kerja tidak merata, menciptakan frustrasi bagi mereka yang berasal dari kelompok menengah bawah. Tidak jarang, mereka melihat bahwa keberhasilan seseorang lebih ditentukan oleh koneksi politik dan ekonomi ketimbang meritokrasi dan kerja keras. Hal ini melanggengkan ketidakadilan struktural yang memperluas jurang antara “yang punya” dan “yang tidak punya”.

Ketidakpastian politik menambah daftar panjang masalah yang mendorong generasi muda untuk melontarkan #KaburAjaDulu. Situasi demokrasi kerap dianggap tidak sehat; praktik politik uang, korupsi di lembaga negara, hingga sikap elitis yang jauh dari kepentingan rakyat memperburuk kepercayaan pada sistem. Dalam kondisi seperti ini, memilih “kabur” bisa dianggap sebagai bentuk protest voting non-elektoral. Alih-alih mengungkapkan ketidakpuasan melalui kotak suara, mereka memilih mengekspresikannya dalam bentuk keinginan migrasi. Ironisnya, migrasi untuk mencari peluang yang lebih baik bukan hanya fenomena lokal Indonesia, tetapi juga fenomena global. Dari India hingga Filipina, dari Meksiko hingga Brasil, banyak kaum muda yang memilih bekerja, belajar, dan membangun peluang di luar negeri. Hal ini menunjukkan problem struktural dalam sistem migrasi global, sekaligus menegaskan bahwa #KaburAjaDulu tidak otomatis melekat pada label “tidak cinta tanah air”. Sebaliknya, diaspora sering kali menjadi aset berharga dalam mendukung pembangunan negara asal.

Meski sebagian pihak menolak filosofi tagar ini karena dinilai melemahkan nasionalisme, penting untuk diingat bahwa nasionalisme sejati bukanlah soal tetap tinggal semata, melainkan tetap peduli, tetap memberi kontribusi, dan tetap berjejaring meski berada di perantauan. Banyak diaspora Indonesia yang membuktikan hal ini. Mereka tetap menyumbang devisa, mentransfer pengetahuan, hingga menggagas jejaring inovasi global. Jadi, fenomena #KaburAjaDulu seharusnya tidak dibaca semata sebagai sikap meninggalkan bangsa, melainkan kritik sosial yang mengingatkan negara agar lebih inklusif dan pro-rakyat, sehingga generasi muda tidak merasa harus meninggalkan tanah air untuk bisa maju.

Dalam konteks pendidikan, #KaburAjaDulu dapat dimaknai sebagai refleksi dari kekecewaan terhadap sistem pendidikan tinggi Indonesia. Dengan jumlah lebih dari 5.000 perguruan tinggi, Indonesia terlihat memiliki potensi besar, namun ironisnya, hanya sekitar 20 universitas yang masuk ke dalam peringkat dunia. Keterbatasan kualitas ini menjadi hambatan serius dalam menciptakan sumber daya manusia yang sesuai dengan tuntutan global. Generasi muda merasa bahwa ijazah

yang mereka peroleh sering kali tidak sejalan dengan kebutuhan industri, sehingga peluang kerja berkualitas rendah. Hal ini memperjelas gap antara pendidikan tinggi dan realitas dunia kerja. Riset akademik banyak dilakukan, tetapi jarang sampai pada implementasi kebijakan nyata. Universitas pun sering kali gagal menjadi pusat inovasi yang membekali mahasiswa dengan keterampilan digital, literasi global, dan kesadaran kritis.

Terdapat sisi positif dalam polemik ini. Dengan kepemimpinan baru di Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi, yang kini ditangani figur pengganti Prof. Satryo, ada harapan muncul kebijakan yang lebih progresif. Kepemimpinan baru membuka ruang perubahan dengan fokus pada investasi pendidikan tinggi, memperluas kolaborasi dengan sektor swasta, dan melanjutkan kurikulum merdeka yang adaptif. Jika dijalankan secara konsisten, kebijakan ini dapat menciptakan ekosistem pendidikan yang tidak hanya menghasilkan tenaga siap kerja, tetapi juga memberi inspirasi agar generasi muda berani mengambil peran sebagai agen transformasi sosial. Ada optimisme bahwa pendidikan dapat kembali berfungsi sebagai saluran mobilitas sosial yang efektif, bukan sekadar pabrik ijazah yang terlepas dari realitas global.

Namun dalam melihat peran pendidikan tinggi, kita juga perlu kritis. Ada argumen yang menegaskan bahwa pendidikan formal bukanlah satu-satunya jalur menuju kesuksesan. Jalan vokasi, pelatihan praktis, dan pengalaman lapangan sering kali lebih relevan dalam menciptakan daya saing di dunia kerja kontemporer. Profesional tanpa gelar sarjana pun sudah banyak yang sukses berkat keterampilan praktis dan kemampuan beradaptasi. Oleh karena itu, pendidikan tinggi hendaknya tidak ditempatkan dalam posisi absolut, tetapi harus berjalan seiring dengan pendidikan vokasi dan pembelajaran praktis. Yang terpenting adalah menciptakan sistem inklusif yang membuka kesempatan bagi semua individu untuk berkembang, baik melalui universitas, politeknik, lembaga pelatihan, maupun jalur kerja langsung.

Tagar #KaburAjaDulu akhirnya harus dilihat bukan sebagai ancaman, tetapi sebagai refleksi kegagalan struktural yang wajib dijawab dengan kebijakan progresif. Pemerintah pusat, provinsi, hingga

kota/kabupaten harus menjadikannya peringatan serius bahwa generasi muda tidak merasa aman dan sejahtera dalam sistem yang ada. Jika dibiarkan, Indonesia berisiko menghadapi *brain drain*, kehilangan talenta terbaik yang memilih membangun kehidupan di luar negeri. Akan tetapi, jika dijawab dengan kebijakan yang tepat, #KaburAjaDulu justru dapat menjadi momentum perbaikan. Pemerintah perlu segera memperluas lapangan kerja yang layak, meningkatkan kualitas pendidikan, memperbaiki akses kesehatan dan perumahan, serta menegakkan tata kelola politik yang lebih demokratis dan bersih.

Banyak negara memberi contoh bahwa diaspora yang awalnya “kabur” justru bisa menjadi modal pembangunan. Tiongkok pada awal tahun 2000-an memanggil pulang para penelitinya yang bertebaran di Amerika Serikat dan Eropa. Hasilnya, dalam kurang dari satu dekade, negara itu melesat menjadi kekuatan riset dan teknologi dunia. Indonesia tidak menutup kemungkinan mengikuti pola serupa, namun langkah pertama harus dimulai di dalam negeri: menciptakan ekosistem yang membuat generasi muda merasa dihargai dan diberi ruang berkontribusi.

Akhirnya, #KaburAjaDulu adalah fenomena sosial yang kompleks, refleksi dari akumulasi kekecewaan generasi muda terhadap sistem yang belum berpihak. Ia bukan sekadar slogan apatis, tetapi simbol untuk menggugat struktur negara agar lebih inklusif. Tagar ini memaksa kita berpikir ulang tentang makna nasionalisme, tentang pentingnya pendidikan tinggi yang relevan, serta tentang kebutuhan menciptakan ekosistem politik, ekonomi, dan sosial yang adil. Jika negara serius menjawab pesan yang tersirat di balik tagar tersebut, generasi muda Indonesia tidak hanya akan berhenti berpikir untuk “kabur”, tetapi akan menjadi motor utama dalam membangun bangsa. Sebaliknya, jika diabaikan, #KaburAjaDulu bukan hanya akan menjadi ekspresi frustrasi sesaat, melainkan akan berubah menjadi kenyataan pahit berupa hilangnya kepercayaan generasi muda terhadap tanah air mereka sendiri [37] [38].

BALI 67 TAHUN, INDONESIA 80 TAHUN: ANTARA PERAYAAN DAN EVALUASI DIRI DI TENGAH KRISIS MULTIDIMENSI



Pada bulan Agustus 2025, Provinsi Bali bersiap merayakan Hari Ulang Tahun ke-67 yang bertepatan dengan momentum nasional Hari Ulang Tahun ke-80 Kemerdekaan Republik Indonesia. Dua peristiwa bersejarah ini seharusnya menjadi ruang euforia kolektif dan penguatan identitas, namun kenyataannya juga menjadi latar refleksi mendalam atas arah dan kualitas pembangunan yang telah dicapai. Bali di usia 67 tahun bukan lagi daerah muda yang boleh sekadar merayakan dengan pesta dan parade, melainkan sebuah entitas dewasa yang wajib menguji konsistensinya sebagai destinasi

dunia sekaligus lumbung kebudayaan Nusantara. Indonesia pada usia 80 tahun pun tidak berada pada masa pencarian identitas lagi, melainkan pada babak menentukan: apakah berhasil memperkuat demokrasi, keadilan sosial, dan keberlanjutan, atau justru mundur terjebak krisis multidimensi [39].

Isu pertama yang menjadi sorotan serius adalah krisis sampah dan penutupan TPA Suwung. Penutupan TPA terbesar di Bali per 1 Agustus 2025 bukanlah kebijakan rutin teknokratis, melainkan alarm keras yang menohok kesadaran kolektif. TPA Suwung telah lama menanggung beban hingga ratusan ton sampah setiap hari, menggunung dan menimbulkan pencemaran udara serta air tanah. Dengan kapasitas yang sudah jenuh, ancaman hukum melekat pada pejabat lingkungan hidup yang dianggap lalai. Perintah gubernur untuk mengelola sampah organik secara mandiri di rumah tangga adalah upaya desentralisasi tanggung jawab, namun lemahnya infrastruktur pengolahan, sosialisasi yang minim, serta ketidakpedulian publik membuat kebijakan tersebut terasa belum maksimal. Ironi muncul ketika dunia masih mengagungkan Bali sebagai destinasi hijau dan spiritual, padahal di lapangan krisis sampah menguak sisi gelap pariwisata massal dan gaya konsumsi modern yang tidak terkendali.

Tantangan berikutnya adalah pariwisata Bali yang semakin dihantui fenomena *overtourism*. Masuknya Bali dalam daftar “No List” Fodor’s 2025 merupakan tamparan keras sekaligus wake-up call global. Bali tidak lagi dipandang sebagai surga semata, melainkan destinasi yang terjebak dalam macet, tumpukan sampah plastik, pembangunan hotel dan vila yang tak terkendali, serta ketimpangan ekonomi antar wilayah. Hal ini menantang filosofi Tri Hita Karana yang menuntut keseimbangan manusia dengan Tuhan, sesama manusia, dan alam. Ketika wisatawan menumpuk di Bali Selatan sementara Bali Utara, Barat, dan Timur cenderung tertinggal, maka distribusi manfaat pariwisata jelas timpang. Upaya mereduksi *overtourism* dengan menggeser wisatawan menuju kawasan lain hanya akan berhasil jika dibarengi dengan pembangunan infrastruktur, promosi seimbang, serta penegakan hukum tegas terhadap praktik ilegal seperti vila tanpa izin dan pelanggaran tata ruang yang melibatkan investor asing. Jika tidak ditangani,

Bali sebagai “Pulau Dewata” akan sekadar menjadi korban popularitasnya sendiri.

Regulasi dan penegakan hukum kini menjadi semakin vital. Surat Edaran Gubernur No. 07 Tahun 2025 yang menuntut wisatawan untuk bertransaksi dengan Rupiah, menggunakan jasa transportasi resmi, serta menghormati budaya lokal adalah bentuk koreksi setelah maraknya perilaku wisatawan asing yang melanggar norma sosial. Kasus turis asing berbuat gaduh, berkelahi dengan petugas keamanan, hingga mempermainkan sesajen memperlihatkan degradasi penghormatan lintas budaya. Kehadiran tim khusus untuk menindak pelanggaran adalah respon tepat, namun keberlanjutan dari langkah ini harus diawasi. Budaya Bali bukanlah ornamen dekoratif semata, melainkan sistem nilai hidup. Jika norma adat dilecehkan secara terus-menerus, maka identitas Bali akan tergadaikan hanya untuk kepuasan turisme massal. Seruan tokoh nasional, termasuk Megawati Soekarnoputri, agar Bali terus menjaga kelestarian dan tradisi menemukan relevansinya pada pusaran krisis jati diri pariwisata Bali hari ini.

Aspek transportasi juga menambah daftar masalah. Serangkaian kecelakaan laut di Sanur yang menelan korban jiwa wisatawan domestik maupun internasional telah menimbulkan *travel advisory* dari negara mitra seperti Australia. Peringatan keras ini memukul citra Bali sebagai destinasi aman dan nyaman. Infrastruktur maritim Bali tampak rapuh, keselamatan sering dikompromikan demi keuntungan musim wisata, sementara kapasitas pengawasan dinas terkait terbatas. Tekanan maksimum pada bulan Agustus sebagai puncak musim kunjungan memperburuk kondisi: kemacetan mencapai titik parah, okupansi hotel penuh sesak, pasokan air menurun, sampah menumpuk, hingga layanan kesehatan kewalahan. Tanpa manajemen berbasis data dan kebijakan jangka panjang, Bali akan terus terjebak dalam pola “tambal sulam” yang hanya memadamkan gejala sementara tanpa menyentuh akar permasalahan.

Bidang penegakan hukum pun memperlihatkan wajah kabur. Bali tidak steril dari sindikat narkoba, pemerasan aparat terhadap warga dan wisatawan, hingga pelanggaran izin usaha yang kronis. Satpol PP memang melakukan penindakan usaha paralayang tanpa izin, dan BNNP Bali bersama Kementerian Hukum aktif memberantas jaringan narkoba. Akan

tetapi, hal ini baru langkah fragmentaris. Agar tidak sebatas simbolisme, konsistensi harus memastikan bahwa penegakan hukum berjalan bukan hanya ketika ada sorotan media, melainkan sebagai rutinitas berkelanjutan. Penolakan warga terhadap pembangunan vila di kawasan konservasi adalah penanda kesadaran sipil Bali bahwa ruang hidup dan ekosistem tidak boleh diperjualbelikan secara sembarangan. Masyarakat kini menjadi lonceng moral tentang betapa pentingnya keseimbangan antara pembangunan dan pelestarian.

Selain krisis sosial dan politik, faktor alam juga tetap menjadi bagian dari kerentanan Bali. Erupsi Gunung Lewotobi di Flores, meski tidak berada di Bali, berdampak besar karena menyebabkan sejumlah penerbangan ke dan dari Bali dibatalkan. Begitu juga kebakaran hutan bambu di Klungkung memperlihatkan betapa sensitifnya Bali terhadap gangguan ekologis. Bandara Ngurah Rai memang tetap beroperasi normal, tetapi kejadian ini memperingatkan semua pihak bahwa sistem pariwisata Bali sangat rapuh di bawah tekanan bencana alam. Mitigasi bencana harus terintegrasi dan adaptif, bukan sekadar prosedural, sebab ketahanan pariwisata harus menyertakan keselamatan warga maupun wisatawan.

Akan tetapi, di antara berbagai krisis, perayaan HUT ke-67 Provinsi Bali dan HUT ke-80 Indonesia tetap dijadikan momentum untuk menyatukan kembali nilai kebangsaan dan kebalian dalam konteks kekinian. Pemerintah provinsi hingga kabupaten/kota menggelar kegiatan perayaan, mulai dari aksi sosial, upacara adat, hingga gerakan pelestarian laut. Semua itu diarahkan untuk mengingatkan kembali masyarakat bahwa Bali adalah rumah spiritual, budaya, dan identitas sekaligus destinasi dunia. Tema nasional perayaan HUT ke-80 Kemerdekaan RI, “Bersatu Berdaulat, Rakyat Sejahtera, Indonesia Maju,” menggema ke dalam denyut kehidupan Bali, memanggil semua pihak untuk duduk bersama merumuskan arah pembangunan yang tidak sekadar populis, melainkan substantif.

Evaluasi diri menjadi kata kunci dari semua refleksi ini. Pada usia 67 tahun, Bali membawa beban moral dan konstitusional untuk menjadi miniatur harmoni Indonesia: mercusuar pelestarian lingkungan, teladan tata kelola pariwisata, dan benteng budaya Nusantara. Apakah Bali sanggup memperkuat identitas budaya di tengah komersialisasi? Apakah ia bisa

mempertemukan kembali harmoni antara manusia dengan Tuhan, manusia dengan sesama, dan manusia dengan alam sebagaimana dogma Tri Hita Karana? Pertanyaan tersebut bukan lagi wacana abstrak, melainkan tugas nyata.

Jika tidak dilakukan perubahan mendasar, pariwisata Bali akan terus dirayu keuntungan jangka pendek, sementara krisis sosial dan ekologis menyeret pulau ini menuju kehilangan makna. Sebaliknya, jika evaluasi ini benar-benar dihayati, Bali dapat menata ulang *blueprint* pembangunan dengan bertumpu pada akar tradisi, kesadaran kritis, gotong royong, dan keberanian mengambil keputusan besar. Momentum ulang tahun harus dimaknai bukan sebagai rutinitas seremonial, melainkan titik balik untuk pembaruan menuju masa depan yang lebih berkeadilan, lebih ekologis, dan lebih berbudaya.

Jadi, Bali di usianya yang ke-67 dan Indonesia di usia ke-80 menatap ke depan dengan tantangan sekaligus peluang. Dua momentum besar ini bukan sekadar simbol bertambah umur, tetapi kesempatan untuk memperbaiki arah, menyeimbangkan pragmatisme pariwisata dengan filosofi kebudayaan, serta menanamkan keberlanjutan sebagai inti dari kemajuan. Dalam refleksi ini tersimpan harapan bahwa Bali tidak sekadar menjadi Pulau Dewata dalam imajinasi turis, tetapi spiritual compass yang menuntun pembangunan Nusantara di tengah dunia yang kian rapuh oleh krisis ekologi dan moralitas [40].

PARADOKS PARIWISATA BALI: KUNJUNGAN MENINGKAT, HUNIAN HOTEL MENURUN, DAN TANTANGAN TATA KELOLA BERKELANJUTAN



Fenomena pariwisata Bali pada tahun 2024 memperlihatkan paradoks yang menarik sekaligus mengundang refleksi mendalam. Data resmi menunjukkan bahwa Bali berhasil menyambut lebih dari 6,3 juta kunjungan wisatawan mancanegara, meningkat sekitar 20 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Angka ini pada satu sisi tentu menunjukkan tanda-tanda pemulihan pariwisata global pasca pandemi, memperlihatkan kepercayaan wisatawan internasional bahwa Bali masih menjadi destinasi unggulan

dunia. Akan tetapi, di sisi lain, paradoks muncul ketika rata-rata Tingkat Penghunian Kamar (TPK) hotel berbintang justru mengalami penurunan. Alih-alih menikmati dampak positif dari lonjakan jumlah kunjungan wisatawan, banyak hotel berbintang menghadapi kenyataan berbeda: kamar kosong, tekanan finansial, dan persaingan yang semakin ketat. Fenomena ini menegaskan bahwa dinamika pariwisata Bali kini tidak lagi dapat hanya diukur dari jumlah wisatawan, melainkan juga dari distribusi manfaat, perubahan perilaku konsumen, serta arah keberlanjutan industri pariwisata itu sendiri [41] [42].

Salah satu faktor penting yang menjelaskan paradoks ini adalah berubahnya preferensi wisatawan terhadap akomodasi. Dalam beberapa tahun terakhir, tren global menunjukkan pergeseran menuju akomodasi alternatif, seperti villa, *guesthouse*, *homestay*, hingga *coliving spaces*. Wisatawan Bali, khususnya generasi muda *traveler* dan digital nomad, lebih menyukai akomodasi non-hotel karena dianggap lebih privat, fleksibel, ekonomis, serta mampu memberikan pengalaman lebih autentik. Desa-desa wisata di Ubud, Canggu, dan kawasan Bali Utara semakin banyak menyediakan ruang tinggal berbasis komunitas, yang terkoneksi dengan gaya hidup kerja jarak jauh. Bahkan, fenomena *coliving* yang populer di Canggu sering kali dijuluki “kampus Rusia” karena menjadi magnet masyarakat internasional yang bekerja secara remote di Bali. Pergeseran ini menggambarkan bahwa wisatawan masa kini bukan hanya mencari tempat menginap, tetapi juga mencari lingkungan hidup yang bisa menyatu dengan gaya hidup mereka, termasuk kebutuhan akan suasana kreatif, ruang kerja bersama, dan pengalaman berbasis budaya lokal.

Selain faktor preferensi, overkapasitas hotel berbintang di Bali juga memperburuk situasi. Meski pemerintah provinsi telah memberlakukan moratorium pembangunan hotel baru di beberapa wilayah strategis, kenyataannya jumlah hotel berbintang yang eksisting sudah sangat tinggi. Bali, khususnya wilayah Badung, Denpasar, dan Gianyar, menghadapi situasi di mana jumlah pasokan kamar jauh melebihi permintaan riil wisatawan yang datang. Akibatnya, persaingan antarkelompok hotel semakin intens. Banyak hotel terpaksa menurunkan harga demi menjaga okupansi, tetapi langkah ini tidak mampu menahan tren penurunan TPK

secara substansial. Fenomena ini menjelaskan bahwa industri pariwisata tidak hanya menghadapi tantangan permintaan, tetapi juga masalah pengendalian suplai yang tidak terkendali di masa lalu.

Durasi tinggal wisatawan juga menjadi faktor yang signifikan. Dalam era digital, banyak wisatawan yang memilih tinggal lebih lama di Bali, terutama kalangan digital nomad, pekerja jarak jauh, dan pelaku bisnis kreatif. Akan tetapi, wisatawan dengan tipe seperti ini umumnya tidak memilih hotel berbintang sebagai basis tinggal mereka. *Homestay*, vila, *guesthouse*, atau akomodasi jangka panjang dirasa lebih ekonomis, nyaman, dan sesuai dengan pola aktivitas sehari-hari. Hotel berbintang, dengan harga relatif tinggi dan layanan yang lebih kaku, tidak selalu sesuai dengan kebutuhan wisatawan yang tinggal berminggu-minggu bahkan berbulan-bulan. Kecenderungan ini memperlihatkan perbedaan orientasi pasar pariwisata kontemporer: dari wisatawan massal jangka pendek menuju wisatawan berprofil khusus dengan preferensi jangka panjang.

Implikasi dari penurunan TPK hotel berbintang tentu terasa langsung terhadap perekonomian daerah. Hotel berbintang selama ini merupakan salah satu penyumbang besar Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui pajak hotel dan restoran. Ketika okupansi menurun, kontribusi pajak daerah juga ikut tereduksi. Sementara itu, meskipun akomodasi alternatif seperti *homestay* dan villa tetap mendatangkan pemasukan pajak melalui skema pajak rumah sewa atau villa, sistem pengawasan dan kepatuhan pajak untuk akomodasi non-hotel sering kali jauh lebih lemah. Banyak properti informal yang luput dari pendataan resmi, sehingga potensi penerimaan daerah tidak maksimal. Hal ini memperlihatkan adanya tantangan dalam tata kelola akomodasi pariwisata: bagaimana pemerintah mampu menutupi *lost potential* dari pajak akomodasi informal sekaligus memberikan insentif agar mereka patuh dalam sistem resmi tanpa menghambat pertumbuhan sektor.

Akan tetapi, fenomena ini juga tidak sepenuhnya negatif. Dari sudut pandang diversifikasi ekonomi, pergeseran tren wisatawan yang memilih akomodasi alternatif membuka peluang baru, baik bagi pengusaha lokal maupun komunitas desa. *Homestay* yang dikelola keluarga lokal memberikan kesempatan ekonomi langsung bagi masyarakat akar rumput.

Keterlibatan komunitas dalam pengelolaan *guesthouse* atau *coliving spaces* berarti ada distribusi manfaat pariwisata yang lebih merata. Selain itu, tren ini juga mendorong praktik ramah lingkungan karena wisatawan global cenderung memilih akomodasi yang konsisten dengan prinsip keberlanjutan. Penggunaan energi terbarukan, pengolahan sampah lokal, hingga keterlibatan dalam kegiatan budaya adat menjadi faktor daya tarik baru. Jadi, fenomena penurunan TPK hotel berbintang dapat menjadi momentum bagi Bali untuk melihat realitas baru: pariwisata tidak lagi semata dikuasai oleh hotel besar, tetapi tersebar ke berbagai bentuk akomodasi alternatif yang lebih adaptif secara sosial dan ekologis.

Meskipun begitu, tantangan tetap besar. Permintaan tinggi terhadap villa dan properti mewah di Bali mengandung risiko eksploitasi lahan dan kehilangan ruang pertanian produktif. Banyak sawah dan tanah adat beralih fungsi menjadi villa berkamar eksklusif bagi tamu internasional yang tinggal jangka panjang. Jika tidak ada regulasi kuat, fenomena ini bisa menjadi bumerang berupa degradasi budaya agraris Bali dan kerusakan lingkungan. Moratorium pembangunan hotel berbintang tidak akan banyak berarti jika alih fungsi lahan justru dibiarkan tumbuh masif untuk villa dan akomodasi informal. Maka dari itu, strategi pengendalian pembangunan harus memperlakukan setiap bentuk akomodasi sebagai subjek pengendalian tata ruang, bukan hanya hotel berbintang semata.

Bagi pengelola hotel berbintang, situasi ini seharusnya dijadikan momentum untuk menyusun ulang strategi. Menerapkan prinsip *Marketing Value Creation* (MVC) dapat menjadi cara untuk mengembalikan daya tarik. Hotel tidak cukup menjual kamar nyaman ber-AC atau layanan standar bintang lima saja, tetapi harus mampu menciptakan nilai tambah unik yang tidak bisa ditawarkan oleh akomodasi alternatif. Misalnya, paket wisata berbasis *wellness*, pengalaman eksklusif budaya Bali, atau kolaborasi dengan desa adat untuk menyediakan atraksi autentik. Hotel perlu memanfaatkan strategi digital marketing mutakhir, big data, dan personalisasi layanan untuk memenangkan hati wisatawan yang semakin selektif. Inovasi dalam promosi, diferensiasi produk layanan, dan penciptaan pengalaman menjadi keharusan agar hotel berbintang bertahan dalam lanskap baru pariwisata Bali.

Fenomena paradoks ini akhirnya memperlihatkan pelajaran krusial: pembangunan pariwisata tidak bisa semata mengikuti kuantitas kunjungan wisatawan. Bali harus beradaptasi dengan pola konsumsi dan preferensi baru wisatawan global, sekaligus memastikan bahwa pertumbuhan sektor ini tetap selaras dengan keberlanjutan lingkungan, sosial, dan budaya. Pemerintah perlu menyusun kebijakan pajak yang inklusif untuk mengakomodasi akomodasi alternatif, meningkatkan transparansi dalam pendataan properti wisata, sekaligus mencegah eksploitasi lahan berlebihan. Akademisi dan industri pariwisata juga dituntut lebih sigap untuk menutup kesenjangan antara riset dan praktik lapangan, sehingga tren global tidak hanya dibicarakan di seminar tetapi diimplementasikan melalui kebijakan nyata. Masyarakat lokal, pada akhirnya, harus tetap menjadi subjek utama pariwisata, bukan sekadar penonton dalam rumah mereka sendiri.

Akhirnya, fenomena peningkatan kunjungan wisatawan mancanegara ke Bali pada 2024 yang paradoks dengan penurunan TPK hotel berbintang mencerminkan kompleksitas sektor pariwisata Bali saat ini. Situasi ini membuka mata bahwa pariwisata Bali sedang berada pada fase transisi menuju sistem baru yang lebih heterogen, dengan distribusi manfaat yang harus lebih terkontrol dan inklusif. Bali bukan hanya ditantang untuk menjaga jumlah kunjungan wisatawan, tetapi juga dituntut untuk menata kembali strategi pengelolaan akomodasi, mengendalikan alih fungsi lahan, memperkuat regulasi pajak, serta meningkatkan daya saing hotel berbintang melalui inovasi dan *value creation*. Dengan menyeimbangkan dinamika ini secara bijak, Bali dapat terus menjadi destinasi unggulan dunia tanpa kehilangan jati diri dan keberlanjutan sosial-budayanya, serta tetap relevan di mata generasi wisatawan yang semakin kritis [43].

BANDARA INTERNASIONAL NGURAH RAI: ANTARA TANTANGAN KAPASITAS DAN SIMBOL KEMAJUAN PARIWISATA BALI



Perlu ditegaskan sejak awal bahwa penulis bukanlah seorang ahli di bidang kebandarudaraan. Latar belakang penulis adalah dalam manajemen bisnis pariwisata, sehingga opini yang disampaikan lebih bersandar pada perspektif manajemen destinasi dan pengembangan pariwisata daripada analisis teknis penerbangan. Dengan kesadaran itu, pandangan ini diharapkan dapat menjadi pemicu diskusi lintas bidang, melibatkan para pakar kebandarudaraan, teknisi penerbangan, serta akademisi transportasi udara yang dapat memberikan kajian lebih

mendalam. Tulisan ini hendaknya dibaca sebagai masukan awal yang perlu divalidasi, namun penting untuk menekankan bahwa keberhasilan pariwisata Bali sangat erat bergantung pada kinerja Bandara Internasional Ngurah Rai sebagai pintu masuk utama wisatawan mancanegara [44].

Bandara Ngurah Rai adalah pintu gerbang utama ke Bali. Hampir seluruh wisatawan internasional yang berkunjung ke pulau ini melewati bandara tersebut, menjadikannya simpul vital bukan hanya dalam konteks transportasi, tetapi juga sebagai katalis pertumbuhan ekonomi. Bandara memiliki fungsi ganda: pertama, sebagai infrastruktur dasar yang menjamin kelancaran arus keluar-masuk wisatawan domestik maupun internasional; kedua, sebagai simbol citra Bali yang pertama kali dialami wisatawan. Bayangan pertama seorang turis tentang Bali dibentuk bukan hanya oleh pantai, pura, atau interaksi dengan masyarakat lokal, tetapi dimulai dari pengalaman mereka begitu menjejak Bandara Ngurah Rai—bagaimana imigrasi berjalan, bagaimana bagasi ditangani, seberapa cepat antrean bergerak, dan bagaimana suasana terminal dipersepsi. Inilah mengapa keterbatasan kapasitas bandara bukan sekadar persoalan teknis penerbangan, melainkan faktor yang mampu menentukan keberlanjutan ekonomi Bali secara langsung.

Salah satu tantangan paling serius yang dihadapi Bandara Ngurah Rai adalah keterbatasan kapasitas landasan pacu (*runway*). Sebagai sebuah bandara dengan hanya satu *runway*, kemampuan untuk mengakomodasi lonjakan wisatawan sangat terbatas. Berdasarkan simulasi sederhana dengan asumsi rata-rata kapasitas pesawat sekitar 300 penumpang (dengan variasi Airbus A380 hingga Boeing 737), bandara sejatinya mampu melayani hingga 35 pesawat per jam. Angka itu secara teoritis berarti 10.500 penumpang per jam. Jika dihitung efisiensi operasional dalam 16 jam per hari dan 20 hari efektif setiap bulan, maka kapasitas teoritis penumpang dapat mencapai lebih dari 3,36 juta per bulan atau sekitar 40 juta per tahun. Akan tetapi, angka ini jelas tidak mencerminkan realitas. Berbagai variabel seperti perawatan landasan, kondisi cuaca, waktu tunggu, atau gangguan teknis membuat kapasitas nyata jauh di bawah angka teoritis. Inilah yang menyebabkan setiap musim liburan panjang, antrean pesawat mengular di udara, penerbangan *delay*,

hingga antrean panjang di imigrasi dan bagasi sulit dihindari. Realitas ini harus dipahami sebagai keterbatasan kapasitas struktural, bukan semata masalah operasional harian.

Dalam perspektif pariwisata, lonjakan wisatawan mancanegara ke Bali yang diproyeksikan akan terus meningkat di tahun-tahun mendatang semakin menekan kapasitas Bandara Ngurah Rai. Bali masih menjadi “magnet global” di Asia-Pasifik, bahkan pada 2024 telah menerima lebih dari 6,3 juta kunjungan wisatawan asing. Angka ini terus menunjukkan tren kenaikan, mengindikasikan bahwa tekanan terhadap bandara akan semakin besar dalam dekade mendatang. Kapasitas infrastruktur menjadi isu strategis yang menentukan apakah Bali mampu menjaga daya tariknya. Jika *bottleneck* terus dibiarkan, maka kualitas pengalaman wisatawan menurun. Tidak sedikit wisatawan yang kecewa karena harus mengantre berjam-jam di imigrasi, mencari bagasi lebih lama dari waktu tempuh penerbangan, atau menghadapi ketidakpastian jadwal perjalanan. Semua pengalaman ini akan berkorelasi langsung dengan citra destinasi, yang pada era digital cepat tersebar luas lewat ulasan daring maupun media sosial.

Solusi untuk masalah ini harus dibaca dalam kerangka jangka pendek dan jangka panjang. Jangka panjang, penambahan *runway* adalah keharusan jika Bali ingin tetap bisa bersaing sebagai destinasi kelas dunia. Dua *runway* akan meningkatkan kapasitas per jam secara signifikan, mengurangi antrean, dan meningkatkan fleksibilitas maskapai dalam melayani jadwal penerbangan. Akan tetapi, hal ini tidak sederhana. Pembangunan *runway* baru membutuhkan lahan, anggaran, analisis dampak lingkungan, dan kesepakatan sosial-politik. Posisi geografis Bandara Ngurah Rai yang dikepung pemukiman padat, kawasan wisata, serta bentang pesisir laut menjadi tantangan riil. Maka, kemungkinan untuk membuka bandara internasional baru di kawasan utara atau timur Bali patut masuk dalam diskursus publik, agar distribusi wisatawan lebih merata serta mengurangi ketergantungan pada satu pintu masuk.

Di luar rencana besar, penyesuaian jangka pendek harus dilakukan. Optimalisasi jadwal penerbangan atau slot time menjadi salah satu strategi. Saat ini, kepadatan penerbangan sering kali menumpuk pada

jam-jam tertentu, sementara slot dini hari atau larut malam kurang dimanfaatkan. Melalui manajemen slot yang lebih proporsional, kepadatan bisa dikurangi, kenyamanan wisatawan meningkat, serta utilisasi infrastruktur lebih seimbang. Optimalisasi slot ini memerlukan kerja sama intensif dengan maskapai penerbangan internasional, yang sering kali menuntut jadwal tertentu yang sesuai dengan hub global mereka.

Selain itu, peningkatan fasilitas terminal harus segera diwujudkan. Penambahan konter imigrasi, ruang tunggu, fasilitas bagasi, dan area transit menjadi kebutuhan mendesak. Terminal bandara bukan sekadar tempat menunggu, melainkan ruang transisi yang ikut menentukan persepsi wisatawan. Antrean berjam-jam di imigrasi sering menjadi sumber keluhan utama wisatawan internasional, sering kali lebih membekas dalam memori mereka dibanding pengalaman indah di pantai atau pura. Digitalisasi layanan juga tak bisa ditunda lagi. Dalam era teknologi, sistem seperti *e-gate* imigrasi, *self-check-in*, serta integrasi informasi penerbangan dalam satu aplikasi akan mempercepat proses, mengurangi antrean, dan memberikan rasa nyaman. Pengalaman positif di bandara akan menguatkan citra Bali sebagai destinasi modern yang peduli pada kenyamanan wisatawan.

Manajemen krisis juga harus menjadi bagian dari strategi. Kasus gangguan cuaca, penutupan bandara akibat erupsi Gunung Agung atau gunung di pulau tetangga, hingga insiden teknis sering kali menimbulkan kepanikan dan kesemrawutan. Bali memerlukan protokol krisis bandara yang matang, yang mengatur tidak hanya jalur teknis, tetapi juga komunikasi publik. Wisatawan harus menerima informasi real-time mengenai situasi penerbangan, opsi akomodasi, maupun kompensasi layanan. Tanpa protokol ini, setiap insiden akan semakin memperburuk citra Bali di mata global.

Dalam konteks pariwisata Bali yang selalu menekankan filosofi Tri Hita Karana, sebenarnya bandara juga harus dipandang sebagai institusi yang perlu mencerminkan harmoni. Parahyangan bisa diwujudkan melalui desain dan tata ruang bandara yang menghadirkan nuansa spiritual dan estetika Bali pada arsitektur terminalnya. Pawongan tercermin dari

layanan humanis yang menghormati wisatawan sekaligus memberdayakan masyarakat lokal, misalnya dengan menghadirkan gerai produk UMKM Bali secara strategis di terminal. Sementara Palemahan harus diwujudkan melalui penerapan teknologi ramah lingkungan, efisiensi energi, dan sistem pengelolaan limbah yang ketat. Jadi, Bandara Ngurah Rai tidak hanya berfungsi sebagai simpul transportasi, tetapi juga perwujudan identitas lokal yang menyatu dengan nilai pembangunan berkelanjutan.

Mahasiswa bisnis pariwisata kerap mempelajari bahwa destinasi dunia hanya dapat bertahan jika mampu beradaptasi dengan perubahan tren, termasuk memperbaiki titik lemah infrastruktur. Bandara Ngurah Rai adalah contoh nyata dari titik kritis tersebut. Jika pengelolaan tidak segera menyesuaikan diri dengan lonjakan wisatawan global, Bali akan menghadapi risiko kehilangan daya tariknya di era kompetisi destinasi internasional. Negara-negara lain terus mengembangkan bandara modern berkapasitas besar dengan layanan berkelas dunia. Jika Bali tetap tertinggal, wisatawan global mungkin akan mengalihkan preferensi ke destinasi lain di Asia Tenggara yang menawarkan akses lebih nyaman, transit lebih cepat, dan pengalaman yang lebih efisien.

Akhirnya, Bandara Internasional Ngurah Rai adalah simbol kemajuan pariwisata Bali dan gerbang utama Indonesia ke mata dunia. Akan tetapi, kemampuan bandara ini tidak tak terbatas. Keterbatasan kapasitas *runway*, infrastruktur terminal, dan proses layanan dapat menjadi hambatan serius bagi pertumbuhan pariwisata di masa depan. Oleh karena itu, langkah strategis berupa penambahan *runway*, optimalisasi slot time, perluasan terminal, digitalisasi layanan, serta manajemen krisis harus segera disiapkan. Kolaborasi lintas sektor antara pengelola bandara, pemerintah, maskapai, pelaku industri pariwisata, dan masyarakat harus dijalankan dengan visi bersama: menjadikan Bandara Ngurah Rai bukan sekadar bandara tersibuk, melainkan bandara terbaik yang memberikan pengalaman kelas dunia. Dengan cara itu, Bali dapat memastikan bahwa pintu gerbang utamanya tidak berubah menjadi hambatan, tetapi tetap menjadi kebanggaan nasional sekaligus jendela menuju Pulau Dewata yang harmonis, lestari, dan berkelas global [45].

BANTUAN SOSIAL RP 2 JUTA PER KK DI BADUNG: ANTARA JANJI POLITIK, REGULASI, DAN EMPATI SOSIAL



Rencana Pemerintah Kabupaten Badung untuk memberikan bantuan sebesar Rp2 juta per kepala keluarga pada setiap hari besar keagamaan nasional telah menyulut diskursus publik yang hangat. Pada satu sisi, kebijakan ini digagas sebagai bentuk perhatian pemerintah terhadap beban ekonomi masyarakat, terutama dalam momen-momen penting yang identik dengan lonjakan harga kebutuhan pokok. Akan tetapi, pada sisi lain, kebijakan ini berhadapan langsung dengan regulasi formal, khususnya Permendagri No.77 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah,

yang menegaskan bahwa belanja bantuan sosial harus tepat sasaran, diberikan secara selektif, tidak bersifat terus-menerus, dan ditujukan untuk melindungi masyarakat dari risiko sosial tertentu. Ketentuan yang ketat ini dengan sendirinya menciptakan kontradiksi antara janji populis dalam kampanye politik dan tuntutan akuntabilitas fiskal dalam praktik birokrasi. Inilah titik awal paradoks yang membuat kebijakan mulia menjadi bahan perdebatan [46].

Kebijakan bantuan Rp2 juta per KK ini pada mulanya hadir sebagai wujud “kehadiran negara” di tengah masyarakat, mencerminkan intensi kepemimpinan I Wayan Adi Arnawa dan Bagus Alit Sucipta untuk menghadirkan solusi konkret menghadapi dampak inflasi musiman. Namun dalam implementasinya, muncul sederet kriteria yang harus dipenuhi penerima bantuan, seperti syarat domisili minimal lima tahun, batas penghasilan maksimal Rp5 juta, serta pengecualian bagi ASN/PNS. Syarat-syarat ini dipandang oleh banyak warga sebagai bentuk penyimpangan dari janji kampanye awal yang menjanjikan “bantuan untuk semua” warga Badung tanpa syarat. Akibatnya, muncul rasa dikhianati, terlebih di tengah memori masyarakat tentang janji politik yang sempat dielu-elukan tanpa penjelasan mengenai regulasi pembatas. Dari sudut pandang politik, perubahan janji ini memunculkan krisis kredibilitas bagi pemimpin daerah yang dipilih melalui legitimasi suara rakyat.

Akan tetapi, jika ditinjau dari aspek hukum dan tata kelola anggaran, pemerintah daerah tidak bisa semata-mata mengabaikan Permendagri 77/2020. Regulasi ini diciptakan untuk memastikan belanja bantuan sosial tidak menjadi alat politik transaksional yang berlebihan, melainkan benar-benar diarahkan pada mereka yang berhak. Dengan kata lain, kepala daerah sedang menghadapi dilema besar: apabila bantuan digulirkan tanpa syarat, ada risiko dugaan pelanggaran hukum atau penyalahgunaan anggaran; tetapi jika bantuan dibatasi sesuai aturan, ada kekecewaan masyarakat yang merasa janji politik tidak ditepati. Kontradiksi ini menunjukkan betapa sulitnya menjaga keseimbangan antara *rule of law* dan kebutuhan sosial kemasyarakatan.

Syarat domisili lima tahun menjadi salah satu titik perdebatan tajam. Pemerintah beralasan hal ini diperlukan untuk memastikan penerima

bantuan adalah warga Badung yang benar-benar menetap, bukan pendatang musiman yang hanya mencari keuntungan sesaat. Namun dari perspektif sosial, syarat ini dipandang diskriminatif, karena justru banyak pendatang dengan kondisi ekonomi miskin yang membutuhkan bantuan lebih mendesak. Mereka bekerja sebagai buruh harian, pekerja lepas, dan pedagang kecil yang turut memberi kontribusi pada denyut ekonomi daerah. Aturan ini akhirnya dipersepsikan mengorbankan kaum urban miskin, memperlebar jurang eksklusi sosial, dan menjadi simbol lemahnya sensitivitas kebijakan terhadap realitas warga kelas bawah.

Begitu juga batas pendapatan sebesar Rp5 juta yang digunakan sebagai indikator seleksi penerima. Mungkin batas ini dimaksudkan untuk menyaring agar bantuan tepat diterima kelompok berpendapatan rendah atau menengah ke bawah. Namun dalam praktiknya, kriteria ini rawan kontradiksi. Banyak pekerja paruh waktu, pekerja kreatif, dan keluarga muda yang tidak memenuhi kriteria formal padahal dalam realitas ekonomi mereka tetap kesulitan memenuhi kebutuhan dasar. Di sisi lain, penggunaan indikator semata berupa angka pendapatan bulanan sering kali tidak mencerminkan kerentanan sosial ekonomi aktual, yang dipengaruhi lebih luas oleh faktor tanggungan keluarga, kondisi kesehatan, dan akses terhadap layanan publik. Jadi, penggunaan limitasi teknokratis bisa jadi menciptakan bias dalam penentuan kelompok “tepat sasaran”.

Kritik lain muncul terkait pengecualian bagi ASN/PNS. Kebijakan ini menimbulkan kesan diskriminasi struktural, seolah pegawai negeri dianggap berpenghasilan cukup dan otomatis tidak berhak atas bantuan. Padahal, dalam realitas sosial, banyak ASN golongan rendah dan tenaga kontrak di sektor pemerintahan yang tetap mengalami persoalan ekonomi. Keputusan untuk mengecualikan kelompok ini memperlihatkan kelemahan analisis yang kurang menyeluruh dalam membaca potensi kerentanan sosial warga negara. Aturan ini kemudian dinilai lebih berfungsi sebagai instrumen politik simbolis dibanding kebijakan kesejahteraan yang substantif.

Di luar dimensi hukum dan teknis, terdapat pula dimensi toleransi sosial yang tidak kalah penting. Masyarakat Badung menunjukkan ketidakpuasan yang signifikan karena merasa akses mereka terhadap bantuan menjadi terbatas oleh kebijakan syarat yang kaku. Hal ini

menimbulkan ketegangan antara harapan kolektif rakyat dan realitas kebijakan pemerintah. Pemimpin daerah memang menyerukan kepada masyarakat untuk bersabar dan memberi waktu bagi pemerintah merealisasikan program, namun di era keterbukaan media sosial, opini publik tidak bisa ditekan begitu saja. Dalam ruang digital, narasi “janji tak ditepati” dengan cepat menyebar, membentuk persepsi negatif yang sulit diluruskan meskipun ada argumentasi rasional tentang legalitas dan akuntabilitas.

Dari kaca mata gagasan, kebijakan ini bermula dari niatan baik menjaga stabilitas ekonomi hari raya dengan meningkatkan daya beli masyarakat. Hari-hari besar keagamaan di Indonesia memang identik dengan lonjakan harga sembako, kebutuhan konsumtif, dan pengeluaran ekstra keluarga. Maka, bantuan tunai diharapkan menjadi instrumen kendali inflasi jangka pendek. Akan tetapi, gagasan mulia ini berhadapan dengan realitas birokrasi yang menuntut proses selektif dan regulasi yang kaku. Akibatnya, kebijakan mengalami distorsi makna: dari “bantuan yang membahagiakan semua warga” bertransformasi menjadi “bantuan yang membuat sebagian warga merasa tak dianggap”. Dengan kata lain, bukannya mendamaikan sosial-ekonomi, bantuan justru memantik paradoks baru.

Secara politik, rencana ini sesungguhnya sangat strategis. Ia digagas sebagai realisasi janji kampanye untuk menjaga kredibilitas rezim lokal, sekaligus memperkuat basis elektoral di kalangan rakyat kecil. Namun politik selalu rentan disandera realitas. Jika implementasi gagal diterjemahkan sesuai harapan, kredibilitas itu justru runtuh dan berbalik menjadi senjata oposisi. Dalam konteks ini, reputasi kepemimpinan lokal sedang benar-benar diuji. Apakah mereka mampu merajut kembali kontradiksi antara akuntabilitas hukum dan rasa keadilan sosial, atau akan terjebak dalam stigma kegagalan kebijakan populis.

Pelajaran yang dapat dipetik dari paradoks ini adalah bahwa tata kelola publik yang humanis menuntut integrasi antara kepatuhan hukum dan empati sosial. Kebijakan yang baik tidak bisa hanya patuh pada aturan teknis, tetapi juga harus “tepat rasa” di tengah masyarakat. Hukum memang harus ditegakkan, karena tanpa akuntabilitas, ruang penyalahgunaan fiskal

semakin terbuka. Akan tetapi, hukum yang kering tanpa empati justru kehilangan legitimasi sosial. Maka, seharusnya kebijakan publik diolah dengan perspektif multidimensi: regulasi dijadikan pagar etis, sementara empati dijadikan kompas moral. Pada level implementasi, mekanisme verifikasi penerima bisa saja diperluas dengan indikator kualitatif, seperti kondisi rumah tangga, jumlah tanggungan, dan situasi khusus yang tidak tercermin dalam data formal.

Lebih jauh, kebijakan bantuan tunai perlu diarahkan bukan hanya pada jangka pendek, tetapi juga integrasi dengan program pemberdayaan jangka panjang. Bantuan Rp2 juta memang bisa membantu ibu-ibu membeli bahan untuk sesajen Galungan, bapak-bapak memenuhi kebutuhan lauk pauk Idul Fitri, atau anak-anak menikmati suasana Natal tanpa beban. Tetapi yang lebih penting adalah bagaimana anggaran publik diarahkan agar masyarakat tidak hanya bertahan, melainkan juga berdaya untuk keluar dari jebakan kebutuhan musiman. Implikasi besarnya adalah bahwa bantuan harus menjadi pintu masuk untuk kebijakan struktural yang lebih permanen dalam mengatasi kesenjangan sosial.

Akhirnya, rencana bantuan Rp2 juta per KK di Badung adalah potret paradoks birokrasi dan politik lokal. Di satu sisi, ia cermin niat mulia pemerintah untuk hadir bersama rakyat. Namun di sisi lain, ia terjebak pada dilema regulasi dan ekspektasi masyarakat yang tidak pernah sederhana. Paradoks ini menegaskan bahwa kepemimpinan sejati diuji justru pada kemampuan untuk menyeimbangkan hukum dan empati, akuntabilitas dan rasa, janji politik dan regulasi negara. Hanya dengan pendekatan multidimensi seperti itu, kebijakan publik bisa melampaui sekadar angka-angka teknis, dan benar-benar menjadi instrumen pemersatu yang membumi. Pada akhirnya, yang diinginkan rakyat bukanlah sekadar bantuan tunai, tetapi rasa bahwa mereka dihargai, didengar, dan diikutsertakan dalam pembangunan daerahnya sendiri [47].

MENJARING WISATAWAN DOMESTIK: MASA DEPAN PARIWISATA INDONESIA DALAM BAYANGAN GLOBALISASI



Belajar dari strategi Tiongkok, sektor pariwisata dapat menjadi instrumen krusial untuk mempercepat pemulihan ekonomi setelah pandemi dan sebagai pilar pembangunan berkelanjutan jangka panjang. Dengan populasi lebih dari 1,4 miliar orang, pemerintah Tiongkok melihat pasar wisatawan domestik sebagai kekuatan yang mampu menggerakkan konsumsi internal, mendukung distribusi ekonomi, dan mengurangi ketergantungan pada fluktuasi pasar global yang sarat ketidakpastian. Pariwisata domestik bukan hanya soal perjalanan, tetapi juga merupakan mekanisme

pemerataan pembangunan, sarana pelestarian budaya, serta instrumen penguatan identitas nasional. Melalui pengembangan infrastruktur, dukungan terhadap keberlanjutan lingkungan, dan promosi warisan budaya kepada masyarakat sendiri, Tiongkok berhasil mengoptimalkan potensi domestik yang selama ini dianggap laten. Ini menjadi cermin reflektif bagi Indonesia, sebuah negara dengan lebih dari 270 juta penduduk, mayoritasnya usia produktif, yang memiliki potensi pasar domestik tidak kalah besar namun masih jauh dari tergarap secara optimal [31].

Dalam konteks Indonesia, terutama Bali yang sangat bergantung pada pariwisata, momentum untuk mengalihkan sebagian fokus dari wisatawan mancanegara ke wisatawan domestik adalah sebuah keniscayaan. Sebelum pandemi, Indonesia terlalu terobsesi mendatangkan wisatawan asing sebagai bagian dari strategi devisa, dengan promosi masif melalui “Wonderful Indonesia” di mancanegara. Akan tetapi, pandemi COVID-19 telah mengingatkan kita bahwa pasar wisatawan asing sangat rentan gangguan eksternal, seperti larangan perjalanan, krisis global, atau perubahan geopolitik. Justru pariwisata domestik terbukti menjadi penyangga utama ketika arus wisatawan asing terputus. Pada 2023, tercatat lebih dari 500 juta perjalanan wisata domestik di seluruh Indonesia, sebuah angka yang sangat signifikan dan menunjukkan betapa besarnya peluang ekonomi yang dapat digali dari pasar internal.

Proyeksi jangka panjang untuk pariwisata domestik 2025–2045 cukup optimis, ditopang oleh beberapa faktor kunci. Pertama, pembangunan infrastruktur menjadi katalis utama. Banyak bandara baru dibangun, kapasitas bandara eksisting ditingkatkan, jaringan tol diperluas, dan aksesibilitas menuju destinasi yang semula terpencil kini semakin mudah. Contoh jelas adalah kawasan Mandalika di NTB dan Labuan Bajo di NTT, yang kini memiliki akses transportasi lebih baik sehingga mampu memicu pertumbuhan ekonomi lokal. Kedua, kesadaran masyarakat terhadap keindahan destinasi domestik meningkat. Program “Bangga Berwisata di Indonesia” mendorong masyarakat untuk menjelajah keanekaragaman budaya dan alam negeri sendiri. Kampanye ini secara psikologis berusaha menggeser kebanggaan semu mengunjungi destinasi luar negeri menjadi kebanggaan autentik menikmati kekayaan nusantara.

Ketiga, diversifikasi destinasi juga semakin nyata. Program “10 Bali Baru” memperlihatkan keseriusan pemerintah menciptakan substitusi destinasi agar konsentrasi pariwisata tidak hanya bertumpu pada Bali. Destinasi baru ini menawarkan paket wisata unik yang menggabungkan pengalaman budaya, petualangan alam, dan wisata kuliner lokal. Diversifikasi ini tidak hanya memperluas pilihan, tetapi juga strategis dalam persebaran manfaat ekonomi lintas wilayah.

Pertumbuhan ekonomi pariwisata domestik juga memiliki proyeksi kontribusi besar terhadap Produk Domestik Bruto (PDB). Dari 4,3 persen PDB pada 2023, kontribusinya diproyeksikan naik menjadi 6 persen pada 2025, dengan harapan menciptakan lebih dari 15 juta lapangan kerja baru. Angka ini menandakan pentingnya pariwisata domestik tidak hanya sebagai instrumen budaya, tetapi juga sebagai motor kesejahteraan. Akan tetapi, untuk merealisasikannya, diperlukan strategi konkret dalam penyediaan infrastruktur dan kualitas layanan. Kesenjangan infrastruktur di daerah terpencil masih menjadi kendala utama. Banyak destinasi indah dan potensial belum terjamah secara optimal karena aksesibilitasnya sulit, transportasi tidak maksimal, serta layanan dasar seperti air bersih, listrik, dan internet belum terpenuhi.

Meski potensinya besar, tantangan pariwisata domestik cukup serius, salah satunya perubahan perilaku masyarakat Indonesia yang lebih suka berwisata ke luar negeri. Ada beberapa faktor yang memicu hal ini. Pertama, kemudahan akses dan promosi agresif menjadi kunci. Tiket internasional yang murah, paket liburan lengkap dari agen perjalanan, serta fleksibilitas platform daring membuat perjalanan ke luar negeri tampak lebih menarik. Kedua, daya tarik destinasi internasional menawarkan pengalaman baru yang tidak tersedia di Indonesia. Banyak orang masih berorientasi pada prestise sosial: rasa kebanggaan saat bisa mengunjungi menara Eiffel di Paris atau Disneyland di Jepang lebih sering dipandang sebagai status sosial dibandingkan perjalanan ke Borobudur atau Raja Ampat. Ketiga, pengaruh media sosial memperkuat tren ini. Platform berbagi pengalaman liburan dipenuhi konten destinasi internasional yang menciptakan dorongan psikologis untuk mengikuti tren. Keempat, harga tiket pesawat domestik yang mahal menurunkan daya tarik internal.

Ironisnya, perjalanan ke luar negeri sering kali lebih terjangkau dibanding perjalanan antardaerah di dalam negeri. Kelima, keterfokusan pemerintah pada pariwisata mancanegara selama beberapa dekade membentuk bias struktural yang membuat pariwisata domestik dianak-tirikan.

Ada pula stigma negatif dalam industri pariwisata bahwa wisatawan domestik dianggap pasar kelas dua, kurang menguntungkan, cerewet, dan kurang menghargai destinasi. Stigma ini jelas tidak relevan dengan semangat keberlanjutan. Setiap wisatawan, baik domestik maupun asing, berhak mendapat pelayanan berkualitas. Mengabaikan pasar domestik berarti mengabaikan kontribusi kelompok terbesar yang bisa menjamin keberlangsungan industri pariwisata Indonesia. Jika mentalitas ini tidak segera diubah, industri pariwisata akan terus terjebak dalam ketergantungan pada wisatawan internasional dan rapuh menghadapi guncangan global.

Sudah waktunya strategi serius menjaring wisatawan domestik menjadi prioritas nasional, termasuk bagi Bali yang sering terlalu nyaman dengan arus turis asing. Dengan penduduk lebih dari 200 juta orang di usia produktif, pasar domestik Indonesia adalah “harta karun” yang belum sepenuhnya tergarap. Akan tetapi, strategi menjaring wisatawan domestik harus peka terhadap karakteristik mereka. Wisatawan domestik sering bepergian dalam kelompok besar, sehingga menyebabkan kerumunan dan berpotensi menurunkan kualitas pengalaman wisata. Solusi yang diperlukan adalah manajemen destinasi yang lebih adaptif: menata alur kunjungan, membatasi kapasitas pada waktu tertentu, dan meningkatkan fasilitas agar kenyamanan tetap terjaga meski kunjungan padat.

Selain itu, strategi pemasaran digital harus mengambil peran lebih besar. Generasi muda Indonesia yang menjadi segmen dominan pariwisata domestik banyak menggunakan platform digital. Promosi pariwisata harus dilakukan lewat media sosial seperti TikTok, Instagram, dan YouTube untuk menjangkau audiens yang sesuai. Narasi visual yang menarik dapat membentuk aspirasi kolektif bahwa “berwisata di negeri sendiri” tidak kalah membanggakan dibanding ke luar negeri. Pemberdayaan UMKM juga wajib ditekankan. Keterlibatan UMKM lokal di sektor pariwisata, baik melalui kuliner, kerajinan, jasa transportasi, maupun *homestay* komunitas,

menjamin distribusi ekonomi yang lebih merata. Pola ini juga menjawab kritik bahwa pariwisata kerap hanya menguntungkan investor besar tetapi meminggirkan masyarakat kecil.

Bali sebagai ikon pariwisata Indonesia seharusnya menjadi laboratorium utama untuk strategi pariwisata domestik. Pulau ini dapat menyiapkan produk wisata edukatif dan religius, seperti wisata budaya berbasis pura atau subak, bisa juga mengembangkan *event-event* budaya yang berorientasi keluarga, pelajar, maupun kelompok keagamaan. Paket insentif berupa potongan harga hotel, tiket masuk destinasi, hingga penyelenggaraan festival budaya, bisa menggenjot partisipasi wisatawan domestik. Pendekatan semacam ini tidak hanya meningkatkan jumlah kunjungan, tetapi juga memperkuat identitas budaya Bali sebagai magnet utama pariwisata domestik.

Dengan strategi yang tepat, pariwisata domestik Indonesia dapat berubah dari sekadar alternatif menjadi tulang punggung ekonomi kreatif dan budaya nasional. Model Tiongkok membuktikan bahwa menggerakkan konsumsi internal dapat memperkuat ketahanan ekonomi dan mengurangi ketergantungan pada wisatawan asing. Untuk Indonesia, hal ini berarti memperluas akses, memperbaiki kualitas layanan, memberdayakan UMKM, serta mengubah stigma negatif menjadi pengakuan bahwa wisatawan domestik adalah pasar paling berharga bagi keberlanjutan pariwisata bangsa.

Akhirnya, masa depan pariwisata Indonesia, termasuk Bali, tidak dapat terus menggantungkan diri pada arus wisatawan asing yang penuh ketidakpastian. Potensi domestik yang besar harus segera digarap melalui infrastruktur yang memadai, diversifikasi destinasi, digitalisasi promosi, dan kebijakan ekonomi yang berorientasi inklusif. Kampanye “Bangga Berwisata di Indonesia” harus diperkaya bukan hanya dengan retorika, tetapi juga dengan kebijakan nyata yang mempermudah, mendukung, dan memberi pengalaman memuaskan bagi masyarakat. Hanya Jadi, pariwisata domestik dapat benar-benar menjadi motor pembangunan berkelanjutan, pilar penguatan identitas nasional, serta landasan kokoh bagi ketahanan ekonomi Indonesia di panggung global [48].

PARIWISATA BALI DALAM BAYANG-BAYANG KONFLIK GEOPOLITIK: ANCAMAN PHK DAN STRATEGI KETAHANAN



Ancaman pemutusan hubungan kerja (PHK) massal di sektor pariwisata, khususnya perhotelan dan industri jasa terkait, semakin nyata pada tahun 2025 di tengah memanasnya konflik Israel–Iran. Meskipun secara langsung kontribusi wisatawan dari kawasan Timur Tengah terhadap pasar pariwisata Indonesia relatif kecil, efek domino dari konflik geopolitik tersebut sangat signifikan. Gangguan penerbangan internasional, meningkatnya biaya perjalanan akibat kenaikan harga energi, serta persepsi risiko global berdampak pada penurunan kunjungan wisatawan ke Indonesia, termasuk

Bali. Pulau ini telah lama menjadi andalan pariwisata nasional dan motor utama penggerak ekonomi daerah, tetapi ketergantungannya pada pasar internasional membuat posisinya rentan terhadap dinamika global yang sulit dikendalikan. Seperti halnya krisis-krisis sebelumnya, mulai dari Perang Teluk 1991 hingga tragedi bom Bali, pariwisata Bali kembali berdiri di persimpangan antara kerentanan dan daya tahannya [49].

Memasuki tahun 2024, Bali mencatat pertumbuhan luar biasa. Data resmi menunjukkan kunjungan wisatawan internasional mencapai 6,33 juta orang, meningkat lebih dari 20 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Australia tetap menjadi pasar utama dengan lebih dari 1,54 juta pengunjung, disusul India, Tiongkok, Inggris, Rusia, Amerika Serikat, dan Jepang. Bahkan pada Desember 2024, lonjakan kunjungan mencatat pertumbuhan bulanan mencapai lebih dari 16 persen. Situasi ini memberi harapan akan kebangkitan pariwisata pasca pandemi dan menjadi simbol daya tarik Bali yang tidak pernah pudar meski dilanda berbagai krisis. Akan tetapi, memasuki 2025, tren tersebut terguncang. Awal tahun menunjukkan penurunan kunjungan, terutama pada *low season*, yang menurut Dinas Pariwisata Provinsi Bali turut dipengaruhi konflik geopolitik Timur Tengah. Maskapai yang biasa melayani penerbangan dari Eropa ke Bali melalui jalur transit di Dubai, Doha, dan Abu Dhabi mulai mengalami gangguan signifikan akibat eskalasi konflik Israel-Iran. Beberapa maskapai terpaksa mengubah jalur penerbangan, menunda, bahkan membatalkan rute langsung ke Bali. Waktu tempuh perjalanan menjadi lebih panjang dan biaya tiket melonjak signifikan, membuat destinasi ini kurang menarik bagi wisatawan Eropa pada musim liburan.

Bagi Bali, situasi ini membawa konsekuensi serius. Eropa selama ini merupakan salah satu pasar penting selain Australia dan Asia. Wisatawan Eropa terkenal sebagai kelompok yang memiliki durasi tinggal lebih panjang, rerata belanja lebih tinggi, dan ketertarikan besar terhadap wisata budaya serta ekowisata. Berkurangnya wisatawan asal Eropa akibat gangguan jalur penerbangan menyebabkan dampak ganda, baik dari sisi okupansi hotel berbintang, konsumsi produk kreatif, maupun distribusi pendapatan ke masyarakat lokal. Dalam konteks inilah ancaman PHK di sektor pariwisata menjadi nyata. Hotel-hotel yang awalnya bersiap memanfaatkan

momentum kebangkitan wisatawan internasional harus menghadapi kenyataan okupansi menurun drastis di luar prediksi. Banyak pekerja kontrak dan harian lepas, yang jumlahnya signifikan dalam industri pariwisata Bali, menjadi kelompok paling rentan terkena dampak PHK atau pemotongan jam kerja.

Konflik geopolitik di Timur Tengah membawa dampak lebih luas melalui saluran energi. Kawasan itu merupakan poros minyak dunia, sehingga setiap eskalasi selalu berdampak pada kenaikan harga minyak internasional. Indonesia, sebagai negara pengimpor minyak, tidak lepas dari lonjakan harga bahan bakar. Kenaikan ini berimplikasi pada biaya logistik, transportasi udara, darat, maupun laut, serta meningkatkan beban operasional sektor pariwisata. Hotel, restoran, dan transportasi wisata menghadapi biaya energi yang membengkak. Apabila pemerintah menahan harga BBM bersubsidi, beban fiskal negara meningkat, yang pada gilirannya dapat mengurangi ruang fiskal untuk pembangunan infrastruktur pariwisata yang lebih tahan krisis. Dengan kata lain, efek domino dari konflik geopolitik bukan saja menurunkan jumlah wisatawan, tetapi juga mengurangi kemampuan pemerintah dalam memperkuat daya tahan sektor pariwisata.

Konsekuensi lain yang tidak kalah penting adalah perubahan pola perjalanan wisatawan. Dalam suasana ketidakpastian global, banyak wisatawan memilih menunda perjalanan jauh atau memilih destinasi yang dianggap lebih aman dan mudah diakses. Bali, meski secara geografis jauh dari zona konflik, tetap terkena imbas karena jalur penerbangan internasionalnya banyak melibatkan transit di kawasan Timur Tengah. Persepsi risiko menjadi faktor krusial dalam pariwisata global. Wisatawan yang ragu akan aksesibilitas dan keamanan perjalanan mereka cenderung mengalihkan pilihan ke destinasi domestik regional seperti Thailand, Singapura, atau Malaysia yang menawarkan penerbangan langsung lebih fleksibel tanpa melintasi zona rawan geopolitik.

Konflik ini juga memberikan dampak tidak langsung pada citra Bali sebagai tuan rumah *event* internasional. Ketidakhadiran atlet dari Iran, Irak, dan Kuwait dalam Kejuaraan Anggar Asia di Bali akibat perang Israel–Iran menjadi contoh nyata bagaimana dinamika geopolitik dapat berimbas pada partisipasi internasional. Jika pola seperti ini terus berulang, reputasi Bali

sebagai destinasi MICE (*Meetings, Incentives, Conferences, and Exhibitions*) dunia bisa terganggu. Penyelenggara *event* global akan ragu menempatkan Bali sebagai lokasi penyelenggaraan jika aksesibilitas dianggap terganggu. Ini bisa menjadi pukulan telak bagi strategi pemerintah daerah yang dalam beberapa tahun terakhir gencar mempromosikan Bali sebagai destinasi favorit untuk konferensi dunia.

Dalam menghadapi risiko geopolitik global yang berulang, Bali perlu mengadopsi strategi adaptif. Salah satu strategi yang tidak dapat ditawar lagi adalah diversifikasi pasar wisatawan. Bali tidak boleh terlalu bergantung pada Eropa yang sangat rentan gangguan jalur udara Timur Tengah. Pasar seperti Australia, Jepang, Korea Selatan, Tiongkok, serta Asia Tenggara harus diperluas secara agresif. Selain itu, pasar domestik harus diperkuat sebagai penopang utama ketika pasar internasional terguncang. Dengan jumlah populasi lebih dari 200 juta usia produktif, wisata domestik bisa menjadi jaring pengaman yang menjaga industri tetap bergerak saat krisis global melanda. Diversifikasi pasar harus dibarengi pemetaan ulang strategi promosi, insentif maskapai, serta penyusunan paket wisata yang sesuai dengan segmen baru.

Strategi adaptif berikutnya adalah penguatan infrastruktur dan konektivitas alternatif. Bandara Ngurah Rai harus segera didukung dengan peningkatan kapasitas terminal, layanan digital, serta jalur penerbangan baru yang tidak bergantung pada transit Timur Tengah. Pemerintah pusat dan daerah perlu mempercepat rencana pembangunan bandara baru di Bali Utara, yang selain membuka distribusi pariwisata lebih merata, juga memungkinkan pembukaan rute langsung dari Asia Timur atau Pasifik tanpa melalui jalur rawan konflik. Infrastruktur transportasi laut dan udara domestik juga perlu diperkuat agar Bali tetap terhubung dengan kota-kota besar di Indonesia, misalnya melalui penerbangan langsung dari Makassar, Manado, atau Kupang.

Selain itu, mitigasi risiko dan komunikasi krisis harus menjadi protokol baku. Pemerintah Bali bersama pelaku industri perlu menyiapkan sistem pemantauan real-time terhadap situasi geopolitik global, sekaligus memiliki skenario darurat untuk mengantisipasi lonjakan pembatalan atau perubahan penerbangan. Komunikasi publik yang cepat, transparan, dan

akuntabel menjadi kunci untuk menjaga kepercayaan wisatawan internasional. Dalam situasi krisis, persepsi sering kali lebih memengaruhi keputusan wisatawan daripada realitas objektif di lapangan. Jika Bali mampu menunjukkan kesiapan dan keterbukaan dalam tata kelola krisis, destinasi ini bisa mempertahankan reputasinya meski badai geopolitik melanda.

Selain faktor eksternal, Bali perlu membenahi tantangan internal. Masalah *overtourism*, tekanan pada infrastruktur, serta degradasi lingkungan merupakan persoalan laten yang bisa memperburuk ketahanan pariwisata. Jika kunjungan menurun akibat faktor eksternal, pekerja sektor informal akan menderita karena ketergantungan mereka pada arus wisatawan harian. Sebaliknya, jika saat kondisi pulih kunjungan melonjak tanpa kontrol, risiko kerusakan lingkungan semakin besar. Karena itu, pengelolaan pariwisata berkelanjutan harus menjadi fondasi utama. Moratorium pembangunan hotel baru di kawasan jenuh, regulasi daya dukung lingkungan, serta penggunaan dana pajak pariwisata untuk konservasi budaya dan alam perlu diperkuat. Dengan cara ini, Bali dapat tetap menjaga keharmonisan antara pertumbuhan ekonomi, kelestarian lingkungan, dan kesejahteraan masyarakat lokal.

Kolaborasi regional dan internasional juga tidak kalah penting. Bali harus aktif bekerja sama dengan maskapai, agen perjalanan, serta negara-negara tetangga untuk memastikan kelancaran arus wisatawan. Promosi bersama di pasar Asia Pasifik dapat menjadi strategi kolektif menghadapi tekanan global. Kerja sama lintas sektor antara pemerintah, industri pariwisata, masyarakat adat, dan komunitas lokal juga wajib diperkuat. Integrasi kepentingan ini vital untuk menjadikan pariwisata Bali lebih tangguh, inklusif, dan berdaya saing tinggi.

Dari pengalaman Perang Teluk 1991 hingga konflik Israel–Iran 2025, terlihat jelas bahwa pariwisata Bali selalu berada dalam bayang-bayang ketidakpastian global. Setiap konflik besar dunia akan selalu merembes memengaruhi aliran wisatawan, meski secara geografis Indonesia jauh dari pusat konflik. Oleh karena itu, Bali dan Indonesia tidak boleh lagi terjebak dalam siklus reaktif setiap kali krisis global datang. Strategi jangka panjang berupa diversifikasi pasar, penguatan infrastruktur, mitigasi risiko, dan

pengelolaan berkelanjutan harus menjadi visi prioritas. Dengan landasan itu, Bali diharapkan tidak hanya mampu bertahan di tengah badai geopolitik, tetapi juga tumbuh menjadi destinasi wisata yang tangguh, inklusif, serta berkelanjutan, memberi manfaat bagi masyarakatnya sekaligus tetap menjadi kebanggaan Indonesia di mata dunia [50].

SURAT EDARAN: ANTARA INSTRUMEN ADMINISTRASI, MACAN OMPONG, DAN SIMBOL KEPEMIMPINAN



Fenomena maraknya surat edaran yang diterbitkan oleh kepala daerah, khususnya gubernur, dalam beberapa tahun terakhir telah menimbulkan reaksi beragam di masyarakat. Tidak jarang, surat edaran yang sejatinya merupakan instrumen administratif malah diplesetkan oleh warganet dengan berbagai istilah satir seperti Surat Elit, Surat Enteng, Surat Emosi, Surat Ejekan, hingga Surat Enggak Jelas. Plesetan ini lahir karena adanya kesenjangan antara maksud penerbitan surat edaran dengan dampak riil

yang dirasakan masyarakat. Surat edaran sering kali tidak korelatif dengan perubahan perilaku yang diharapkan, sehingga masyarakat menilainya sekadar simbol komunikasi kebijakan yang minim implikasi substantif. Padahal, dalam tatanan birokrasi Indonesia, surat edaran memegang posisi unik meskipun tidak memiliki kekuatan mengikat sebagaimana regulasi formal dalam hierarki perundang-undangan. Surat edaran lebih tepat dimaknai sebagai instrumen penjelasan, interpretasi, atau instruksi teknis yang bersifat internal dan administratif. Akan tetapi, dalam praktiknya, SE justru kerap memegang peran eksternal yang jauh lebih luas [21].

Gubernur Bali I Wayan Koster, misalnya, dikenal sebagai salah satu kepala daerah yang paling sering menerbitkan surat edaran. Beberapa SE miliknya yang terkenal mencakup pembatasan penggunaan plastik sekali pakai, aturan terkait pengendalian Covid-19, hingga teguran kepada wisatawan asing agar menghormati norma budaya lokal. Dalam konteks ini, SE digunakan untuk merespons isu sosial dan lingkungan yang membutuhkan panduan cepat sebelum hadirnya peraturan formal yang lebih rigid. Gubernur-gubernur lain di Indonesia juga memiliki kecenderungan serupa. Gubernur Maluku diketahui menerbitkan SE terkait konsumsi pangan bergizi, sementara Gubernur Sulawesi Tengah, Rusdy Mastura, menggunakan SE untuk memastikan penyelenggaraan Pilkada berjalan sesuai protokol. Di DKI Jakarta, surat edaran telah menjadi perangkat rutin untuk mensosialisasikan kebijakan kesehatan, transportasi, maupun pengendalian lingkungan. Begitu pula di Jawa Barat, Gubernur Ridwan Kamil aktif memakai SE sebagai saluran komunikasi inovasi dan pembangunan daerah. Dari berbagai contoh ini kita menyadari bahwa surat edaran kini berkembang menjadi medium komunikasi politik dan administratif yang strategis, meski efektivitasnya masih sering dipertanyakan.

Salah satu akar masalahnya adalah keterbatasan hukum surat edaran. Ahli hukum seperti Maria Farida Indrati menekankan bahwa surat edaran seharusnya tidak diperlakukan sebagai produk hukum formal. Fungsinya sekadar menjelaskan ketentuan yang sudah termaktub dalam hukum yang lebih tinggi, bukan menciptakan norma baru. Akan tetapi,

praktik di lapangan justru sering kali membalik logika itu. Banyak surat edaran yang menimbulkan norma baru atau larangan baru yang tidak jelas landasan hukumnya. Akibatnya, timbul kebingungan apakah masyarakat wajib mematuhi atau cukup mengabaikannya. Lebih jauh, menantang surat edaran secara hukum juga sulit dilakukan karena secara prinsip SE tidak dianggap bagian dari hierarki peraturan perundang-undangan. Posisi inilah yang membuat surat edaran sering disamakan dengan “macan ompong”: secara simbolik terlihat berwibawa, tetapi daya paksa hukumnya lemah. Namun ironisnya, dalam beberapa kasus, SE justru lebih dipatuhi daripada undang-undang, karena lebih mudah dipahami, lebih kontekstual, dan disertai instruksi operasional yang konkret.

Surat edaran juga menunjukkan wajah paradoks birokrasi Indonesia. Ia dipatuhi dengan disiplin di lingkungan birokrasi internal, terutama oleh aparatur sipil negara (ASN), karena dianggap mencerminkan loyalitas dan kedisiplinan struktural. Akan tetapi, ketika melampaui ranah internal ke masyarakat luas, tingkat kepatuhan menjadi jauh lebih bervariasi. Surat edaran tentang pembatasan penggunaan plastik sekali pakai, misalnya, memang memunculkan kesadaran sebagian masyarakat perkotaan, namun di pasar tradisional, pembatasan plastik hanya berjalan sporadis. Begitu pula saat pandemi Covid-19, SE tentang protokol kesehatan cukup efektif pada fase awal karena didukung kondisi darurat, tetapi ketika kelelahan pandemi muncul, surat edaran terasa seperti instruksi tanpa gigi. Fenomena ini memperlihatkan bahwa kepatuhan terhadap SE sangat bergantung pada konteks sosial-politik, kedekatan masalah dengan kehidupan masyarakat, serta bagaimana komunikasi pemerintah dalam menyampaikannya.

Dampak surat edaran tidaklah seragam. Dalam kasus tertentu, keberadaan SE dapat memicu respons positif karena dianggap relevan dan segera. Misalnya, SE yang mengatur tentang jam belajar saat darurat bencana atau tentang tata cara penyelenggaraan upacara adat ketika pandemi dapat membantu masyarakat menavigasi situasi krisis. Akan tetapi, di sisi lain, tidak sedikit SE yang justru memicu kebingungan, terutama bila isinya kontradiktif dengan aturan formal di atasnya atau tidak disusun dengan bahasa yang jelas. Inilah sebabnya, masyarakat sering kali

memberikan reaksi sinis, menggunakan humor atau satire sebagai bentuk ekspresi ketidakpuasan. Kritik publik terhadap SE yang dianggap tidak jelas adalah bagian dari dinamika demokrasi digital, di mana masyarakat tidak lagi pasif menerima instruksi, tetapi aktif menafsirkan, mengomentari, bahkan mengoreksi kebijakan. Fenomena plesetan seperti “Surat Enggak Jelas” menunjukkan adanya kritik sosial terhadap kurang matangnya perumusan kebijakan yang dikirimkan melalui SE.

Konsekuensi sosial-politik dari frekuensi penerbitan SE pun patut menjadi perhatian. Gubernur yang terlalu banyak mengandalkan SE bisa dicap reaktif dan emosional, kurang memanfaatkan mekanisme formal peraturan daerah yang lebih kuat secara hukum. Namun di sisi lain, gubernur yang jarang menerbitkan SE bisa dianggap minim respons terhadap dinamika sosial yang cepat berubah. Jadi, tantangan gubernur hari ini adalah bagaimana menggunakan SE secara proporsional. SE seharusnya berfungsi sebagai instrumen transisional atau jembatan komunikasi kebijakan, bukan sebagai substitusi permanen atas regulasi. Untuk menjadikan SE instrumen yang kredibel, pemerintah perlu memastikan bahwa setiap edaran selaras dengan prinsip hukum, memiliki tujuan jelas, dan disertai mekanisme sosialisasi yang efektif.

Dalam kerangka manajemen, efektivitas SE dapat ditingkatkan melalui penerapan siklus PDCA (*Plan-Do-Check-Act*). Tahap Plan menuntut identifikasi masalah atau peluang yang benar-benar relevan, termasuk pengumpulan data pendukung untuk menyusun edaran. Tahap Do adalah implementasi terbatas di skala kecil agar dapat diuji. Tahap Check menuntut evaluasi dampak edaran di lapangan, termasuk respon publik dan efektivitasnya dalam mengubah perilaku. Tahap Act digunakan untuk menstandarisasi edaran yang terbukti efektif, atau memodifikasi jika terdapat permasalahan baru. Sayangnya, sebagian besar SE di Indonesia berhenti pada tahap Do, tanpa evaluasi sistematis yang transparan, sehingga masyarakat merasa SE datang silih berganti tanpa ada konsistensi dan tindak lanjut. Jika praktik PDCA diterapkan, maka SE bisa menjadi instrumen kebijakan yang lebih adaptif dan dipercaya, bukan dianggap sebatas macan ompong.

Melihat kompleksitasnya, publik perlu memahami bahwa surat edaran sebetulnya adalah cermin wajah birokrasi Indonesia yang masih mencari keseimbangan antara fleksibilitas dan otoritas. Dalam dinamika pemerintahan yang diwarnai urgensi berbagai isu—dari lingkungan, kesehatan, pendidikan, hingga pariwisata—SE muncul sebagai jalan tengah yang cepat, ringan, tapi sering kali kurang matang. Ia bisa merefleksikan kepemimpinan responsif, namun juga bisa menyingkap lemahnya kualitas tata kelola bila tidak diiringi kajian substansi mendalam. Surat edaran pada akhirnya adalah simbol dari politik komunikasi: sejauh mana pemerintah mampu mengatur persepsi publik, mengendalikan birokrasi internal, dan meredam keresahan sosial melalui kata-kata tertulis yang meski tak memiliki gigi hukum, tetap diharapkan menggerakkan kesadaran kolektif.

Oleh karena itu, tantangan utama bukan hanya pada seberapa banyak surat edaran dikeluarkan, melainkan pada bagaimana ia dirancang, disampaikan, dan dievaluasi. Jika Gubernur Koster di Bali misalnya, berhasil menjadikan SE sebagai alat perubahan nyata dalam pengurangan plastik sekali pakai, maka frekuensi SE tidak lagi menjadi bahan ejekan, tetapi bagian dari inovasi kepemimpinan. Namun jika SE diterbitkan terlalu sering tanpa arah yang jelas, ia hanya akan memperkuat stereotip sebagai “Surat Enggak Jelas”, memperlemah legitimasi pejabat, dan memicu erosi kepercayaan publik. Surat edaran memang bukan undang-undang, tetapi dalam praktik demokrasi modern, ia seharusnya bisa menjadi instrumen dinamis untuk menjembatani kebutuhan hukum formal dengan kecepatan masalah sosial.

Akhirnya, Surat Edaran di Indonesia berada dalam posisi paradoks: tidak memiliki kekuatan hukum formal, tetapi menjadi salah satu sarana kebijakan yang paling banyak digunakan kepala daerah. Ia bisa menjadi instrumen efektif jika disusun dengan jelas, diselaraskan dengan hukum yang lebih tinggi, disosialisasikan secara baik, dan dievaluasi dengan prinsip PDCA. Akan tetapi, tanpa mekanisme pengawasan dan perbaikan berkelanjutan, surat edaran hanya akan menjadi macan ompong—keras di atas kertas, namun lemah di lapangan. Masa depan efektivitas SE bergantung pada keseriusan pemerintah daerah

menjadikannya instrumen kebijakan yang prudent, bukan sekadar simbol politik atau jargon administratif yang mudah diparodikan masyarakat. Yang dibutuhkan bukan lagi banyaknya SE yang diterbitkan, tetapi kualitas, kejelasan, dan komitmen tindak lanjutnya [51].

MENJAGA BUMI LESTARI, MANUSIA HIDUP DAMAI: REFLEKSI DARI TAGAR #SAVERAJAAMPAT



Mahatma Gandhi pernah berkata bahwa bumi ini sejatinya mampu memenuhi kebutuhan setiap manusia, tetapi tidak akan pernah cukup untuk memenuhi keserakahan satu orang. Kalimat sederhana ini begitu relevan dengan keadaan bumi saat ini, termasuk Indonesia, negeri yang dianugerahi salah satu keindahan alam terunik di dunia Raja Ampat. Setiap kali manusia menatap birunya langit, menghirup segarnya udara pagi, atau menikmati deburan ombak laut di pantai, kita sering lupa bahwa semua itu merupakan anugerah yang tidak ternilai. Padahal, di balik segala

kemegahan alam Nusantara, ada satu pesan tunggal yang sering diabaikan: kita hanya memiliki satu bumi. Tidak ada planet pengganti, tidak ada rumah kedua selain bumi ini. Kesadaran inilah yang kembali digaungkan lewat tagar **##SavejaAmpat**, sebuah seruan moral untuk menjaga salah satu surga dunia yang kini terancam. Lebih dari sekadar isu lokal, seruan ini sekaligus menjadi refleksi tentang pentingnya menjaga bumi agar manusia dapat hidup damai, sebuah pesan universal yang kini terangkum dalam tema “Menjaga Bumi Lestari, Manusia Hidup Damai, One Earth for All [13] [52] [53]”

Raja Ampat dapat disebut sebagai mahkota permata ekologi Indonesia. Gugusan lebih dari 1.500 pulau kecil, atol, dan pasir timbul di ujung barat Papua ini adalah salah satu bentangan laut dengan keanekaragaman hayati terkaya di dunia. Para peneliti biologi laut memperkirakan kawasan ini menyimpan 75 persen spesies karang dunia, lebih dari 1.400 spesies ikan tropis, dan menjadi laboratorium alami bagi kehidupan laut yang unik. Tidak berhenti di situ, Raja Ampat juga dihuni masyarakat adat yang selama berabad-abad hidup harmonis dengan lingkungan, menjaga keseimbangan antara tradisi, subsistensi, dan pelestarian alam. Di mata dunia, Raja Ampat bukan sekadar destinasi wisata kelas dunia, melainkan ikon pariwisata berkelanjutan, magnet bagi peneliti internasional, hingga simbol kebanggaan kolektif bangsa Indonesia. Akan tetapi, ironinya, surga yang disebut sebagai “zamrud di khatulistiwa” itu kini menghadapi ancaman yang kian nyata dan mendesak.

Ancaman terbesar datang dari ulah manusia sendiri yang terpesona oleh janji-janji keuntungan jangka pendek. Eksploitasi tambang nikel di Pulau Gag, Kawe, dan Manuran sudah menyebabkan deforestasi, pencemaran air, sedimentasi laut, dan kerusakan terumbu karang yang menjadi fondasi kehidupan laut Raja Ampat. Kerusakan ekologis ini tidak hanya mengganggu fungsi ekosistem, tetapi juga menghancurkan sumber nafkah masyarakat adat yang bergantung pada kelestarian laut. Ironisnya lagi, kerusakan itu berlangsung di wilayah yang secara hukum dilindungi oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil. Peraturan seharusnya menjadi pagar,

namun dalam praktik politik-ekonomi, perlindungan hukum kerap takluk di hadapan desakan korporasi tambang dan kompromi pemerintah lokal. Pertanyaan kritisnya: jika kawasan konservasi sekelas Raja Ampat bisa “ditembus” oleh kapital ekstraktif, adakah harapan bagi wilayah konservasi lain di Indonesia?

Di sinilah munculnya **#SaveRajaAmpat** memperoleh makna politis dan moral. Tagar ini bukan sekadar tren digital di media sosial, melainkan representasi suara hati masyarakat yang resah melihat tanah airnya rusak. Melalui tagar ini, masyarakat sipil, komunitas adat, pelaku pariwisata, dan aktivis lingkungan bersatu menuntut penghentian izin tambang di pulau-pulau kecil, penegakan hukum lingkungan yang tegas, serta pengakuan hak masyarakat adat sebagai garda terdepan penjaga bumi. Tagar ini mengingatkan bahwa menjaga bumi bukanlah kewajiban sepihak pemerintah, melainkan tanggung jawab bersama semua orang sebagai warga planet. Di era koneksi digital, gerakan sosial seperti ini mampu menekan pemangku kekuasaan lewat opini publik global. Jadi, **#SaveRajaAmpat** adalah bukti bahwa solidaritas ekologis bisa melintasi batas negara dan budaya, menyatukan semua orang yang peduli pada satu pesan sederhana: bumi ini hanya satu.

Mengapa menyelamatkan Raja Ampat begitu penting? Karena kerusakan di satu kawasan akan memengaruhi keseimbangan bumi secara keseluruhan. Ekosistem Raja Ampat adalah bagian integral dari jaringan ekologi global. Hutan tropisnya adalah penyerap karbon, terumbu karangnya adalah pengimbang iklim, dan lautan di sekitarnya adalah penghasil oksigen sekaligus pengatur suhu bumi. Dengan kata lain, kerusakan lokal di Raja Ampat akan berdampak global: meningkatnya perubahan iklim, hilangnya keanekaragaman hayati, krisis pangan laut, dan bahkan ancaman pada ketahanan sosial yang lebih luas. Menjaga Raja Ampat bukan semata persoalan Papua atau Indonesia, melainkan kepentingan seluruh umat manusia. Lingkungan yang sehat menciptakan kehidupan yang harmonis, menurunkan risiko konflik akibat perebutan sumber daya, serta memperkuat perdamaian. Prinsip *One Earth for All* menegaskan bahwa bumi adalah rumah bersama; mengabaikan kerusakan di satu titik sama dengan membiarkan terjadi kepunahan yang dampaknya akan menyebar ke seluruh planet.

Kerap kali publik terjebak dalam ilusi bahwa bumi akan selalu menyediakan apa pun yang manusia butuhkan. Ada keyakinan semu bahwa kerusakan di satu kawasan bisa diganti dengan destinasi lain. Tetapi logika ini jelas keliru. Tidak ada “duplikat Raja Ampat” di belahan bumi mana pun. Tidak ada planet cadangan. Setiap hutan yang terbabat hari ini, setiap terumbu karang yang hancur karena tambang dan sedimentasi, adalah kehilangan yang tidak bisa dipulihkan dalam waktu singkat. Kerusakan hari ini adalah hutang ekologis yang diwariskan pada anak cucu kita. Generasi mendatang tidak pernah memilih untuk lahir di bumi yang tercemar dan miskin biodiversitas, namun merekalah yang akan menanggung akibat dari pilihan keliru generasi kita. Pertanyaan reflektif yang harus dijawab kini adalah: warisan macam apa yang ingin kita tinggalkan? Apakah kita ingin dikenal sebagai generasi pemuja keuntungan sesaat, atau generasi pemberani yang mengambil sikap demi masa depan bumi yang damai?

Dalam kenyataan sehari-hari, masyarakat adat Raja Ampat sesungguhnya telah memberi teladan bagaimana manusia bisa hidup harmoni dengan alam. Tradisi sasi laut, misalnya, adalah praktik kearifan lokal yang sudah berabad-abad menjaga keseimbangan ekosistem. Melalui sasi, masyarakat adat menutup sementara kawasan perairan agar ikan dan biota laut dapat beregenerasi. Sistem ini mencegah eksploitasi berlebihan sekaligus memastikan keberlanjutan mata pencaharian. Filosofi sasi lahir bukan dari teori akademik, melainkan pengalaman hidup manusia yang menyelaraskan diri dengan alam. Sayangnya, kearifan lokal ini sering kali tersingkir dalam arus pembangunan modern yang serba administratif dan birokratis. Suara masyarakat adat, yang justru paling paham tentang bumi mereka, sering tidak didengar dalam forum perumusan kebijakan. Padahal, mereka adalah benteng ekologis terakhir yang mampu memastikan keberlanjutan.

Menjaga Raja Ampat, dan pada akhirnya menjaga bumi, tentu bukan tugas yang mustahil. Solusi konkret dapat digarap melalui beberapa dimensi intervensi. Pemerintah pusat wajib menegakkan hukum lingkungan tanpa kompromi dengan korporasi nakal. Penegakan hukum yang tegas akan menciptakan efek jera sekaligus membuka jalan baru bagi

model ekonomi non-ekstraktif. Selain itu, pemberdayaan masyarakat adat harus dijadikan prioritas. Dengan menjamin hak kelola dan memberikan pendidikan serta fasilitas ekonomi berbasis kearifan lokal, masyarakat adat dapat menjadi motor pengelola ekowisata yang berkelanjutan. Ekowisata yang ramah lingkungan dan berbasis komunitas punya potensi besar karena wisatawan global semakin mencari pengalaman autentik yang peduli pada bumi. Integrasi masyarakat dalam ekowisata menjamin manfaat ekonomi lebih merata sekaligus memperkuat kesadaran ekologis.

Ke depan, gerakan pendidikan publik dan kampanye digital juga penting. Tagar ****#SaveRajapat** harus dielaborasi dalam narasi pendidikan ekologi di sekolah, kampus, serta komunitas. Generasi muda perlu dipupuk dengan kesadaran bahwa mereka sedang mewarisi rumah bersama yang hanya satu. Selain itu, transisi menuju ekonomi hijau harus dilakukan serius. Indonesia, dengan Raja Ampat sebagai salah satu *pilot project*, dapat mengembangkan jasa lingkungan seperti *carbon credit*, konservasi laut, dan penelitian biodiversitas sebagai sumber ekonomi berkelanjutan. Model ini lebih adil dibandingkan industri ekstraktif yang mengorbankan generasi masa depan.

Akhirnya, ****#SaveRajapat** adalah lebih dari sekadar kampanye ekologis. Ia adalah panggilan nurani yang menegaskan bahwa bumi kita hanyalah satu, dan kita semua adalah penumpangnya. Menjaga bumi lestari adalah satu-satunya jalan untuk memastikan umat manusia hidup damai. Kerusakan ekologis bukan hanya soal hilangnya spesies atau hancurnya alam, melainkan juga hancurnya perdamaian, keadilan, dan hak anak cucu untuk hidup layak. Kini bukan waktunya lagi untuk menunda. Pesan Gandhi kembali mengingatkan bahwa kebutuhan manusia bisa dipenuhi alam, tetapi keserakahan satu individu bisa menghancurkan bumi. Oleh karena itu, saatnya kita bersatu dan bertindak, karena kita hanya punya satu bumi: *One Earth for All* [54].

BALI DAN JALAN MENUJU PUSAT *WELLNESS* DUNIA



Di tengah dunia modern yang semakin menempatkan kesehatan fisik, mental, dan spiritual sebagai inti gaya hidup, Bali muncul sebagai salah satu destinasi dengan peluang luar biasa dalam sektor *health and wellness tourism*. Paradigma wisata global tengah mengalami pergeseran fundamental. Wisata tidak lagi dipahami hanya sebagai aktivitas penginapan mewah, destinasi foto *instagramable*, atau sekadar rekreasi singkat, melainkan transformasi menuju pencarian makna hidup, pemulihan jiwa, dan pelepasan dari tekanan ritme urban yang melelahkan. Bali, dengan lanskap alam yang menenangkan, tradisi spiritual yang dalam, dan kekayaan budaya yang unik, memiliki semua modal dasar untuk menjadi pusat

kesehatan holistik dunia. Akan tetapi, untuk benar-benar menjadikan Bali sebagai destinasi kelas dunia dalam konteks *wellness*, diperlukan upaya serius dan kolaboratif dari pemerintah, pelaku usaha, akademisi, serta komunitas lokal [55] [56] [57].

Melihat tren global, industri pariwisata memang tengah bergeser dari orientasi konsumtif menuju investasi kualitas hidup. Wisatawan dari berbagai belahan dunia tidak lagi puas dengan aktivitas “*see and shop*” yang dangkal, tetapi menginginkan pengalaman intensif dan bermakna. Yoga retreat, meditasi, terapi herbal, pelatihan kesadaran diri, hingga program detoks berbasis nutrisi menjadi kebutuhan baru wisatawan modern. Dipicu meningkatnya kesadaran akan kesehatan mental pasca pandemi, *wellness tourism* tumbuh jauh lebih cepat dibanding sektor pariwisata konvensional. Negara-negara seperti Thailand, India, dan Turki bergerak agresif membangun ekosistem *wellness* terintegrasi, menggabungkan tradisi kuno mereka dengan riset ilmiah dan inovasi digital. Bali berada dalam pusaran kompetisi ini, dengan modal yang bahkan lebih kuat dari sekadar fasilitas dan tradisi: narasi budaya yang telah mendunia lewat filosofi Tri Hita Karana – keseimbangan antara manusia, alam, dan spiritualitas. Potensi Bali luar biasa, hanya saja hingga kini belum dikelola maksimal dengan pendekatan modern dan *brand positioning* yang mapan.

Fakta menunjukkan Bali telah mendapat reputasi internasional sebagai destinasi *wellness*. Berbagai penghargaan seperti “Best Spa Destination in Asia” hingga “World’s Best Spa Destination” pernah diterima. Pertumbuhan spa, yoga studio, dan spiritual retreat di wilayah Ubud, Canggu, dan Seminyak membuktikan antusiasme pasar yang tinggi. Puluhan festival kebugaran diselenggarakan tiap tahun, yang dihadiri instruktur yoga lokal maupun internasional. Namun di balik keberhasilan ini, ada persoalan krusial terkait kepercayaan konsumen global. Banyak wisatawan yang datang dari Eropa, Australia, dan Amerika masih lebih percaya pada brand *wellness* internasional dibanding layanan lokal berbasis herbal dan kearifan Bali. Fenomena ini menciptakan ironi tersendiri: keunggulan tradisi dan sumber daya lokal Bali seringkali tenggelam oleh dominasi branding asing yang lebih mapan.

Masalah utamanya terletak pada lemahnya narasi berbasis sains dan standardisasi layanan lokal. Meskipun praktik tradisional seperti boreh, lulur rempah, pijat energik, minyak usuk, dan jamu Bali memiliki khasiat empiris, wisatawan modern sering meragukan kualitasnya. Keraguan ini bukan hasil kelemahan intrinsik produk, melainkan akibat minimnya promosi profesional, sertifikasi kesehatan bertaraf internasional, serta penelitian ilmiah yang bisa mengonfirmasi khasiat tersebut dengan data terukur. Di era yang serba terdigitalisasi, di mana preferensi konsumen ditentukan oleh ulasan daring, basis data kesehatan, dan bukti ilmiah produk *wellness* Bali masih tertinggal dalam penggunaan “bahasa pasar global” yang menuntut transparansi dan validasi. Hal inilah yang menjadi penghalang besar dalam mendongkrak potensi ke level internasional.

Kecenderungan untuk meremehkan produk *wellness* lokal tidak hanya datang dari pasar asing, tetapi juga dari pasar domestik sendiri. Kalangan kelas menengah kota besar di Indonesia menunjukkan fenomena *inferiority complex*, lebih memilih spa berlabel Jepang atau Ayurveda India ketimbang boreh Bali, dengan alasan kesan lebih modern, higienis, dan global. Padahal asumsi tersebut seringkali tidak lebih dari bias persepsi. Akibat minimnya sertifikasi internasional dan kelemahan *storytelling* budaya, produk *wellness* Bali kurang tampil atraktif di mata konsumen domestik maupun internasional. Situasi ini menegaskan perlunya narasi baru yang mampu menyatukan inovasi teknologi dan akar budaya lokal dalam satu bingkai identitas baru: *wellness* yang orisinal, modern, sekaligus berakar dalam spiritualitas Bali.

Tantangan lain yang penting adalah disparitas kualitas layanan, khususnya di kalangan UMKM penyedia *wellness*. Meskipun jumlah penyedia layanan spa, pijat, hingga yoga di Bali sangat melimpah, tidak semuanya memenuhi standar kenyamanan, keamanan, dan konsistensi pelayanan sebagaimana praktik global. Tanpa sertifikasi resmi dan pendidikan profesional yang berkelanjutan, penyedia lokal terjebak dalam pasar kelas menengah bawah, sulit naik kelas ke segmen wisatawan premium yang menuntut kualitas tinggi. Standar pelayanan global, yang mencakup kebersihan, keamanan produk herbal, hingga kompetensi instruktur, menjadi syarat mutlak dalam industri *wellness* modern. Di era

digital, penyedia layanan yang tidak adaptif terhadap sistem pemesanan daring, platform review global, maupun aplikasi monitoring kesehatan, akan tertinggal jauh dari kompetisi.

Bagaimana Bali bisa keluar dari jebakan ini? Jawabannya bukan pada satu aktor, melainkan kolaborasi lintas sektor. Pemerintah daerah dan pusat perlu hadir sebagai fasilitator dan regulator aktif yang mempercepat program sertifikasi *wellness* dan pengobatan tradisional. Branding besar harus diposisikan, misalnya melalui kampanye “*Bali Authentic Wellness*” atau “*Healing the Soul in Bali*,” sebagai narasi global yang membedakan Bali dari kompetitor. Partisipasi aktif Bali dalam forum *wellness* dunia, pameran internasional, dan promosi digital sangat krusial dalam membangun *brand trust*. Pelaku industri harus berani melakukan transformasi manajemen, keluar dari zona nyaman, dan berkolaborasi dengan merek internasional bukan dalam posisi subordinat, melainkan sebagai mitra untuk transfer pengetahuan, peningkatan sistem pelayanan, dan ekspansi pasar.

Peran akademisi dan riset juga sangat vital. Legitimasi ilmiah adalah pintu masuk untuk menembus pasar global yang kritis. Penelitian tentang khasiat empiris boreh, efektivitas minyak usuk terhadap relaksasi, atau manfaat jamu Bali dalam detoksifikasi metabolik harus dipublikasikan lewat jurnal internasional dan artikel populer. Hasil penelitian tidak hanya memperkuat promosi berbasis sains, tetapi juga memberi dasar legitimasi kebijakan untuk melestarikan dan memodernisasi produk herbal Bali. Dunia pendidikan juga harus menyiapkan kurikulum vokasional *wellness* yang relevan, melatih instruktur spa maupun yoga muda, dan memperkuat kapasitas digital mereka untuk menghadapi konsumen global yang semakin selektif.

Tidak kalah penting, komunitas lokal harus dilibatkan secara substantif. *Wellness tourism* bukan hanya bisnis elit, tetapi juga harus memberi manfaat pada masyarakat akar rumput. Pendidikan komunitas tentang gaya hidup sehat, festival *wellness* berbasis desa, dan partisipasi budaya dalam narasi *wellness* menjadi cara untuk memastikan pembangunan berbasis komunitas. Dengan semangat Tri Hita Karana, seluruh elemen manusia, alam, dan spiritualitas harus menjadi inti dari setiap pelayanan *wellness*, bahkan ketika dikemas dalam format modern yang adaptif.

Pada akhirnya, *wellness tourism* Bali punya peluang untuk tidak hanya mendatangkan wisatawan asing, tetapi juga memperbaiki kualitas hidup masyarakat Bali itu sendiri. Jika kolaborasi lintas sektor terbangun, Bali bisa menjadi pusat global *wellness* yang autentik dan berkelas. Dunia yang sibuk dan penuh tekanan membutuhkan ruang *healing*, dan Bali bisa menjawabnya dengan menawarkan transformasi: bukan sekadar destinasi, melainkan ruang penyembuhan tubuh, pikiran, dan jiwa. Di tengah hiruk pikuk dunia modern, Bali bisa tetap menjadi rumah di mana manusia menemukan kesehatan sejati dan jalan pulang batinnya [58].

MENJAGA JATILUWIH, MENYELAMATKAN JIWA PERTANIAN BALI



Bali tidak hanya digdaya dengan pantai-pantai eksotisnya, tetapi juga karena keajaiban lanskap budayanya, terutama hamparan sawah berteras yang merepresentasikan hubungan harmonis antara manusia dan alam. Salah satu representasi agung warisan tersebut adalah Jatiluwih, hamparan sawah luas di Kabupaten Tabanan yang pada tahun 2012 diakui UNESCO sebagai Situs Warisan Dunia dengan nilai universal luar biasa. Pengakuan itu diberikan bukan semata karena keindahan panoramanya, tetapi karena Jatiluwih menjadi ruang hidup sistem subak, praktik irigasi tradisional Bali yang selaras dengan filosofi Tri Hita Karana – keseimbangan antara manusia, alam, dan Tuhan. Subak tidak hanya soal teknik bercocok

tanam, melainkan sistem sosial, budaya, sekaligus spiritual yang menjaga kelangsungan peradaban Bali agraris selama berabad-abad. Akan tetapi, status gemilang itu kini tengah berada di ujung tanduk. Ancaman hilangnya pengakuan UNESCO semakin nyata akibat intervensi pembangunan, alih fungsi lahan, dan hilangnya integritas subak karena tekanan pariwisata masif dan degradasi moral konservasi [59] [60].

Jatiluwi, yang dulu menjadi simbol ketahanan budaya, kini semakin terjepit di antara kebutuhan ekonomi modern dan idealisme pelestarian. Alih fungsi lahan subak menjadi salah satu ancaman paling serius. Banyak petani menjual sawah mereka karena tekanan ekonomi maupun rendahnya nilai hasil pertanian. Dengan biaya pertanian yang terus meningkat dan daya tarik menjual lahan yang lebih cepat menutup kebutuhan hidup, generasi muda Bali semakin enggan melanjutkan tradisi bertani. Akibatnya, sistem subak yang menjadi syarat utama Warisan Dunia UNESCO kehilangan jantungnya. Lebih parah lagi, maraknya pembangunan kafe, restoran, *homestay*, dan fasilitas wisata di area persawahan telah merusak keaslian lanskap yang seharusnya dijaga. Pemandangan ikonik sawah terasering kini terbelah oleh bangunan permanen yang tidak serasi dengan lanskap budaya agraris. Seorang pengelola Daya Tarik Wisata Jatiluwi bahkan mengungkapkan bahwa aktivitas pembangunan di kawasan ini seringkali mengabaikan prinsip-prinsip konservasi, sehingga secara serius melanggar kriteria UNESCO tentang integritas dan keaslian. Jika kecenderungan ini terus berlangsung, tidak mustahil UNESCO akan mencabut status Jatiluwi, sebagaimana telah terjadi pada beberapa situs warisan dunia lainnya di belahan dunia yang gagal menjaga standar kelestarian.

Kecurigaan terhadap ancaman itu bukan sekadar isapan jempol. Data terbaru menunjukkan sedikitnya ada 13 titik pelanggaran tata ruang di kawasan inti Jatiluwi yang langsung mengarah pada kerusakan ekologis maupun budaya. Bahkan, di wilayah sekitarnya seperti LSD Banjar Batugaing, pelanggaran tata ruang kian marak dan semakin sulit dikendalikan. Pemerintah daerah Tabanan sesungguhnya sudah mengeluarkan peringatan melalui DPRD, bahkan Komisi I mendesak agar tenggat waktu penanganan tegas ditetapkan. Tanpa batas waktu yang jelas,

kebijakan hanya akan terus berputar dalam perdebatan normatif tanpa menghasilkan dampak nyata. Lebih ironis lagi, di tengah ancaman pencabutan status UNESCO, banyak pemangku kepentingan di lapangan masih memandang isu ini sekadar retorika, bukan krisis eksistensial yang menyangkut masa depan Jatiluwih, para petani, dan citra Bali di mata dunia.

Pelajaran penting bisa dipetik dari kasus internasional yang pernah mengalami hal serupa. Liverpool Maritime Mercantile City di Inggris dihapus dari daftar UNESCO karena pembangunan proyek perkotaan dan stadion yang merusak integritas historisnya. Begitu pula Dresden Elbe Valley di Jerman yang dicoret akibat pembangunan jembatan yang dianggap merusak nilai lanskap budaya. Bahkan Oman kehilangan status warisan dunia Arabian Oryx Sanctuary akibat perburuan ilegal dan eksploitasi minyak. Indonesia sendiri pernah mendapat peringatan serius dari UNESCO mengenai Hutan Hujan Tropis Sumatra karena deforestasi dan perambahan, sebelum pemerintah mengambil langkah korektif untuk mempertahankannya. Benang merah dari semua kasus ini jelas: ketika pembangunan tidak diarahkan oleh prinsip keberlanjutan, maka integritas hancur, pengakuan hilang, dan yang tersisa hanya penyesalan. Jatiluwih kini mendekati garis merah kasus serupa.

Kenyataan ini memperlihatkan ketimpangan tajam antara idealisme pariwisata Bali dan realitas di lapangan. Gubernur Bali sudah menegaskan melalui Surat Edaran Nomor 7 Tahun 2025 bahwa pariwisata Bali harus berbasis budaya, ramah pada alam, memperkuat ekonomi lokal, dan menjaga tata krama wisatawan. Akan tetapi, kenyataan di Jatiluwih menunjukkan praktik pembangunan yang sebaliknya. Subak yang seharusnya dipertahankan justru terpinggirkan oleh komersialisasi pariwisata. Beberapa kawasan sawah yang dulunya lengang kini menjadi spot wisata komersial dengan tambahan bangunan yang tidak lagi mencerminkan keaslian lanskap. Alih fungsi yang tidak terkendali tersebut tidak hanya menurunkan kualitas visual, tetapi juga menggerus sistem irigasi karena tata air harus bersaing dengan kebutuhan *homestay*, hotel, dan restoran sekitar. Generasi muda yang lebih tergoda bekerja di sektor pariwisata daripada bertani membuat masa depan subak kian suram.

Paradoks itu menunjukkan betapa sulitnya menjaga harmoni antara pembangunan ekonomi, pariwisata, dan kelestarian budaya. Di satu sisi, wisata memang dibutuhkan untuk mendukung ekonomi masyarakat. Tetapi jika wisata dilakukan tanpa batas, substansi budaya yang menjadi fondasi pariwisata Bali justru hancur. Ketika sawah tidak lagi menjadi ruang produksi pangan, melainkan sekadar latar swafoto, maka Jatiluwih sudah kehilangan rohnya. UNESCO memberi pengakuan bukan hanya karena estetika sawah Jatiluwih, tetapi karena lanskap ini mencerminkan kehidupan kolektif masyarakat adat Bali yang menjaga harmoni melalui subak. Jika nilainya direduksi menjadi sekadar atraksi visual komersial, maka status warisan dunia tak lagi relevan.

Maka jelas bahwa mempertahankan status UNESCO bagi Jatiluwih adalah pertarungan masa depan. Penegakan hukum menjadi langkah pertama. Pelanggaran tata ruang tidak boleh terus dibiarkan. Pemerintah wajib memberikan tenggat waktu yang jelas dan menegakkan sanksi, termasuk pembongkaran bangunan ilegal. Tanpa tindakan konkret, isu ancaman UNESCO akan turun derajat menjadi simbol ketidakmampuan Bali mengelola warisan budayanya sendiri. Di sisi lain, revitalisasi subak mutlak dikerjakan. Kesejahteraan petani harus diperkuat melalui insentif harga hasil pertanian, dukungan teknologi ramah lingkungan, promosi agroekowisata, serta insentif bagi generasi muda agar kembali menekuni pertanian. Subak bukan hanya urusan warisan budaya, melainkan masalah pangan, sosial, dan ekologis yang menjadi tulang punggung Bali.

Pendekatan partisipatif juga sangat penting. Tata kelola Jatiluwih harus melibatkan semua pemangku kepentingan: pemerintah daerah, pengelola DTW, masyarakat adat, petani, pelaku usaha, LSM, hingga UNESCO. Rencana pengelolaan terpadu harus disusun secara kolektif dengan batasan tegas pada pembangunan kawasan inti. Wisata yang masuk ke Jatiluwih perlu diorientasikan pada edukasi, konservasi, dan pengalaman budaya, bukan sekadar eksploitasi visual. Edukasi wisatawan tentang makna subak, misalnya melalui pusat interpretasi atau narasi digital, dapat menjadi strategi agar mereka ikut merasa bertanggung jawab menjaga sistem pertanian ini. Bersamaan dengan itu, standardisasi pembangunan berbasis Heritage Impact Assessment (HIA) penting

diterapkan sebelum setiap pembangunan fisik dilaksanakan. Audit rutin oleh UNESCO maupun lembaga nasional menjadi instrumen vital untuk memastikan integritas tetap terjaga [61] [62].

Inovasi digital bisa ikut mengambil peran dalam menjaga integritas Jatiluwih. Sistem monitoring berbasis GIS (*Geographic Information System*) dapat digunakan untuk memantau setiap pelanggaran tata guna lahan. Aplikasi digital yang memfasilitasi pelaporan masyarakat dapat memperkuat pengawasan partisipatif. Sementara itu, platform promosi wisata ramah lingkungan dapat membawa Jatiluwih ke pasar global sebagai contoh wisata budaya berkelanjutan. Semua ini sejalan dengan semangat bahwa status Warisan Dunia bukan hadiah abadi, melainkan mandat global yang menuntut komitmen berkelanjutan.

Kehilangan status UNESCO bagi Jatiluwih bukan hanya persoalan hilangnya label kebanggaan, tetapi juga keretakan identitas Bali sebagai pulau budaya. Status warisan dunia memberikan nilai jual yang sangat penting bagi pasar global. Jika status itu dicabut, dampak langsungnya adalah penurunan jumlah wisatawan, melemahnya ekonomi lokal, dan rusaknya citra Bali sebagai daerah yang mampu menjaga warisan. Lebih dari itu, kerugian yang lebih mendalam adalah hilangnya martabat kolektif masyarakat Bali yang sejak lama menempatkan filosofi harmoni sebagai landasan hidup. Oleh karena itu, mempertahankan status ini berarti mempertahankan roh kebudayaan Bali itu sendiri.

Akhirnya, Jatiluwih kini berada di persimpangan kritis antara masa lalu yang gemilang dan masa depan yang penuh risiko. Ancaman pencabutan status UNESCO adalah indikator merah bahwa pelestarian tidak boleh lagi dianggap retorika. Tindakan nyata, kolaborasi lintas sektor, dan penegakan hukum tegas harus segera diwujudkan. Subak adalah jiwa Bali, dan Jatiluwih adalah wajah dunia yang meneguhkan identitas itu. Jika integritas kawasan ini gagal dijaga, bukan hanya Jatiluwih yang hilang, tetapi juga simbol peradaban agraris Bali yang diwariskan selama ratusan tahun. Menyelamatkan Jatiluwih bukan semata urusan ekonomi atau pariwisata, melainkan pertarungan martabat budaya dan ekologi Bali di mata dunia [63].

DAFTAR PUSTAKA

1. Utama, I.G.B.R.; Turker, S.B.; Widyastuti, N.K.; Suyasa, N.L.C.P.S.; Waruwu, D. Model of Quality Balance Development of Bali Tourism Destination. *Tech. Soc. Sci. J.* **2020**, *10*, doi:10.47577/tssj.v10i1.1356.
2. Anshori, Y. Tourism Board-Strategi Promosi Pariwisata Daerah 2010.
3. Dodds, R.; Butler, R. The Phenomena of *Overtourism*: A Review. *Int. J. Tour. Cities* **2019**, *5*, 519–528.
4. Akdu, U.; Ödemiş, M. Examining the Impacts of Tourism on Gumushane Residents According to the Doxey Index. *Tur. Akad. Derg.* **2018**, *5*, 33–45.
5. Suarna, I.W. Bali Dalam Tarikan Pembangunan Berkelanjutan. *J. Bali Membangun Bali* **2018**, *1*, 199–206.
6. Utama, I.G.B.R. Keadilan Dan Keserakahan. **2016**.
7. Lubis, M. *Manusia Indonesia*; Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2001; ISBN 9794618187.
8. Subanda, I.N. Kepemimpinan Lokal Di Bali.
9. I Gusti Bagus, R.U.; Mahadewi, N.M.E. Faktor Penentu Wisatawan Eropa Memilih Bali Sebagai Destinasi Pariwisata (Determinant Factors to Visit Bali as Tourism Destination from Perspective European). *SSRN Electron. J.* **2018**, doi:10.2139/ssrn.3111200.
10. Fattah, V. *EKONOMI PARIWISATA: Teori, Model, Konsep Dan Strategi Pembangunan Pariwisata Berkelanjutan*; Publica Indonesia Utama, 2023; ISBN 6238232269.
11. Esta, P.F.A.; Wirantari, I.D.A.P. Implementasi Sustainable Tourism Dalam Pemulihan Citra Pariwisata Bali Pasca Isu “Bali Tak Layak Dikunjungi Tahun 2025” Pada Dinas Pariwisata Provinsi Bali. *Socio-political Commun. Policy Rev.* **2025**, *2*.
12. Dewi, R.K.; Ustriyana, I.N.G. Keberlanjutan Nilai-Nilai Tri Hita Karana (THK) Pada Sistem Subak Di Kawasan Wisata Dan Kawasan Agraris Kabupaten Gianyar. *SOCA J. Sos. Ekon. Pertan.* **2007**, *7*, 43976.

13. BUDARMA, I.K. CHAPTER SIX THE THK AWARDS AS AN EXAMPLE OF COMBINING BALINESE SPIRITUALITY AND SUSTAINABLE TOURISM DEVELOPMENT: A CASE STUDY. *Tour. Bali Chall. Sustain. Dev.* **2018**, 161.
14. Hutasoit, H.; Wau, R. Menuju Sustainability Dengan Tri Hita Karana (Sebuah Studi Interpretif Pada Masyarakat Bali). *Bus. Manag. J.* **2017**, 13.
15. Saputra, K.Y.; Wairocana, I.G.N.; Suardita, I.K. PENYESUAIAN RUANG TERBUKA HIJAU DI KABUPATEN BADUNG DITINJAU DARI PERATURAN DAERAH KABUPATEN BADUNG NOMOR 26 TAHUN 2013 TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN BADUNG TAHUN 2013-2033. *Kertha Negara J. Ilmu Huk.* **2018**, 1–15.
16. SUMARMI, S.; ARINTA, D.; SUPRIANTO, A.; ALIMAN, M. The Development of Ecotourism with Community-Based Tourism (CBT) in Clungup Mangrove Conservation (CMC) of Tiga Warna Beach for Sustainable Conservation. *Folia Geogr.* **2021**, 63, 123.
17. Krismawintari, N.P.D.; Utama, I.G.B.R. Study on the Implementation of Community Based Tourism Principles in Jatiluwih, Tabanan, Bali (in Indonesian). *J. Kaji. Bali (Journal Bali Stud.* **2019**, 9, 429, doi:10.24843/JKB.2019.v09.i02.p08.
18. Susiani, D. *Hukum Tata Ruang*; pustaka abadi, 2020; ISBN 623762824X.
19. Pramana, I.G.M.Y.; Sugiartha, I.N.G.; Suryani, L.P. Implikasi Pengurangan Pemakaian Plastik Sekali Pakai Terhadap Volume Sampah Di TPA Suwung. *J. Prefer. Huk.* **2024**, 5, 124–129.
20. Wedayani, N.M. Studi Pengelolaan Sampah Plastik Di Pantai Kuta Sebagai Bahan Bakar Minyak. *J. Presipitasi Media Komun. dan Pengemb. Tek. Lingkung.* **2018**, 15, 122–126.
21. McElroy, J.L.; de Albuquerque, K. Problems for Managing Sustainable. *Isl. Tour. Sustain. Dev. Caribbean, Pacific, Mediterr. Exp.* **2002**, 15.
22. Supriatna, J. *Pengelolaan Lingkungan Berkelanjutan*; Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2021; ISBN 623321047X.
23. Utama, I.G.B.R. *Pemasaran Pariwisata*; ID, 2017;
24. Wamasen, D. Paradiplomasi Provinsi Bali Dan Un Tourism Dalam Pengembangan Pariwisata Budaya Tahun 2021-2024 2025.

25. Puanandini, D.A.; Maharani, V.S.; Anasela, P. Korupsi Sebagai Kejahatan Luar Biasa: Analisis Dampak Dan Upaya Penegakan Hukum. *Public Sph. J. Sos. Polit. Pemerintah. dan Huk.* **2025**, *4*.
26. Ningtyas, E. Mepeed Dan Wacana Ajeg Bali: Sukawati Pasca Bom Bali 2002. *J. Lembaran Sej.* **2018**, *14*, 119–135.
27. Haziq, A. *HISTORIA: Naratif Kuasa, Evolusi, Inovasi Dan Konflik Sepanjang Zaman*; PTS Publishing House Sdn. Bhd., 2024; ISBN 6294930634.
28. Hilmi, M.; Alghifari, D. Menakar Fungsi Representasi DPRD Provinsi Bali: Studi Kasus Penolakan Desa Adat Intaran Terhadap Proyek Terminal Liquefied Natural Gas (LNG). *J. Ilmu Sos. dan Ilmu Polit.* **2022**, *11*, 261–266.
29. Yulianti, D.; Musthofa, M.A.; Yatima, K. Analisis Peran Pasar Tradisional Terhadap Peningkatan Ekonomi Masyarakat Desa Lagan Tengah Kecamatan Geragai. *J. Ilmu Manaj. Terap.* **2021**, *3*, 65–76.
30. Sihombing, I.K.; Dewi, I.S.; Astika, A. Analisis Kepuasan Konsumen Pada Pasar Tradisional Sebagai Dampak Dari Revitalisasi Pasar Tradisional Di Kota Medan. In *Proceedings of the Seminar Nasional Sains dan Teknologi Informasi (SENSASI)*; 2019; Vol. 2.
31. Utama, I.G.B.R. Daya Tarik Wisata Kota Denpasar Bali. *Daya Tarik Wisata Kota Denpasar Bali* **2016**.
32. Prabandari, N.R.; Sugihantara, I.K.; Wiranata, P.A. Efektivitas Ruang Pada Revitalisasi Pasar Tradisional Dengan Fasilitas Modern Di Bali Dari Sudut Pandang Perilaku Pengguna: Studi Kasus: Pasar Badung, Denpasar Bali. *J. Arsit. PENDAPA* **2024**, *7*, 22–30.
33. Smeral, E. Overcrowding of Tourism Destinations: Some Suggestions for a Solution. In *Overtourism*; Routledge, 2019; pp. 163–173.
34. Sutanto, H.; Setiadi, N.J. *Overtourism Sebagai Keniscayaan Dalam Pengelolaan Pariwisata Di Indonesia*. *Altasia J. Pariwisata Indones.* **2020**, *2*.
35. Pramono, R. *Sosiologi Pariwisata Pascapandemi COVID-19*; Penerbit NEM, 2025; ISBN 623115775X.
36. Nurhidayati, H.; Nurchayati, Z. *Transformasi Pariwisata Menuju Keberlanjutan Dan Daya Saing Global*; Deepublish, 2025; ISBN 634200532X.

37. Kurtillah, A.; Muktiningrum, C.P.S.; Napitupulu, T.V.; Maharrani, K.B.; Labina, C.R.; Rahman, A. PERSEPSI DAN DAMPAK GENERASI MUDA TERHADAP CINTA TANAH AIR DI ERA TREN# KABURAJADULU. *J. Media Akad.* **2025**, *3*.
38. Clairine, A.; Lestari, E.I.D.; Wiyono, E.N. Ekspresi Keresahan Pemuda Melalui Media Sosial: Studi Kritik Terhadap Narasi Indonesia Gelap. *Moderasi J. Stud. Ilmu Pengetah. Sos.* **2025**, *6*, 36–51.
39. Li, H.; Nijkamp, P.; Xie, X.; Liu, J. A New Livelihood Sustainability Index for Rural Revitalization Assessment-a Modelling Study on Smart Tourism Specialization in China. *Sustain.* **2020**, *12*, doi:10.3390/SU12083148.
40. Wilantara, M. *Rekonstruksi Komunikasi Pariwisata Bali Mengubah Pandangan Budaya Dari Globalitas Ke Lokalitas*; Deepublish, 2024; ISBN 6342004099.
41. Ekonomi, F.; Manajemen, J. Destination Branding and Its Influence on Tourist 's Satisfaction and Loyalty. **2012**, *11*.
42. Dmitrović, T.; Knežević Cvelbar, L.; Kolar, T.; Makovec Brenčič, M.; Ograjenšek, I.; Žabkar, V. Conceptualizing Tourist Satisfaction at the Destination Level. *Int. J. Cult. Tour. Hosp. Res.* **2009**, *3*, 116–126, doi:10.1108/17506180910962122.
43. Purnomo, E.P.; Khairunnisa, T.; Adrian, M.M.; Suling, C.F.; Sadayi, D.P.; Miftahurrohman, D.; Pandansari, D.A.; Aditya, F.; Kamaludin, N.K.; Novalia, S. *SUSTAINABLE TOURISM ON POST COVID-19 "Menciptakan Strategi Dan Tata Kelo La Baru Pariwisata Yang Berkelanjutan Paska Pandemi Covid-19"*; TOHAR MEDIA; ISBN 6238148055.
44. Herawati, S. Peramalan Kunjungan Wisatawan Mancanegara Menggunakan Generalized Regression Neural Networks. *J. INFOTEL-Inform. Telekomun. Elektron.* **2016**, *8*, doi:10.20895/infotel.v8i1.49.
45. Rafifo K, M. Perancangan Terminal Penumpang Bandar Udara Internasional Di Kabupaten Buleleng Bali: Tema High-Tech 2016.
46. Bharatha Nada, I. Strategis Dinas Pariwisata Dalam Peningkatan Destinasi Wisata Di Kecamatan Petang Kabupaten Badung Provinsi Bali 2018.

47. Prabawanti, B.E.; Herman, S.Y.R.S. *Sukses Membangun Kewirausahaan Sosial: Konsep, Teori, & Praktik*; Penerbit Unika Atma Jaya Jakarta, 2019; ISBN 6025526540.
48. Press, U.G.M. *Pariwisata Indonesia Kontemporer*; Ugm Press, 2021; ISBN 6023869653.
49. Fawcett, D.; Panigada, C.; Tagliabue, G.; Boschetti, M.; Celesti, M.; Evdokimov, A.; Biriukova, K.; Colombo, R.; Miglietta, F.; Rascher, U.; et al. Multi-Scale Evaluation of Drone-Based Multispectral Surface Reflectance and Vegetation Indices in Operational Conditions. *Remote Sens.* **2020**, *12*, doi:10.3390/rs12030514.
50. Mukhaer Pakkana, S.E. Adaptasi Ekonomi: Mencari Titik Keseimbangan Baru 2024.
51. SH, K.T.W. *Prospektif Hakim Pemeriksa Pendahuluan Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia*; Pustaka Aksara, 2021; ISBN 6239615609.
52. Adams, C.; Frost, G.; Webber, W. Triple Bottom Line: A Review of the Literature. *triple bottom line* **2013**, 17–25.
53. Slaper, T.F.; Hall, T.J. The Triple Bottom Line: What Is It and How Does It Work. *Indiana Bus. Rev.* **2011**, *86*, 4–8.
54. Adi, B. HARAPAN, CINTA DAMAI DAN PERDAMAIAN.
55. Mueller, H.; Kaufmann, E.L. *Wellness tourism*: Market Analysis of a Special Health Tourism Segment and Implications for the Hotel Industry. *J. Vacat. Mark.* **2001**, *7*, 5–17.
56. Kurniawan, L.L. *Health and Wellness tourism*: A Strategic Plan for Tourism Entrepreneurship. **2017**.
57. Susanti, H.; Wilyadewi, Y. *Wellness tourism* as a Form of Adaptation to the Dynamics of Bali Tourism in the New Normal Era. In Proceedings of the 7th International Conference of Interreligious and Intercultural Studies (ICIIS); 2021; pp. 24–37.
58. Budi Apsari, P.I. Meditation For A Better Life As A Pautential *Wellness tourism* In Bali. *WICAKSANA, J. Lingkung. Pembang.* **2019**, *3*, 71–83.
59. Study on the Implementation of Community Based Tourism Principles in Jatiluwih, Tabanan, Bali. *J. Kaji. Bali J. Bali Stud.* **2019**.
60. Karana, T.H. IMPLEMENTASI TRI HITA KARANA DALAM PENGELOLAAN DAYA TARIK WISATA JATILUWIH, TABANAN. **2024**.

61. Utama, R.; Mahadewi, N.M.E. The Contradiction of Managing Tourism Objects Based on Culture and Its Heritage. *SSRN Electron. J.* **2014**, doi:10.2139/ssrn.2517074.
62. THE VISITOR SEGMENTATION OF JATILUWIH BALI. *Int. J. Appl. Sci. Tour. Events Vol. 3 No.2 December 2019* **2019**.
63. Vitiara, M.D.; Putri, A.A.; Triadi, J. Analisis Dampak Alih Fungsi Lahan Subak Terhadap Kerawanan Bencana Banjir:(Studi Kasus Di Desa Jatiluwih, Kecamatan Penebel, Kabupaten Tabanan, Provinsi Bali). *Soc. Agric. Food Syst. Environ. Sustain.* **2024**, 1.

BIODATA PENULIS



Prof. Dr. I Gusti Bagus Rai Utama, S.E., M.M.A., M.A. lahir di Nusasari, Melaya, Jembrana, Bali pada 10 Oktober 1970, menempuh pendidikan sarjana di bidang Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan di Universitas Mahasaraswati Denpasar, kemudian meraih gelar magister Manajemen Agribisnis dari Universitas Udayana serta gelar Master of Arts in International Leisure and Tourism Studies dari CHN Professional

University, Belanda. Ia menyelesaikan program doktor di bidang Pariwisata pada tahun 2014 di Universitas Udayana dan memulai karier akademik sebagai Asisten Ahli Bidang Ekonomi Pariwisata di Universitas Dhyana Pura sejak 2003, aktif mengabdikan diri dalam penelitian, pengajaran, serta berbagai kegiatan pengabdian masyarakat, khususnya di bidang manajemen destinasi, agritourism, dan pariwisata lansia. Sejak 2019, beliau menjabat sebagai Rektor Universitas Dhyana Pura dan pada tahun 2024 dikukuhkan sebagai Guru Besar Manajemen Bisnis Pariwisata, turut menulis beberapa buku ajar, membina organisasi profesi, serta menjadi pembicara ilmiah di berbagai forum nasional dan internasional. Dikenal sebagai akademisi inspiratif yang berkontribusi besar dalam pengembangan pariwisata berkelanjutan dan ekonomi kreatif Bali, Prof. Rai Utama memegang motto hidup: “Hidup ini adalah kesempatan untuk melayani sesama”.